



UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI SEKTOR BATIK

**(Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten
Banyuwangi)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**BAYU NIRWANA KUSWONO
NIM. 125030600111008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG**

2017

MOTTO

**“AWALI DENGAN *BISMILLAH* AKHIRI
DENGAN *ALHAMDULLIAH* SERTA MINTA
RESTU PADA ORANG TUA”**

(Bayu Nirwana Kuswono, 2017)



LEMBAR PERSEMBAHAN

FATCHUR PERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA

Kedua orang tua, Ibu Sarofah dan Ayah Alm. H. Mashuri Kuswono yang telah memberikan semangat dan dukungan moril maupun materiil serta adik-adik saya Basofi, Oktavian dan Hakiki yang selalu memberikan dukungan dan semangat

Keluarga Besar Alm. Mbah Nadah dan Alm. Mbah Syamsul yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa

Keluarga besar Mbah Dariah dan Mbah Sarkoyang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa

Wanita spesial dari hidup saya yang kelak akan jadi pasangan

Sahabat-sahabat dari Banyuwangi yang tak terlupakan (Dian, Candra, dan Khusnul alias si upin)

Abah Shodiq dan Umi Lilik serta saudara “Kost Kertorahayu 62 A” (Wisnu, Fatur, Bang Riki, Bang Irvan, Bang Suryo, Bang Kemal, Fila, Ahmad, Dadang, dan Gema) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa

Sahabat-sahabat mahasiswa akhir saya Tino, Anas, Rizky, Rifqi, Sigit, Abdul, Nur, Muhsin, Arif Shofi, Syarifuddin, Veggy, Alif, Pepen dan Agus.

Teman-teman baru saya di Kontrakan Joyogrand (Handoko, Veggy, JB, Marben, dan Dikin)

Teman-teman Perencanaan Pembangunan 2012

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sektor Batik (studi pada Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 20113, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juli 2017



Bayu Nirwana Kuswono

125030600111008



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sektor Batik**

Disusun oleh : Bayu Nirwana Kuswono

NIM : 125030600111008

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, Juni 2017

Komisi Pembimbing

Komisi Pembimbing Ketua

Anggota

Dr., Drs. Abdullah Said, M.si
NIP.19570911 198503 1 003

Dr. AlfiHarisWanto, SAP., M.AP., MMG
NIK. 1981061 200501 1 005

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Agustus 2017
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi Atasnama : Bayu Nirwana Kuswono
Judul : Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor batik (studi dinas Perindustrian perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi)

Dan dinyatakan LULUS

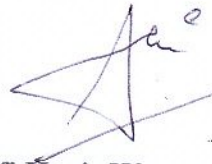
MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.si
NIP. 19570911 19853 1003



Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMG
NIP. 1981061 200501 1 005

Anggota

Anggota



Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
NIP. 19711013 200003 2 001



Akhmad Amiruddin, SAP, M.AP. M.Pol,S.c
NIP. 201405 870426 1 1001

RINGKASAN

Bayu Nirwana Kuswono, 2017, **Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan IKM Batik Banyuwangi** (studi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi), Pembimbing Dr. Abdullah Said, M.si. anggota Pembimbing: Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMG110 Hal.+xvii

Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu upaya dalam memperbaiki dan membantu IKM batik dalam mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha tersebut berguna untuk meningkatkan pendapatan pelaku IKM. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha IKM batik di Banyuwangi yaitu dengan adanya pelatihan untuk membatik serta sosialisasi tentang peminjaman di bank.

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi (1) Upaya pemerintah dalam pemberdayaan IKM batik Banyuwangi (2) Faktor pendukung dan faktor pendorong. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana 2014.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi dilaksanakan melalui pelatihan setiap tahunnya setelah diadakan musrenbangdes. Masyarakat banyak yang meminta adanya pelatihan untuk membatik di daerahnya. Adanya pelatihan berguna untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan tenaga kerja baru untuk pengrajin batik. Klinik IKM juga berguna untuk mengatasi IKM yang mengalami permasalahan akan dibantu. Permasalahan yang dihadapi oleh IKM batik di Banyuwangi bisa dikonsultasikan ke klinik IKM untuk mendapat bantuan dari klinik IKM seperti permasalahan perizinan untuk melakukan peminjaman. Pelaku IKM sangat terbantu dengan adanya klinik IKM untuk melakukan peminjaman dan sangat dibantu dalam pemasaran karena IKM batik banyak diikuti pada beberapa event-event batik di dalam daerah maupun di luar daerah. Pelaku IKM dalam mendapatkan modal rata-rata sudah mandiri dan tanpa adanya bantuan modal dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah membantu dalam memberikan kemudahan kepengurusan surat dan memberikan sosialisasi kepada pelaku IKM tentang bagaimana peminjaman di bank.

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya desain baru untuk batik Banyuwangi serta penggunaan alat-alat membatik yang lebih modern, selain untuk menambah eksistensi batik Banyuwangi di luar daerah dan dapat memperbaiki kualitas batik Banyuwangi agar menjadi lebih baik, dan juga perlu adanya pelatihan sejak dini untuk menciptakan pekerja yang siap kerja dan berkualitas.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, IKM dan Batik.

SUMMARY

Bayu Nirwana Kuswono, 2017, the Effort of Local Government in Small and Medium Industries Batik Banyuwangi (Studies in The Department of Industry, Trade and Mining Banyuwangi) Tutors Dr., Abdullah Said, M.si. A member of Tutor: Alfi Haris wanto, SAP., M.AP., MMG. 110 thing + XVII.

The local government effort in empowering the Small and Medium Industries batik in Banyuwangi Regency is an eggort in fixing and help small and medium industries of batik in developing his business. Development of the useful effort to increase the income of the perpetrator of the small and medium industries. One way to expand the small and medium industries batik in Banyuwangi namelu the existence of training for batik and dissemination about loaning in the bank.

A method of the research ises reseacrh descriptive with a qualitative approach. Focus research covering (1) government effort to in small and medium industries batik Banyuwangi (2) factors in support and factors driving. Technique data collection using interviews, observation, and documentation. Analysis data using Miles, Huberman, and Saldana (2014).

The results of this research show that the local government effort in empowering the small and medium industries batik in Banyuwangi was implemented through training every year once held MUSRENBANGDES. The community requesting the presence of a lot of training to make batik on its territory. The presence of useful training to enhance skills and create new workforce for batik craftsmen. The clinic is also useful for Small and Medium Industries overcome problems that experienced small and medium industries will be helped. The problems faced by small and medium industries of batik in Banyuwangi can be cosulted to small and medium industries clinic to get help from the licensing issues such as small and medium industries clinic to do the borrowing. The perpetrators of the small and medium industries greatly helped by the presence of small and medium industries borrowing to do clinics and assisted in marketing because of the very small and medium industries included many batik on batik several events in the region and outside region. Perpetrators of small and medium industries in capital gain on avaeage already independently and without any help from the local government capital. Local governments assist in providing ease of stewardship of letters for lending in banks and providing socialization to small and medium industries about how to lend in banks.

Advice of research is needed a new design for batik Banyuwang and the use of tools batik more modern, in addition to increase in ecistence Banyuwangi in other regions and can improve Banyuwangi batik to be better, and also need to the training in early to create workers ready to work and quality.

Keywords: Effort, Local Government, Empowerment, small and medium industries and Batik.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan IKM Batik Banyuwangi** (Studi di Dinas Koperasi dan IKM dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Hermawan S.IP., M.Si selaku koordinator minat perencanaan Pembangunan;
4. Dr., Abdullah Said, M.siselaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya;



5. Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMGselaku Anggota Dosen

Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, banyak dorongan semangat dalam penulisan ini serta selalu sabar menghadapi saya;

6. Bapak dan Ibu dosen Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

7. Bapak Trijoko selaku seksi bidang ILOMETA Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangiyang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian;

8. Ibu Triyani selaku pembimbing klinik IKM Kabupaten Banyuwangi

yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan IKM Kabupaten Banyuwangi;

9. Ibu Hanni selaku pemilik batik yang telah mengizinkan saya untuk

melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta saran dalam penelitian ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan Pemerintah	16
1. Pengertian Pemerintah Daerah	16
2. Peran Pemerintah Daerah	18
B. Administrasi Pembangunan	22
1. Administrasi Publik	22
2. Pengertian Administrasi Pembangunan	24
3. Pengertian Perencanaan Pembangunan	26
C. Konsep Pemberdayaan	30
1. Pengertian Pemberdayaan	30
2. Tujuan Pemberdayaan	31
3. Proses Pemberdayaan	33
4. Manfaat Pemberdayaan	34
5. Tahapan Pemberdayaan	35
6. Hambatan Pemberdayaan	37
7. Indikator Pemberdayaan	38
D. Industri Kecil dan Menengah	39
1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah	39
2. Pengembangan industri Kecil dan Menengah	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43



B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Kabupaten Banyuwangi.....	52
a) Gambaran Geografis Banyuwangi.....	52
b) Pembagian Wilayah Administrasi.....	53
c) Keadaan Penduduk.....	54
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan.....	55
3. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM.....	59
4. Gambaran Umum IKM batik Banyuwangi.....	62
B. Penyajian Data	
1. Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM batik.....	66
a) Strategi Peningkatan kemampuan <i>financial</i>	69
b) Pengembangan Pemasaran.....	74
2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat.....	77
a) Faktor pendukung.....	78
1) Dukungan dari Pemerintah daerah.....	78
2) Penggunaan Teknologi yang lebih modern.....	81
3) Ketersediannya Bahan Baku.....	83
b) Faktor Penghambat.....	84
1) Kurangnya Inovasi dalam desain Batik.....	84
2) Tenaga Kerja Produksi.....	86
3) Rendahnya Daya Saing UMKM batik.....	87
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	88
1. Analisis terhadap Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Batik di Banyuwangi.....	89
a) Strategi Peningkatan kemampuan <i>financial</i>	89
b) Pengembangan Pemasaran.....	92
2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pemberdayaan UMKM Batik.....	95
a) Faktor pendukung.....	95
1) Dukungan dari Pemerintah Daerah.....	95
2) Penggunaan Teknologi yang lebih modern.....	97
3) Bahan Baku Melimpah.....	98
b) Faktor Penghambat.....	99
1) Kurangnya Inovasi dalam Desain Batik.....	99
2) Tenaga Kerja Produksi.....	100
3) Daya saing Rendah.....	102



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi	7
2.	Peran Pemerintah	19
3.	Ciri-ciri pembeda Administrasi Publik dengan Administrasi Pembangunan.....	25
4.	Nama Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.....	54
5.	Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.....	54
6.	Tugas Klinik UMKM dan Koperasi	61
7.	Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi.....	63
8.	Potensi IKM Batik	65



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Analisis data Interaktif	47
2.	Peta Kabupaten Banyuwangi.....	51
3.	Struktur Organisasi DISPERINDAGTAM	59
4.	Mobil Klinik UMKM.....	67
5.	Pelatihan Desain Batik Baru Banyuwangi	70
6.	Pagelaran Batik Banyuwangi Festival (BBF).....	74
7.	Pengrajin Batik Banyuwangi Menggunakan Canting Elektrik	80
8.	Desain Batik Banyuwangi	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan wujud kemauan suatu negara untuk berkembang menjadi lebih baik. Pembangunan dapat memberikan hasil yang baik untuk sebuah negara jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada di negara tersebut. Siagian (2012:4) berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dari definisi di atas pembangunan merupakan usaha secara sadar dan terencana suatu negara untuk melakukan perubahan dengan memandatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Dengan adanya pembangunan yang baik diharapkan pemerintah dapat mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. Pembangunan di suatu negara secara bertahap akan semakin berkembang sesuai keadaan masyarakat. Dengan adanya pembangunan, negara berkembang sedang berusaha untuk mengubah keadaan masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam hal ini ada sangkut pautnya dengan ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian yang baik salah satunya ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran,



hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial. Sejak adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan sudah tidak lagi terpusat lagi melainkan sudah merata di berbagai daerah, karena adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sendiri.

Pemberian kewenangan yang besar terhadap daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan terhadap masyarakat berjalan lebih baik dan potensi daerah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan agar dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memutuskan kebijakan untuk daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pembangunan daerah jika dilihat administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1994:97) menyatakan :

“Masalah pemerintahan daerah dilihat pula dari segi apakah pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai konsisten dalam usaha pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerahnya. Hal ini berarti bahwa rencana kebijakan maupun program-program pembangunan nasional harus memperhatikan pertimbangan regional”.

Pemerintah daerah meskipun sudah diberi wewenang untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya tetap saja haruslah mengikuti arahan dari pembangunan nasional. Hal ini dilakukan agar pembangunan daerah sejalan dengan pembangunan nasional.



Menurut Syahroni (2001:16), pembangunan daerah secara umum memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah;
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang atau berkelanjutan.

Pernyataan dari tujuan-tujuan pembangunan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dengan terwujudnya pembangunan ekonomi yang baik maka dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai otoritas dalam membangun perekonomiannya sendiri, maka dari itu setiap daerah memiliki hak untuk mengolah dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerahnya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Pembangunan daerah, pemerintah daerah harus melihat potensi apa saja yang ada di daerahnya. Potensi di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu pengembangan IKM.

Upaya pengembangan IKM dapat dilakukan dengan cara mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau disebut dengan pemberdayaan (Surjono dan Nugroho, 2008:25). Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui pemberian pengetahuan, penguatan modal dan perlindungan terhadap produk. Sedarmayanti (2003: 113) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat mendorong tumbuh dan



berkembangnya kreatifitas dan inovasi, mampu mendayagunakan modal intelektual, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Sumodiningrat (1999) menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat jika dikembangkan membuat masyarakat menjadi mandiri dan perekonomiannya meningkat.

Pemberdayaan dibutuhkan untuk melatih kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap IKM tidak hanya ditujukan pada pemecahan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini, namun pemberdayaan diharapkan mampu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada masa mendatang. Hal itu dikarenakan IKM memiliki tujuan-tujuan visioner dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan SDM, menciptakan produk domestic yang berkualitas dan berdaya saing serta kemampuan IKM dalam menghadapi krisis ekonomi. Menurut Tambunan (2009: 46) yang menyatakan bahwa IKM memiliki kontribusi yang sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan, fakta mengungkapkan bahwa IKM mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar, oleh karenanya IKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan dalam menanggulangi pengangguran.

Pemberdayaan masyarakat yang melatih kemandirian masyarakat memiliki sejumlah hambatan. Menurut Adi (2008) hambatan yang sering muncul adalah



sulitnya untuk menyinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Kebutuhan tiap masyarakat berbeda satu sama lain, makanya untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat dalam pemberdayaan sulit dilaksanakan karena kebutuhan akan pemberdayaan berbeda. Sekelompok masyarakat juga akan menolak jika program pemberdayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 5 tentang Industri kecil dan menengah dijelaskan tujuan-tujuan UMKM yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran usaha kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka IKM merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan bangsa yang mampu berdaya saing, menciptakan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. peranan IKM sangat penting dalam pembangunan nasional, seperti yang diungkapkan oleh Suprayanto (2012: 31) yang menyatakan bahwa peranan usaha kecil dalam pembangunan nasional antara lain:

1. Menyerap Tenaga Kerja baru.
2. Penyedia Barang dan Jasa bagi Masyarakat.
3. Penyedia Suku Cadang bagi Usaha Skala Menengah Dan Besar.
4. Mengurangi Urbanisasi.
5. Mendayagunakan Sumber Ekonomi Daerah.
6. Menunjukkan Citra Diri bangsa Indonesia.



Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Peranan IKM merupakan salah satu kunci sukses peningkatan perekonomian nasional. IKM juga memegang peran penting dalam pengembangan masyarakat untuk menjadi lebih berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM sangatlah dibutuhkan, hal ini karena pemerintah daerah berperan penting dalam pemberdayaan IKM guna menciptakan perekonomian daerah yang terus berkembang. Pemberdayaan IKM secara berkala dan berkelanjutan pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa keberadaan IKM sangat membantu pengembangan perekonomian di daerah. Menurut Suprayanto (2012: 31) menyatakan bahwa salah satu peranan atau keuntungan dari IKM dalam pembangunan nasional adalah penyerapan tenaga kerja yang kreatif serta penyediaan produk bagi masyarakat. Sektor IKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sumber daya alam yang dapat ditingkatkan sebagai produk-produk unggulan yang memiliki daya saing lebih tinggi.

Pemberdayaan IKM jika berhasil akan meningkatkan ekonomi di nasional dan daerah. Pemerintah khususnya pemerintah daerah diharuskan untuk meningkatkan IKM di daerah masing-masing agar meningkatkan perekonomian daerahnya. Beberapa daerah sudah melakukan pemberdayaan IKM untuk meningkatkan perekonomian daerahnya salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa tahun ini Kabupaten Banyuwangi mengembangkan



ekonomi lokal melalui pariwisata alam. Dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten banyuwangi membuat perkembangan IKM di Kabupaten Banyuwangi meningkat.

Hal itu merupakan strategi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan IKM di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Dengan mengembangkan pariwisata maka akan berdampak langsung pada IKM karena banyaknya wisatawan dari luar daerah Kabupaten Banyuwangi yang mendatangi tempat wisata. Promosi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi maka akan menarik wisatawan datang ke Banyuwangi secara otomatis sektor perhotelan, kuliner dan transportasi akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga produk-produk yang dihasilkan IKM seperti kerajinan, cinderamata, aksesoris atau makanan ringan akan laku, karena wisatawan pasti akan mencari barang khas Banyuwangi untuk dijadikan oleh-oleh.

Tabel 1 Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Wongsorejo	311	323	1.156	1.171
2	Kalipuro	818	875	2.419	2.528
3	Licin	195	198	464	488
4	Glagah	342	352	1.445	1.556
5	Giri	111	113	384	385
6	Banyuwangi	642	691	2.286	2.407
7	Kabat	1.114	1.154	2.660	2.822
8	Rogojampi	2.345	2.371	7.684	7.707
9	Songgon	556	577	1.479	1.572
10	Sempu	938	985	1.854	1.861
11	Singojuruh	399	403	985	1.042
12	Srono	2.822	2.929	8.013	8.550
13	Cluring	450	484	1.346	1.350
14	Gambiran	516	537	2.154	2.169

15	Genteng	1.252	1.316	3.418	3.678
16	Glenmore	761	814	3.485	3.764
17	Kalibaru	330	338	1.118	1.202
18	Tegalsari	298	308	1.063	1.140
19	Muncar	1.602	1.615	9.829	9.937
20	Tegaldlimo	761	814	4.748	4.784
21	Purwoharjo	380	383	1.433	1.543
22	Bangorejo	339	344	839	852
23	Siliragung	493	512	1.131	1.189
24	Pesanggaran	488	551	1.909	1.974
	Jumlah	18.305	18.987	63.302	65.635

Sumber: Dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi 2017

Tabel di atas menjelaskan jumlah industri kecil dan menengah di tahun 2016 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Beberapa daerah mengalami kenaikan jumlah industri kecil dan menengah. Adanya peningkatan jumlah ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Karena jika jumlah unit IKM bertambah maka kebutuhan akan tenaga kerja bertambah.

Ada beberapa prinsip yang mendasari pemberdayaan IKM di Kabupaten Banyuwangi. Prinsip-prinsip tersebut sudah diatur dalam PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM pasal 3 (tiga) yakni: 1) Efektif; 2) Efisien; 3) Terpadu; 4) Berkesinambungan; 5) Professional; 6) Adil; 7) Transparan; 8) Akuntabel; 9) Kemandirian; 10) Etika usaha; 11) Peningkatan daya saing; 12) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.

Prinsip-prinsip di atas adalah yang mendasari adanya pemberdayaan IKM di Kabupaten banyuwangi. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat membuat IKM yang sesuai dengan

prinsip-prinsip di atas. Salah satu sektor IKM yang saat ini sedang berkembang adalah IKM sektor batik. Sektor IKM batik di Kabupaten Banyuwangi saat ini perlu dikembangkan karena memiliki potensi yang cukup besar. Karena dengan adanya pemberdayaan IKM di sektor batik maka akan menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Banyuwangi dibuat oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi ketika wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi maka diharapkan IKM sektor batik diharapkan ikut berkembang juga. Sebanyak 32 pengrajin batik yang telah tumbuh di 32 lokasi lapangan pekerjaan yang tersedia di sektor industri batik, dimana di salah pengrajin batik tersebut mampu memperkejakan dan menyerap tenaga kerja hingga 20 orang tenaga kerja. (Dinas perindustrian perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi : 2017)

Salah satu yang menjadi sentra IKM batik di Kabupaten Banyuwangi adalah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Di desa ini, masyarakat masih menyimpan batik motif asli Kemiren yang berusia ratusan tahun. Di Kemiren terdapat banyak motif batik asli suku Using. Diantaranya, Sembruk cacing, Gajah oling, umah tawon, kopi peacah, gedheg'an, gajah mungkung, paras gempal, srimpet, wader kesit, kangkung setingkes, lakaran, juwono, gringsing, garuda mungkur dan sekar jagad. Motif-motif asli batik Desa Kemiren tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. (www.banyuwangibagus.com)

Salah satu strategi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan IKM di sektor batik adalah dengan mengadakan sebuah acara yang dinamakan BANYUWANGI BATIK FESTIVAL (BBF). Acara ini digelar

diharapkan dapat menarik masyarakat Banyuwangi sendiri dan para wisatawan dari luar daerah agar tertarik membeli batik Banyuwangi. Acara ini dilaksanakan mulai dari tahun 2012 lalu semenjak diangkatnya Azwan Anas menjadi Bupati Kabupaten Banyuwangi. Namun strategi ini memiliki hambatan yaitu para pelaku usaha batik masih belum siap dalam menerima permintaan pasar dikarenakan kurangnya modal dan kurangnya bahan-bahan pembuatan batik. Pemerintah daerah tidak melihat bagaimana kesiapan para pengrajin batik dalam menyelenggarakan acara tersebut, sehingga hanya ada beberapa para pengrajin yang ikut serta dalam acara BBF. Sedangkan yang lain masih belum bisa siap dalam mengikuti penyelenggaraan acara tersebut. (sumber olahan penulis)

Pengrajin batik di Kabupaten banyuwangi saat ini mengalami kesulitan dalam hal pengadaan bahan produksi. Beberapa bahan dasar produksi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan batik adalah jagrak (kayu yang digunakan untuk membentangkan kain) wajan (sebagai tempat untuk mencairkan “malam” di atas api yang berasal dari kompor), “malam” (lilin untuk membatik), kain, canting (alat untuk melukiskan “malam” yang sudah cair), dan pewarna (Salamun dalam Simatupang (2013:31-34)). Beberapa bahan tersebut didatangkan di luar Kabupaten Banyuwangi, namun untuk jagrak, wajan, canting dan pewarna yang berasal dari alam seperti daun dan kayu tersedia di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Bahan dasar “malam” didatangkan di luar Kabupaten Banyuwangi seperti Bali dan Pekalongan, sedangkan kain didatangkan langsung dari Malang. Jika ketersediaan bahan baku yang dekat atau mungkin berada di wilayah industri, akan memudahkan dalam proses produksi. Pemerintah daerah Banyuwangi harus



memberikan akses untuk alat-alat dan bahan-bahan pembuat batik. (hasil wawancara dengan dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan)

Pemerintah Banyuwangi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk IKM batik mengalami masalah. Salah satu masalahnya yaitu karena permintaan masyarakat yang berbeda-beda jadi sulit untuk mewujudkan suatu program yang terpadu untuk pemberdayaan. Banyak masyarakat yang tidak ingin mengikuti pemberdayaan karena kebutuhan yang diinginkan berbeda. Ada juga yang sudah bosan dengan pemberdayaan yang itu-itu saja, karena pada dasarnya banyak yang sudah terlatih dalam membatik. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi masih kurang dalam memberikan pemberdayaan dalam penggunaan IPTEK kepada para pengrajin IKM. Banyak pengusaha batik yang masih belum bisa menggunakan IPTEK dalam memasarkan produknya dengan baik yang akan menyebabkan hasil produk batik masih kurang dalam berdaya saing dengan daerah lain. Karena kurangnya pemahaman akan IPTEK, maka masyarakat sulit menerima apa yang disosialisasikan tentang penggunaan teknologi baru dalam membatik. Pembaharuan teknologi membatik digunakan untuk efisiensi membatik. Kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi, mengakibatkan pemberdayaan menjadi sulit dilaksanakan.

Kurangnya daya saing dikarenakan karena adanya kurangnya pemasaran yang tepat sasaran dan inovatif. Hasil yang kurang memiliki daya saing tersebut maka IKM butuh perhatian khusus terutama dalam pemberdayaan IKM batik. Belum terkenalnya batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi membuat pemasaran masih sulit dilakukan karena batik Banyuwangi masih kalah pamor



dengan batik-batik yang ada di daerah Jawa Tengah dan Jogjakarta. Adanya pemberdayaan IKM batik Banyuwangi diharapkan pelaku IKM akan lebih mandiri.

Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah memberikan bantuan modal kepada pengrajin batik berupa pinjaman lunak. Tetapi para pengrajin banyak yang tidak mau menggunakan pinjaman lunak karena para pengrajin batik menginginkan bantuan berupa modal bukan pinjaman. Pengrajin batik dinilai masih belum mampu melakukan pinjaman karena takut tidak sanggup membayar tagihan pinjaman. Selain itu kurangnya informasi dalam memberikan pinjaman atau modal membuat para pengrajin batik sulit mengembangkan usaha batik dan belum bisa melayani permintaan pasar. Hal ini disebabkan Karena pemerintah daerah sendiri masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi dengan adanya pinjaman lunak kepada pengrajin batik.

Berdasarkan masalah di atas dapat menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik sangat diperlukan. Hal tersebut karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan IKM batik. Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM dibutuhkan karena pemerintah daerah merupakan aktor sentral dalam pemberdayaan IKM di Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu penulis tertarik meneliti IKM batik dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan IKM Sektor Batik di Kabupaten Banyuwangi** (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan).”



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberdayaan IKM batik?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang potensi IKM batik dalam potensi daerah
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis
 - c. Memperkaya kajian keilmuan administrasi publik
2. Manfaat Praktis
 - a. Tersedianya informasi mengenai potensi IKM sektor batik di Kabupaten Banyuwangi



- b. Sebagai dasar arah penentuan kebijakan ekonomi daerah di industri kecil menengah konveksi dalam menghadapi era otonomi daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi
- c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan IKM sektor batik.

E. Sistematika Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penelitian yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori, konsep-konsep, dan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN



Bab ini menguraikan tentang analisis upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis strategi yang telah dilakukan serta memberikan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme pembagian urusan pemerintahan atau pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan mengalami pergeseran di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, terakhir mengalami pergeseran kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditambahi dengan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016

tentang perangkat daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 1 ayat 6 pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Haris (dalam Nurcholis 2007: 100), mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan melalui pemerintah daerah akan lebih membantu pemerintah pusat dalam mengontrol pembangunan di daerah.

Hossein dalam nurcholis (2010: 20) Menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengandung tiga artikulasi yaitu:

1. Dalam arti menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya adalah pemerintah daerah disini sebagai badan pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintah di daerah.
2. Merujuk pada arti fungsi/kegiatannya. Pemerintah daerah disini adalah pemerintah daerah yang merupakan bentuk aktifnya. Jadi pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
3. Pemerintah daerah diartikan sebagai otonom, yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga yang ada ditingkat daerah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sendiri yang mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal tidak termasuk beberapa urusan yang harus dibicarakan



dulu pada pemerintah pusat terlebih dahulu. Pemerintah daerah yang dimaksud di atas :

1. Pemerintah daerah propinsi yaitu pemerintah provinsi dan DPRD provinsi, yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pemerintah daerah/kota, yang terdiri dari sekretarait daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Muluk (2007: 57) menambahkan bahwa pandangan tradisional tentang pemerintah daerah memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan serta bertugas menegakan keadilan secara pasti, sehingga pandangan mengenai pemerintah daerah hanya terbatas. Berbagai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah pusat dan provinsi di serahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk meningkatkan keefisiensi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan suatu badan atau organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pemimpin dan pengatur pemerintah daerah serta berhak menentukan prioritas pembangunan di daerahnya sendiri sesuai potensi yang dimiliki.

2. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan peraturan untuk masyarakat. Menurut adam smith dalam muluk (2009:111) pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap



anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti.

Pengertian peran pemerintah di atas menyatakan bahwa hak-hak setiap masyarakat dalam memperoleh perlindungan dari pemerintah. Namun peran pemerintah sangat kompleks sekarang karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berbeda dengan Kuncoro (2004:110), yang menyatakan bahwa peran pemerintah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan terhadap si miskin, namun pemerintah juga bisa saja mengambil peran aktif, seperti mendorong kegiatan swasta dan retribusi aset. Pengertian menurut Kuncoro lebih kompleks daripada pengertian menurut Adam Smith yang hanya meminta perlindungan dari pemerintah saja, peran pemerintah menurut Kuncoro meminta penyediaan kebutuhan publik bagi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi hanya terpaku pada masyarakat miskin saja.

World Bank menjelaskan bahwa peran pemerintah secara umum terdiri dari peran minimal, peran antara, dan peran aktif yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Peran Pemerintah

	Menanggulangi Kegagalan Pasar	Meningkatkan Pemerataan
Peran Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan barang-barang publik 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Manajemen ekonomi makro 5. Penyediaan fasilitas kesehatan public 	<p>Melindungi si miskin: Program pengentasan kemiskinan Bantuan Bencana</p>

	Menanggulangi Kegagalan Pasar	Meningkatkan Pemerataan
Peran Antara	Menanggulangi eksternalitas: 1. Pendidikan dasar 2. Perlindungan lingkungan	Menyediakan asuransi Sosial: Pemerataan pensiun Dana pensiun Tunjangan pengangguran
	Mengatur monopoli: 1. Peraturan jasa umum 2. Kebijakan anti monopoli	
	Mengatasi informasi yang tidak sempurna: 1. Asuransi (kesehatan, jiwa, pensiun) 2. Peraturan keuangan 3. Perlindungan konsumen	
Peran Aktif	Mengkoordinasi kegiatan swasta: 1. Mendukung fungsi pasar 2. Memberikan inisiatif	Retribusi Aset

Sumber: World Bank (1997)

Bedasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah tidak hanya ditujukan pada pemenuhan aspek kebutuhan dasar masyarakat, namun pemerintah juga berperan dalam penanganan isu kemiskinan, kesehatan dan pemerataan perekonomian. Hal ini dikarenakan dalam konteks otonomi daerah pemerintah khususnya pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatasi isu-isu yang berkenaan dengan permasalahan masyarakat yang mendasar, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini pemerintah daerah tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat yang mana akan mempermudah dalam mengurus urusan pemerintah daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.

Peran pemerintah yang begitu kompleks menjadikan dasar pembentukan sebuah pemerintahan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pemerintahan sebelumnya yang masih



terpusat diatur langsung dari pemerintah pusat sudah tidak efisien lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Pemerintahan harusnya sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka dari itu terbentuklah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Asas-asas otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah memiliki asas-asas yaitu:

1. Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara pemerintahan pusat.
2. Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.
4. Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut sertadalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan tertentu di daerahnya sendiri sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat.



Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk memajukan daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah adalah mengatur dan melindungi masyarakat serta sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dengan tetap mengikuti syarat dari pemerintah pusat.

B. Administrasi Pembangunan

1. Administrasi Publik

Administrasi publik sejatinya sudah ada sejak dulu ketika terdapat pembagian status antara pemerintah dengan yang diperintah, apapun bentuknya.

Karena dalam proses memerintah dan melayani masyarakat pastinya dibutuhkan sistem administrasi atau manajemen yang kompleks. Meskipun begitu, ilmu ini baru mulai diajarkan di Universitas di Indonesia pada tahun 1950'an. Literatur kuno administrasi negara dapat dilihat dalam buku pemikiran Confucius, Plato, Machiavelli, De Montesquieu, Roessau, Bonnin, Hegel, Vievin, John Stuart Mill. Tulisan tersebut telah membuktikan bahwa ternyata administrasi publik sudah sering dibicarakan sebelum berdirinya administrasi publik yang diprakarsai oleh Wodrow Wilson.

Sampai saat ini terjadi beberapa kali pergeseran paradigma Administrasi Publik. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Menurut Nicholas Henry, terdapat 5 paradigma, yaitu :



1. Paradigma 1 (1900-1926) adalah “dikotomi politik-administrasi negara”.

Tokoh yang memperkenalkan adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam “Politics and Administration” berkata bahwa politik sebagai pembuat kebijakan sedangkan administrasi negara adalah pelaksana kebijakan. Administrasi negara harus bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan.

2. Paradigma 2 (1927-1937) disebut “Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara”. Tokoh yang terkait adalah Willoughby, Gullick & Urwick yang dipengaruhi pemikiran Fayol dan Taylor. Prinsip yang diperkenalkan adalah POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

3. Paradigma 3 (1950-1970) adalah “Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik”. Menurut John Gauss, teori administrasi negara adalah teori politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan.

4. Paradigma 4 (1956-1970) berkembang pemikiran “Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi”. Prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Namun lokusnya kurang jelas.

5. Paradigma 5 (1970-sekarang) adalah “Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik”. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik.



Gerald E. Caiden menyatakan aliran administrasi publik dibagi menjadi

aliran proses administratif (aliran empiris, aliran pengambilan keputusan, aliran matematik) dan aliran administrasi yang holistik (aliran perilaku manusia, aliran analisis birokrasi, aliran sistem sosial, dan aliran integratif).

Administrasi publik menurut Keban (2014) memiliki enam dimensi yaitu:

“Dimensi “kebijakan” (respon secara benar terhadap kebutuhan masyarakat dalam membuat kebijakan), “organisasi” (pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab termasuk perilakunya sesuai dengan kondisi), “manajemen” (faktor internal dan eksternal), “moral dan etika” (agar kewenangan tidak disalahgunakan untuk kepentingan diluar kepentingan publik), “lingkungan” (mengenal karakteristik tempat administrasi publik beroperasi) , dan “akuntabilitas kerja” (janji kepada publik yang harus dipenuhi).”

Administrasi Publik berperan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu Negara. Karena kegiatan administrasi publik pada dasarnya adalah kegiatan pelayanan masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, ketertiban, perijinan, hukum, ekonomi, dsb. Secara khusus administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Kegiatan ini dilakukan baik oleh pejabat struktural (pemegang eselon) sampai pejabat non struktural yang tidak memimpin suatu unit. Tujuan dari kegiatan administrasi publik adalah untuk memenuhi kepentingan publik, apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat umum.

2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan dalam perkembangannya dari disiplin ilmu yang mendahului yaitu administrasi publik atau administrasi negara. Administrasi negara telah berkembang dan menghasilkan paradigma ilmu baru yaitu

administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan lebih berorientasi untuk mendorong perubahan di masa depan berbanding terbalik dengan administrasi negara yang hanya berorientasi pada masa kini. Ada beberapa ciri yang membedakan administrasi negara atau publik dengan administrasi pembangunan berikut: (Tjokroamidjojo, 1987:9)

Tabel 2. Ciri-Ciri Pembeda Administrasi Publik dengan Administrasi Pembangunan

Ciri Administrasi Negara	Ciri Administrasi Pembangunan
1. Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat Negara maju.	1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda, terutama bagi lingkungan masyarakat Negara baru berkembang.
2. Masih netral terhadap tujuan pembangunan.	2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, bahkan ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat.
3. Lebih menekankan pada orientasi masa kini.	3. Berorientasi untuk mendorong perubahan, atau berorientasi masa depan.
4. Menekankan pada tugas umum dalam rangka pelayanan masyarakat, lebih bersikap sebagai “ <i>balancing agent</i> ”.	4. Berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah, kemampuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan pelaksanaan yang efektif.
5. Lebih melihat dari keteraturan dari aparatur administrasi itu sendiri.	5. Meningkatkan diri dengan substansi prtumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan pembangunan di berbagai bidang
6. Seakan menempatkan administrator dalam aparatur pelaksana pemerintah.	6. Administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan agen penggerak perubahan.
7. Pendekatan legalitas.	7. Pendekatan lingkungan, berorientasi kepada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah.

Sumber: *Pengantar Administrasi Pembangunan (1987:9)*

Perbedaan administrasi negara atau publik dengan administrasi pembangunan dijelaskan bahwa administrasi pembangunan merupakan

perkembangan di administrasi negara. Administrasi negara yang lebih memerhatikan negara maju namun administrasi lebih menekankan kepada masyarakat yang berbeda terutama masyarakat di negara berkembang. Perkembangan dunia mengakibatkan sebuah ilmu atau konsep memaksa harus ikut berubah, dimana konsep administrasi publik yang dipikir masih belum cukup untuk masyarakat maka munculah paradigma baru yaitu administrasi pembangunan yang merupakan perkembangan dari administrasi publik.

Administrasi pembangunan berorientasi proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan yang lebih mengarah ke pertumbuhan yang lebih baik. Proses yang dilakukan haruslah sesuai dengan peraturan dan konsep pembangunan yang ada. Siagian (2012:5) mendefinikan administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangkaian pencapaian tujuan akhirnya. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses dan usaha pemerintahan suatu negara untuk berkembang ke arah yang lebih baik demi mensejahterahkan masyarakat di negara tersebut.

3. Pengertian Perencanaan Pembangunan

1) Perencanaan

Dalam mencapai tujuan di suatu organisasi perlu adanya suatu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan sebelum kegiatan pokok dilakukan. Perencanaan dilaksanakan karena keterbatasan sumber



daya dan sumber dana yang tersedia, sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan.

Menurut Tjokroamidjojo (1984:12) perencanaan didefinisikan sebagai;

Suatu proses menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan sumberdaya (termasuk sumberdaya ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Dalam perencanaan lebih baik mengedepankan keadaan masyarakat yang ada agar tercapainya tujuan mensejahterahkan masyarakat. Menurut Syamsi (1986:134) perencanaan yang baik dan lengkap haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Apa (*What,*) yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan;
- b. Mengapa (*Why*), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan;
- c. Bagaimana dan Berapa (*How and How much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan, dan dengan dana yang tersedia harus dipertimbangkan;
- d. Dimana (*Where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek);
- e. Kapan (*When*), yaitu pemilihan waktu (*timing*) yang tepat dalam pelaksanaannya;
- f. Siapa (*Who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut (subyek pelaksana).

Dari pengertian perencanaan dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan analisis atau merumuskan suatu kegiatan yang akan terjadi dan dilakukan di masa depan berdasarkan asumsi yang matang dari beberapa fakta yang terbukti dan akurat akan terbukti kebenarannya untuk mencapai tujuan tertentu.

2) Pembangunan

Suryono (2010:1) menyatakan bahwa pembangunan berasal dari kata

“bangun” yang berarti sadar, siuan, bangkit, berdiri, dan juga berarti bentuk.

Pembangunan merupakan kegiatan yang biasanya berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur. Sedangkan menurut Sukirno (1995:13) dalam pengertian

ekonomi murni, pembangunan merupakan suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Menurut

Rogers dalam Suryono (2010:3) menyatakan bahwa:

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan, dan berbagai masalah kehidupan lain).

Tujuan mempelajari teori pembangunan sebagai program studi menurut (Suryono 2010:77) secara umum adalah:

- a. Menganalisis kelayakan teori-teori pembangunan yang berkembang selama ini dengan perubahanyang terjadi di masyarakat kontemporer (*theorritical adequacy*)
- b. Membandingkan antara teori dengan kenyataan fakta dan data dilapangan (*empirical validity*)
- c. Menganalisis konsistensi dan relevansi teori dengan kebijakan (*policy effectiveness*)
- d. Menjelaskan dan membuktikan seberapa kuat pengaruh teori terhadap metodologi penelitian (*methodological soundness*)
- e. Sebagai landasan kritik teori dan debat teori (*critical theory*)

Teori pembangunan seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dapat digunakan sebagai analisa kelayakan pembangunanyang berkembang pada

dewasa ini, pembanding antar teori yang lain, relevansi teori dengan kebijakan yang ada, pembuktian teori dalam petodologi penelitian, dan memberikan kritik

dan debat antar teori yang bersangkutan.



Secara khusus tujuan teori pembangunan menurut Suryono (2010:78) selanjutnya antara lain:

- a. Memperkenalkan beberapa teori tentang proses terjadinya *under development* di Negara yang sedang berkembang atau Negara yang sedang membangun
- b. Memperkenalkan beberapa teori tentang bagaimana merubah keadaan *under development* menjadi negaradan masyarakat yang *developed* (maju)
- c. Mengaitkan kajian-kajian teori tersebut dengan fenomena pembangunan yang terjadi.

Di Indonesia sendiri perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bahwa untuk menjadim pembangunan berjalan efisien, dan efektif maka diperlukan Perencanan Pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam perencanaan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah untuk mendapatkan kemajuan yang baik secara sosial maupun material serta untuk mensjehaterahkan masyarakat.

C. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut Sulistyani (2004:7) maka menjelaskan pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, dan proses pemberian daya, kekuatan dan kekuatan dari pihak yang dimiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Menurut shardlow (1998) yang dikutip oleh Rukminto Adi (2008:78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan Kartasamita (1996:45) menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "*people centered, participatory, empowering, and suitable*". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) atau menyediakan mekanisme mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative-alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu.

Selain berbagai pendapat diatas, Sumodiningrat (1999:32) menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat yang senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memperdayakan. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk mengubah masyarakat atau memberikan daya, kekuatan, ataupun kemampuan yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dan masyarakat menjadi lebih mandiri dalam berbagai aspek.

2. Tujuan Pemberdayaan

Suatu pemberdayaan (*empowerment*) menurut Payne (1997) yang dikutip oleh Rukminto Adi (2008:77) pada intinya, ditujukan guna:

“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients (membantu klien yang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terikat dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Hal ini sesuai dengan Mardikanto dan Sebianto (2012:29) yang menjelaskan bahwasannya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakanga. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan hal tersebut Mardikanto dan Soebianto (2012:111) memaparkan tujuan pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan yakni:

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- b. Perbaikan aksesibilitas artinya dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan artinya dengan berbekal kebaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan artinya dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- e. Perbaikan usaha artinya dengan perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan artinya dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapat keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan artinya dengan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- h. Perbaikan kehidupan artinya dengan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat dimana keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.



3. Proses Pemberdayaan

Kartasasmita (1996: 23) menatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: pertama: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Tjokrowinoto (2001:32) menyatakan bahwasannya meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses pemberdayaan, namun dalam implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap “pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul.

Pranarka & Vidhyandika (1996:45) menjelaskan mengenai proses pemberdayaan yaitu ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang mene-kankan pada proses memberikan atau

mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Adapun ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan, (2) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (5) bertanggungjawab atas tindakannya.

4. Manfaat Pemberdayaan

Adanya pemberdayaan dapat membuat masyarakat menjadi daya dan melatih kreatifitas sendiri. Jika masyarakat sudah bisa berdaya maka kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera. Menurut Kartasmita dalam Anwa (2007) mengemukakan bahwa proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan berbagai pendekatan salah satunya adalah pemberdayaan. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu manfaat pemberdayaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini juga diungkapkan oleh Abubakar dkk (2009) menyatakan bahwa:

“proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk dinas atau instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, proses

pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya terhadap instansi-instansi pemberi pelayanan.”

Pemberdayaan membuat masyarakat mandiri dalam kemampuan untuk melakukan pekerjaannya setiap hari. Dengan membentuk masyarakat yang mandiri agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sulistiyani (2004) mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah mandiri dalam kemampuan berpikir untuk mengatasi semua masalah yang ada. Dari pengertian di atas manfaat pemberdayaan adalah agar masyarakat mandiri dan sejahtera.

5. Tahapan pemberdayaan

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap kesadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
 - b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

Menurut Hogan dalam Adi (2008) pemberdayaan memiliki lima tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan;
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak pemberdayaan;
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek;

4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan; dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan implementasikannya.

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat yaitu :

“*Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi”

6. Hambatan pemberdayaan

Hambatan pemberdayaan menurut Adi (2008) mengungkapkan bahwa hambatan pemberdayaan yang sering muncul adalah sulitnya untuk menunergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program terpadu. Keinginan masyarakat yang berbeda-beda membuat kesulitan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat yang terpadu. Keinginan masyarakat yang berbeda membuat kesulitan menjadikan program pemberdayaan yang terpadu.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008) mengemukakan bahwa:



“Pengembangan masyarakat satu dimensi sudah pasti akan gagal karena didasarkan pada pemikiran linear bukan mengambil pendekatan holistic yang mendasarkan pada perspektif ekologis, dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia dan pengalaman masyarakat.”

Dari pengertian di atas mengungkapkan bahwa program pemberdayaan tidaklah haruslah terpadu, tetapi pilih apa yang paling dibutuhkan masyarakat.

Tidak ada alasan berbagai tindakan masyarakat haruslah disnergiskan. Namun, pengertian terpadu maksudnya berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan tidaklah dilakukan secara serentak. Pemberdayaan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi.

Adi (2008) mengemukakan bahwa hambatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok dalam komunitas yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi.

Kelompok ini masih terbiasa dengan hal yang mereka lakukan dan belum mau berubah, karena takut jika berubah akan mengakibatkan kemunduran. Mereka berpikir bahwa kebiasaan lama tidaklah harus dirubah dan harus tetap dilaksanakan tak peduli perubahan jaman yang terjadi. Selain itu ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah dalam memberikan bantuan membuat semakin terhambatnya mengalami pemberdayaan.

7. Indikator keberhasilan Pemberdayaan

Indikator keberhasilan dalam suatu pemberdayaan ditentukan oleh beberapa hal. Menurut Suharto (2006) mengemukakan indikator pemberdayaan adalah :

1. Kebebasan mobilitas
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
3. Kemampuan membeli komoditas besar
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
6. Kesadaran hukum dan politik
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Menurut Sumodiningrat (1999) indikator keberhasilan dalam program-program pemberdayaan adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin ;
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dari kelompok, makin mudahnya permodalan kelompok, makin rapi sistem administrasi kelompok, serta semakin banyak interaksi dengan kelompok lain di masyarakat.

Dari penjabaran teori di atas dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya produktifitas masyarakat, serta berkurangnya kemiskinan yang ada di masyarakat untuk menuju kondisi masyarakat yang lebih baik.

C. Industri Kecil dan Menengah

1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan industri besar dan menengah di Indonesia sangat cepat sejak tahun 1970-an melampaui pertumbuhan industri kecil dan Rumah tangga. Meskipun demikian industri kecil dan Rumah tangga memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan jumlah perusahaan, dan menopang pendapatan rumah tangga. Menurut Disperindag bersama dengan Badan Pusat Statistik (2002) industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersil, yang mempunyai kekayaan paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar satu milyar atau kurang.

Industri kecil selama ini mengalami keaburan definisi dan batasan dikalangan masyarakat. Sementara acuan dan penggolongan yang biasanya dipakai adalah menekankan pada aspek jumlah tenaga kerja dan modal. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa industri kecil adalah usaha perseorangan atau rumah tangga maupun badan yang memiliki kerja antara 5 sampai 9 orang, mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan nilai penjualan pertahun Rp. 1 milyar atau kurang.

Saleh (1986) telah menjelaskan bahwa terdapat tiga industri kecil yaitu:

a. Industri lokal, yaitu kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas, sehingga pada umumnya mempergunakan sarana transportasi yang sederhana (misalnya: sepeda, gerobak, dan pikulan).

Adapun karena pemasaran hasil produknya ditangani sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.

b. Industri yang terkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari segi kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dari pada kategori yang pertama. Sehingga peranan atau pengumpulan menjadi cukup menonjol.

c. Industri mandiri yaitu kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah mempunyai kemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang canggih. Pasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dalam mengakomodasi berbagai aspek modernisasi dan sesungguhnya hanya dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor industri kecil.

Dengan adanya pengelompokan tersebut maka akan mudah mendeskripsikan perananan industri kecil. Pemantauan pengembangan industri juga harus diperhatikan untuk menciptakan kondisi industri yang kondusif berdasarkan klarifikasi dan tujuannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Industri kecil dan menengah merupakan suatu kegiatan usaha industri yang memiliki aset sampai dengan 5 milyar rupiah di luar tanah dan bangunan serta beromzet sampai dengan 25 milyar rupiah per tahun.

2. Pengembangan Industri Kecil Menengah

Industri kecil menengah perlu dikembangkan karena dinilai sektor terpenting untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi suatu daerah, yakni pengangguran dan kemandirian daerah dalam perkenomian. Oleh karena itu pengembangan industri kecil sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di daerah setempat. Menurut syarief (1991: 3) pengembangan industri kecil menengah meliputi:

a) Perangkat lunak meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Pembinaan usaha.
- 3) Bantuan promosi dagang.
- 4) Keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha.

b) Perangkat keras meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha kecil dan sentra-sentra industri kecil.
- 2) Bantuan langsung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan permodalan.

Pengembangan industri kecil baik lunak maupun keras diharapkan mampu memberikan dukungan bagi industri kecil di Indonesia. Pengembangan industri kecil menengah di Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan industri yang lebih besar dan berkembang pesat sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang lebih baik. Selain itu pengembangan industri kecil menengah di atas merupakan salah satu alternatif mengatasi permasalahan-permasalahan industri di Indonesia. Selain bentuk-bentuk pengembangan industri kecil menengah juga terdapat strategi pengembangan industri yang diharapkan memberi dukungan bagi industri kecil supaya lebih berkembang dan bisa bersaing serta dapat mewujudkan tujuan industri kecil menengah itu sendiri.

Dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan tahun 2011-2105 Kabupaten Banyuwangi ada beberapa sasaran yang salah satunya meningkatnya laju pertumbuhan yang memberikan nilai tambah dimana untuk mencapai keberhasilan tersebut harus mencapai sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas produk IKM
2. Pengembangan diversifikasi produk IKM
3. Pengembangan desain produk dan kemasan
4. Peningkatan teknologi bagi IKM
5. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri
6. Jumlah fasilitas dan pendamping untuk IKM
7. Cakupan pembinaan sentra IKM
8. Jumlah yang difasilitasi penerapan standarisasi
9. Jumlah yang difasilitasi perlindungan HKI

Strategi pengembangan industri kecil menengah menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan usaha lain. Hatten dalam Suseno T.W.dkk (2005), keunggulan kompetitif adalah aspek dari suatu usaha yang dilakukan secara lebih baik dibandingkan usaha lainnya. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif dalam pengembangan industri terdapat strategi yang perlu diperhatikan.

Sjaifudin (1995: 66-75), mengungkapkan bahwa strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil adalah:

1. Strategi peningkatan kemampuan *financial*

Berkembangnya beberapa model penguatan *financial* bagi usahawan kecil akhir-akhir ini telah menunjukkan telah semakin menguatnya

komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui penyertaan modal sementara.

2. Pengembangan pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi industri kecil. Terdapat tiga cara strategi pemasaran yaitu: a) meningkatkan akses usaha kecil pada pasar, caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak memberikan manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang-kadang juga modal; b) Proteksi pasar; c) Menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing, langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan antara lain penghapusan proteksi *infant industries* (industri kecil) mendorong terciptanya iklim persaingan dalam konteks ini fungsi control sangat diperlukan.

Dalam mewujudkan pengembangan IKM diperlukan peran pemerintah daerah didalamnya, oleh karena itu pengembangan IKM memerlukan adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengembangan IKM di daerahnya masing-masing. Adanya proteksi pasar terhadap IKM dan pelatihan di beberapa IKM serta membantu dalam memasarkan hasil dari IKM dengan harapan industri kecil menengah bisa cepat berkembang pesat dan dapat bersaing dengan pasar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiono (2007:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Melalui metode penelitian tersebut maka peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan secara holistic kepada aktor yang terlibat di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui peran dan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan industri di daerah tersebut, selanjutnya peneliti mengolah dengan mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi yang telah didapatkan kemudian mendeskripsikan dalam hasil laporan, sehingga hasil yang didapatkan menunjukkan alternatif pemecahan permasalahan yang dialami dengan peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi sehingga penelitian bisa lebih terarah dengan tujuan dan juga dapat menyaring data dan informasi. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Sugiono (2014:34) bahwa fokus penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan,

urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu.

Berdasarkan peran pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi maka peneliti menetapkan fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan Industri kecil dan Menengah sektor batik berdasarkan teori sjaifudin (1995) dilihat dari:

- a) Strategi Peningkatan Kemampuan *financial*;
- b) Pengembangan Pemasaran.

2) Faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik meliputi:

- a. Faktor Pendukung;
- b. Faktor penghambat.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana berlangsungnya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti diharapkan dapat mendapatkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, termasuk lokasi, lingkungan serta kegiatan yang berada didalamnya.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena Kabupaten banyuwangi karena usaha di sektor batik telah mengalami perkembangan jumlah unit. Selain itu pemerintah

daerah Kabupaten Banyuwangi juga gencar-gencarnya mempromosikan batik Banyuwangi. Namun ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha batik di Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menemukan dan mengetahui keadaan objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi;
2. Dinas perindustrian perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi;
3. Tempat-tempat pelaku sentra IKM sektor batik di Kabupaten Banyuwangi (Kecamatan Giri dan Kecamatan Kabat).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumberdata adalah sumber dimana data diperoleh. Sedangkan untuk jenis data dibedakan menjadi data primer dan data skunder. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau dari sumbernya. Data ini nantinya diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu:

- a. Ibu Trivina selaku pendamping diklinik UMKM Kab. Banyuwangi
- b. Bapak Trijoko selaku seksi bidang ILOMETA (Industri,Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan di Kabupaten Banyuwangi.



c. Perwakilan dari pelaku IKM batik adalah Godho batik di Kecamatan Giri, dan Batik Srikandi di Kecamatan Kabat.

2) Data Sekunder

Adalah data yang mendukung data primer, dapat berupa catatan-catatan resmi, makalah serta laporan atau dokumen, data internet, serta data pendukung lainnya. Data sekunder ini dapat diperoleh dari publikasi otentik, baik dari pemerintah maupun publikasi ilmiah.

Adapun batasan dari data sekunder tersebut adalah sepanjang mendukung isi dan pembahasan yang diperlukan dalam penelitian.

Data sekunder yang berupa dokumen, catatan arsip serta laporan-laporan resmi antara lain:

- a) Dokumen formal maupun non formal yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi
- b) Arsip-arsip, dan dokumen maupun laporan yang dapat mengukur keberhasilan pemberdayaan IKM sektor batik.
- c) Buku referensi, jurnal, artikel, maupun situs resmi yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Studi Pustaka, pengumpulan data dilengkapi dengan studi pustaka, berupa bahan-bahan dalam tulisan, buku, majalah, jurna, dokumen atau penjarangan data hasil penelitian.



2) Studi Lapangan, yaitu mengamati dan terjun ke lapangan untuk mengetahui pemberdayaan IKM sektor batik. Studi lapangan ini terdiri dari:

a) Observasi, pengumpulan data dengan cara mengamati langsung masalah dengan menggunakan indra penglihatan dari peneliti. Observasi ini dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam aktivitas masyarakat untuk mendapatkan data akurat tentang pemberdayaan IKM sektor batik di Kabupaten Banyuwangi.

b) Wawancara mendalam, wawancara dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan keterangan lisan, wawancara bertanya langsung kepada informan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran informan, serta mampu untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang diamati oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan cara mendalam kepada informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan alat perekam.

c) Dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau konsep berupa catatan buku, majalah dan sebagainya yang terkait dengan tema pemberdayaan IKM sektor batik.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Peneliti sendiri, peneliti sebagai instrument pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena obyek yang terjadi dengan dibekali

pengetahuan serta penguasaan terhadap permasalahan yang ingin diteliti.

- 2) Pedoman wawancara (*interview guide*), instrument ini dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
- 3) Catatan lapangan (*field note*) yaitu berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi utama selama peneliti melakukan observasi. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *tape recorder* agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

G. Analisis Data

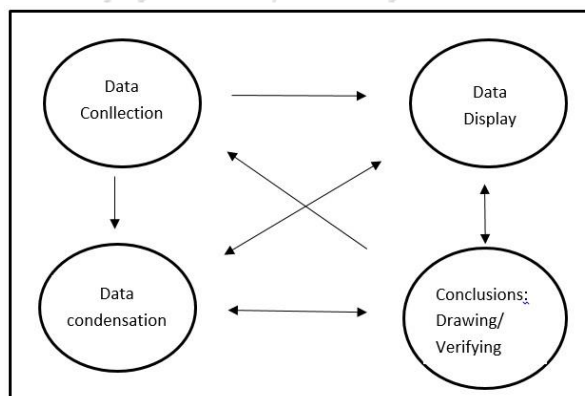
Menurut Sugiyono (2008:91) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih berarti dan dapat diinterpretasikan. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka peneliti menganalisis data maka peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka diadakan

penyusunan, pengolahan, dan interpresentasi data dan diambil kesimpulan sementara.

from the start of data collections, the qualitatife analyze interpret what thing mean by nothing pattern, explanation, causal flows, and positions. The competent researcher hold these conclusions lightly, maintaining opens and skepticism, but the conclusions are still there, vague at first, then increasingly explicit and grounded "final" conclusion may not appear until data collection is over, depending on the size of the corpus of field notes, the coding storage, and retrival method used, the sophistication of the researcher: and any necessary deadlines to be met. (dari mulai koleksi data, analisi kualitatif menafsirkan apa yang dimaksud dengan pola mencatat, menjelaskan, grafik, dan proporsi. Peneliti yang kompeten menganggap bahwa kesimpulan ini ringan, menjaga keterbukaan dan skeptis, tetapi kesimpulan masih ada, tidak jelas pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan beralasan. Pada akhirnya kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada bahan dari catatan lapangan, penyimpanan pengkodean, dan metode pengambilan digunakan, kecanggihan peneliti: dan batas waktu yang diperlukan harus terpenuhi).

Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan, kemudian memilih data yang diperlukan, setelah itu data disajikan dalam pembahasan. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi dari data-data yang telah dikumpulkan.



Gambar 1: Model Analisis Data Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis daa model Miles, Huberman dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berangsur secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data yang didapat semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui kondensasi data. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2013:11) kondensasi data mencakup pengertian

“The process of selecting, simplify, abstracting, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcript, document, and other emperial materials.”

“kondensasi mengacu pada proses penyeleksian, memfokuskan, menyederhanakan, dan abstraksi data yang telah diperoleh melalui catatan yang diperoleh dari lapangan, wawancara dengan narasumber, dokumen dan lain-lain.”

Dengan demikian kondensasi data ini dilakukan secara terus-menerus oleh peneliti, hingga peneliti benar-benar mendapat data yang kuat dan terfokus sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya setelah kondensasi data adalah penyajian data.

Menurut Sugiyono (2008:95) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Selanjutnya Miles, dkk (2013:12) menyatakan

“Data display is an organized, compressed assembly of information that allows concluding drawing and action.”

“penyajian data adalah proses perorganisasian data, meringkas data terkumpul dari infoemasi yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.”

Dengan penyajian data, maka akan mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan dalam penyajian data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*. Peneliti melakukan panyajian data dalam bentuk laporan. Penyajian data bersumber dari situs dan lokasi penelitian disajikan sesuai dengan format yang telah buat oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak terutama mahasiswa. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi dan diinterpresentasikan oleh peneliti juga dihubungkan dengan focus penelitian sehingga menjadikan laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

a) Gambaran Geografis Banyuwangi



Gambar 2. Peta Kabupaten Banyuwangi

Sumber : RENSTRA DISPERINDTAM Kabupaten Banyuwangi 2016-2020

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 Km². Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunandengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas

sekitar 127.454,22ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 13 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa.

Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa kegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 70° 43' - 80° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur.

b) Pembagian Wilayah Administratif

Luas Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 Km^2 , dengan pembagian wilayah 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Berikut adalah nama-nama kecamatan di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 4. Nama Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Pesanggaran	13	Srono
2	Siliragung	14	Rogojampi
3	Bangorejo	15	Kabar
4	Purwoharjo	16	Singojuruh
5	Tegaldlimo	17	Sempu
6	Muncar	18	Songgon
7	Cluring	19	Glagah
8	Gambiran	20	Licin
9	Tegalsari	21	Banyuwangi
10	Glenmore	22	Giri
11	Kalibaru	23	Kalipuro
12	Genteng	24	Wongsorejo

Sumber: data sekunder diolah penulis 2016

c) Keadaan Penduduk

Hasil registrasi penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2-14 sebesar 1.588.082 jiwa yang terdiri dari 789.924 penduduk laki-laki dan 798.158 penduduk perempuan. Dengan begitu tahun 2014 jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dari jumlah penduduk laki-laki. Berikut tabel tentang jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi tahun 2014:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pesanggaran	25.743	25.424	51.167
Siliragung	23.866	23.037	46.903
Bangorejo	32.047	31.120	63.167
Purwoharjo	34.310	33.777	66.751
Tegaldlimo	33.723	33.028	66.751
Muncar	67.508	65.501	133.009
Cluring	38.890	38.173	77.063
Gambiran	32.663	32.310	64.973
Tegalsari	24.828	24.274	49.102
Glenmore	37.571	37.631	75.202
Kalibaru	32.073	32.179	64.252

Genteng	45.086	44.352	89.438
Srono	47.892	46.679	94.571
Rogojampi	48.727	49.136	97.863
Kabat	36.707	36.218	72.925
Singojuruh	26.012	26.036	52.048
Sempu	40.793	39.961	80.754
Songgon	28.465	28.274	56.739
Glagah	17.326	17.691	35.017
Licin	14.205	14.033	28.238
Banyuwangi	57.076	58.132	115.208
Giri	14.698	14.793	29.491
Kalipuro	39.878	39.465	79.343
Wongsorejo	38.769	38.358	77.127
Jumlah	838.856	829.582	1.668.438

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2015

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi berdiri pada tanggal 5 September 2011 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 48 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan. Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan dalam melaksanakan tugas dituntut melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (DISPERINDAGTAM) Kabupaten Banyuwangi menerapkan visi

sebagai berikut “Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan berbasis pada paguyubanpotensi lokal sebagai penggerak perkenomian menuju masyarakat yang sejahtera”. Visi tersebut dapat diwujudkan dengan merumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas bagi organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat di daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

DISPERINDAGTAM Kabupaten Banyuwangi menerapkan misinya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peningkatan kemandirian dan daya saing usaha berbasis pendayagunaan potensi lokal.
- 2) Mewujudkan peningkatan iklim usaha yang kondusif, tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- 3) Mewujudkan penataan kawasan pertambangan, peningkatan nilai tambah hasil pertambangan, pemanfaatan air tanah dan pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan.
- 4) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan profesionalisme SDM aparatur.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat daerah yang baru perubahan dari Dinas Perindustrian dan, perdagangan Perdagangan dan Pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yaitu

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran pembangunan perindustrian, perdagangan dan pertambangan mengacu pada visi dan misi DISPERINDAGTAM yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2016-2021. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dan perdagangan yang berkualitas dan inklusif.

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut:

Sasaran :

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang berkualitas
- b. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

c. Menurunnya kesenjangan pendapatan industri kecil dan menengah antar wilayah

d. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik

Berikut adalah struktur organisasi DISPERINDAGTAM Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas;
 - b) Sekertariat;
 - c) Bidang Perindustrian;
 - d) Bidang Perdagangan;
 - e) Bidang standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - f) Bidang Pertambangan;
 - g) UPTD; dan
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekertariat membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
- 3) Bidang perindustrian membawahi:
 - a) Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan
 - b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil, dan Aneka
- 4) Bidang Perdagangan membawahi:
 - a) Seksi Perdagangan Dalam negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar negeri;
- 5) Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen membawahi:
 - a) Seksi Standarisasi dan HAKI;
 - b) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrlglogian.
- 6) Bidang Pertambangan mebahwahi:
 - a) Seksi Pertambangan Umum dan Energi;
 - b) Seksi Pengolahan Air Dalam Tanah.

Berdasarkan susunan di atas, bidang yang terkait dengan perkembangan usaha batik adalah bidang perindustrian pada sub bidang Industri Logam, Mesin,

Elektronika, Tekstil dan Aneka atau disingkat ILOMETA. Adapun tujan ILOMETA adalah sbeagai berikut:

- a. Menyusun rencana seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menyusun pedoman bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, dan proses produksi industri logam, elektronika, tekstil dan aneka;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan proses produksi industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- e. Melakukan kegiatan pendampingan terkait penguasaan manajerial usaha industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- f. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pemrosesan perizinan industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- g. Melakukan fasilitas pemberian modal penyertaan industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- h. Melakukan fasilitas kerjasama usaha dengan dunia usaha industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada daerah.

3. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah atau Diskop IKM Kabupaten Banyuwangi terletak di alamat JL. Laksana Adi Sucipto No.76 Banyuwangi. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupetan Banyuwangi memiliki Visi “terwujudnya badan usaha, koperasi dan UMKM yang mandiri, beradaya saing menuju kesejahteraan masyarakat Banyuwangi”. Visi dinas Koperasi dan UMKM di atas akan dijabarkan lagi menjadi beberapa misi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun kemandirian Koperasi melalui peningkatan dan pengembangan kualitas SDM pengelola badan usaha koperasi dan UMKM;
- b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, proses, standarisasi, teknologi, sarana dan prasaran usaha, permodalan, promosi, dan pemasaran serta kerjasama kemitraan badan usaha Koperasi dan UMKM dengan badan usaha lainnya;

- c. Memperluas pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan pendayagunaan kekuatan potensi-potensi koperasi dan UMKM untuk memberikan nilai tambah yang tinggi dengan tetap berwawasan lingkungan; dan
- d. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk kegiatan usaha koperasi dan UMKM guna memperlancar pergerakan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi dan UMKM, untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM diatur dalam peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Banyuwangi. Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari:
 - a) Kepala dinas;
 - b) Secretariat;
 - c) Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d) Bidang Usaha Koperasi;
 - e) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f) UPTD;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
 - a) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan usaha bagi UMKM
 - b) Penyelenggaraan promosi produk UMKM dengan sub kegiatan:
 1. Penyelenggaraan promosi produk UMKM di outlet Ketapang
 2. Fasilitas promosi produk UMKM
 3. Promosi produk UMKM di Smesco Jakarta

c) Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal sub kegiatan pengadaan aset tenda UMKM

3) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif IKM dengan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi telah mendirikan klinik UMKM.

Klinik koperasi dan UMKM didirikan merupakan salah satu upaya pemerintah

Kabupaten Banyuwangi untuk memberdayakan usaha lokal khususnya koperasi

dan UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Klinik koperasi dan UMKM memiliki

tugas fungsi yang sebagai berikut:

Tabel 6. Tugas Klinik UMKM dan Koperasi

No	Petugas Pelaksana	Tugas
1	Tugas Pendamping IKM pada Koperasi dan UMKM	Memberikan informasi promosi dan layanan konsultasi bisnis kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan UMKM;
2	Tugas Pendamping Informasi dan Teknologi pada Klinik Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginformasikan dan mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi dan informasi internet sehingga bisa diakses oleh dunia usaha; b. Melaporkan hasilnya setelah selesai kegiatan kepada pihak kesatu; dan c. Tugas-tugas lainnya yang berkaitan klinik Koperasi dan UMKM
3	Tugas Pendamping Koperasi pada Klinik Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan layanan konsultasi manajemen organisasi koperasi; b. Memberikan layanan konsultasi manajemen keuangan/akutansi koperasi; c. Memberikan layanan BinteK, Diklat dan pendampingan pada Koperasi; d. Memberikan layanan mediasi permasalahan Koperasi; e. Memberikan layana penyluhan perkoperasian; dan f. Memberikan layanan seminar perkoperasian.

No	Petugas Pelaksana	Tugas
4	Tugas Operator Klinik Koperasi dan UMKM	a. Mengolah data hasil kegiatan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KIKM); b. Menginformasikan produk-produk pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Internet; c. Mengakses informasi bisnis dunia usaha; dan d. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Klinik KIKM.
5	Tugas Pengemudi	Mengemudikan mobil Klinik Koperasi dan UMKM sesuai dengan jadwal kegiatan Klinik Koperasi dan UMKM keliling.

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi diolah (2016)

4. Gambaran Umum IKM Batik Banyuwangi

Potensi IKM di Kabupaten Banyuwangi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, mengingat IKM dalam pemasaran lokal maupun regional mampu menyerap banyak tenaga kerja. Industri Kecil dan Menengah mampu membawa pengaruh positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Banyuwangi hal tersebut ditunjukkan pada jumlah IKM maupun tenaga kerja yang terserap telah mengalami kenaikan di tahun 2016 dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, jumlah IKM pada tahun 2015 sebanyak 23.348 unit dan pada tahun 2016 sebesar 29.774 unit, sedangkan tenaga kerja sebanyak 40.117 orang pada tahun 2015 dan 66.338 orang pada tahun 2016. Peningkatan jumlah IKM dan tenaga kerja yang terserap menjadi bukti bahwa IKM di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan yang bagus. Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2014 hingga 2015 dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 7. Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Wongsorejo	311	323	1.156	1.171
2	Kalipuro	818	875	2.419	2.528
3	Licin	195	198	464	488
4	Glagah	342	352	1.445	1.556
5	Giri	111	113	384	385
6	Banyuwangi	642	691	2.286	2.407
7	Kabat	1.114	1.154	2.660	2.822
8	Rogojampi	2.345	2.371	7.684	7.707
9	Songgon	556	577	1.479	1.572
10	Sempu	938	985	1.854	1.861
11	Singojuruh	399	403	985	1.042
12	Srono	2.822	2.929	8.013	8.550
13	Cluring	450	484	1.346	1.350
14	Gambiran	516	537	2.154	2.169
15	Genteng	1.252	1.316	3.418	3.678
16	Glenmore	761	814	3.485	3.764
17	Kalibaru	330	338	1.118	1.202
18	Tegalsari	298	308	1.063	1.140
19	Muncar	1.602	1.615	9.829	9.937
20	Tegaldlimo	761	814	4.748	4.784
21	Purwoharjo	380	383	1.433	1.543
22	Bangorejo	339	344	839	852
23	Siliragung	493	512	1.131	1.189
24	Pesanggaran	488	551	1.909	1.974
Jumlah		18.305	18.987	63.302	65.635

Sumber: Dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi 2017

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah IKM dan tenaga kerja yang terserap di tahun 2016 mengalami peningkatan daripada tahun 2015. Peningkatan jumlah unit IKM di tiap tahun dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Potensi IKM di Kabupaten Banyuwangi layak mendapatkan perhatian yang lebih dalam pengembangan dan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar mempunyai daya saing.



Batik Banyuwangi merupakan hasil proses penurunan warisan keahlian dari

jaman kerajaan. Menurut pak TJK (L:48 tahun) selaku kepala bidang ILOMETA

di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perdagangan menyatakan bahwa:

“Ketika Kerajaan Blambangan sekarang Banyuwangi dikalahkan oleh oleh Mataram sekitar abad 15, banyak orang-orang sini dibawa ke sana untuk dijadikan pekerja salah satunya yaitu jadi tukang membatik terus mereka kembali lagi ke sini untuk mengajari mereka membatik.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Sehingga batik Banyuwangi merupakan warisan leluhur bangsa yang sampai saat ini dilestarikan oleh masyarakat dan harus didukung oleh pemerintah daerah setempat.

IKM batik Kabupaten Banyuwangi awalnya dulu pertama kali ada di kelurahan Temenggungan. Menurut pernyataan pak TJK (L:48 tahun) selaku kepala bidang ILOMETA di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perdagangan menyatakan bahwa :

“Batik awalnya dulu di Kelurahan Temenggungan yang mengawali persebaran industri batik di Banyuwangi, nah dari situ nanti tersebar lagi ke berbagai daerah di Banyuwangi, karena mereka para karyawan mulai buat batik sendiri di daerahnya masing-masing.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Pernyataan di atas ditambah oleh Ibu HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi menyatakan bahwa :

“Dulu saya karyawan di batik virdes, terus keluar sekitar setahun kemudian pinjam modal ke ibu saya untuk mendirikan batik sendiri, nah emang dulu di Temenggungan awalnya pengrajin batik di Banyuwangi mas.” (wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 12.00 di rumahnya)



Pengrajin batik awalnya ada di Kelurahan Temenggungan dan mulai tersebar di beberapa daerah Kabupaten Banyuwangi, karena banyak karyawan yang keluar untuk mendirikan batik sendiri.

Jumlah IKM batik di Banyuwangi mengalami peningkatan dikarenakan banyak karyawan yang membuat batiknya sendiri. Awalnya peningkatan jumlah IKM batik Banyuwangi hanya di Temenggungan, tetapi sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Banyuwangi. Persebaran jumlah IKM batik Banyuwangi dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 8. Potensi IKM batik

Kecamatan	Jumlah IKM batik	
	2015	2016
Cluring	3	5
Kabat	6	9
Banyuwangi	4	4
Licin	40	40
Rogojampi	3	3
Singojuruh	1	2
Siliragung	1	1
Kalipuro	7	9
Songgon	1	3
Glagah	1	3
Muncar	1	1
Giri	7	8
Sempu	7	8
Genteng	1	2
Jumlah	83	98

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan diolah oleh penulis 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah IKM batik beberapa daerah memiliki kenaikan di beberapa kecamatan. Data di atas menunjukkan kenaikan jumlah IKM dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kenaikan jumlah IKM batik di



Banyuwangi merata di beberap daerah. adanya kenaikan jumlah IKM membuat peneliti tertarik meneliti batik di Banyuwangi.

B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Pemberdayaan IKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IKM) sektor batik di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan jumlah unit usaha. Salah satu usaha pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan IKM batik adalah dengan mendirikan klinik Koperasi dan UMKM.

Klinik ini sama seperti dengan klinik kesehatan pada umumnya, yang mengobati orang sakit tetapi klinik UMKM bertujuan untuk membantu IKM yang sedang sakit, maka klinik UMKM bersedia membantu untuk memberikan pelayanannya.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping di klinik UMKM yang menyatakan bahwa:

“Klinik UMKM sendiri bertugas untuk mendata IKM mana saja yang sedang mengalami kesulitan dan kita bantu dengan memberikian sosialisasi, bahkan gak jarang mereka datang kesini untuk melakukan konsultasi tentang masalah yang terjadi. Yang banyak ya konsultasi tentang modal mas ya jadi kita bantu bagaimana caranya meminjam uang di bank tata caranya gimana gitu.”(wawancara dilakukan 20 Desember 2016 pada pukul 10.00 wib di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pernyataan tersebut ditambahi oleh HN (L:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi yang menyatakan bahwa:

“Mobil klinik UMKM biasanya datang seminggu sekali mas cuman data di kita apa yang kurang dan apa saja yang dibutuhkan, kita juga suka konsultasi ke sana.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember 2016 pukul 10.00 wib dirumahnya)



Gambar 4. Mobil Klinik UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM 2017

Dinas koperasi dan UMKM serta dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan sama-sama bekerja sama dalam memberdayakan IKM batik. Dinas perindustrian Perdagangan dan Pertambangan yang bertanggungjawab atas pemberdayaan IKM batik sesuai dengan Renja tahun 2016 salah satu isu yang diangkat adalah batik yang dijadikan OVOP (One Village One Product) Kabupaten Banyuwangi yang perlu ditingkatkan lagi dan dikembangkan baik secaraintensifikasi maupun ekstensifikasi. Isu yang diangkat dari Renja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan ini ditambahi dengan pernyataan dari TJK (L:48 tahun) selaku Seketariat bidang Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka yang menyatakan bahwa:

“Kalau pemberdayaan dari dinas sini untuk industri batik tiap tahun ada, tiap tahun tuh ada karena kita mengakses dari hasil musren ya musrenbangdes dan cam terus tingkat kabupaten mesti ada tiap tahun.”(wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 10.00 di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan).

Pernyataan diatas ditambahi oleh Tri (P:35 tahun) selaku pedanmping di klinik UMKM yang menyatakan bahwa:

“Kalo di sini kita sebagai Pembina mas dan bekerja sama di Dinas Perindustrian untuk masalah pemberdayaan batiknya kita serahkan pada



a) Strategi Peningkatan Kemampuan *financial*

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi mengalami perkembangan usahanya. Pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Pengembangan usaha merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan Daerah tersebut mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM di Kabupaten Banyuwangi.

Pengembangan usaha sektor batik salah satunya dengan cara pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk sektor batik. Kegiatan di pemberdayaan salah satunya adalah pelatihan untuk para pelaku batik dan sosialisasi penggunaan teknologi baru dalam batik. Pelatihan yang diadakan tiap tahun sekali sesuai permintaan para pengrajin batik melalui musrenbang. Melalui musrenbang keinginan pengrajin untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh TJK (L:48 tahun) di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan sebagai Seksi bidang ILOMETA (Industri, Logam, Tekstil dan Aneka) yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau pemberdayaan dari dinas sini untuk industri batik tiap tahun ada, tiap tahun tuh ada karena kita mengakses dari hasil musren ya musrenbangdes dan cam terus tingkat kabupaten mesti ada tiap tahun.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)



Kegiatan pemberdayaan IKM batik yang dilaksanakan terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan pemberdayaan bagi yang baru ikut pelatihan dan peningkatan kualitas. Kegiatan pemberdayaan untuk IKM batik yang masih baru dalam mengikuti pelatihan. Peningkatan kualitas kegiatan untuk IKM yang sudah mengikuti pelatihan tetapi akan ditingkatkan lagi kualitas dalam pengerjaan batik. Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah pewarnaan dan desainnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang industri Logam Mesin tekstil dan aneka di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan:

“Kegiatan pemberdayaan itu ada dua yaitu pelatihan dan peningkatan kualitas pelatihan itu mulai dari tingkat dasar sedangkan peningkatan kualitas berarti sudah pernah mengikuti kegiatan semula kita tingkatkan mungkin pewarnaannya ya mungkin desainnya.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Hal serupa juga diutarakan oleh TRI (P:35 tahun) selaku pendamping IKM di Klinik UMKM:

“Di IKM ada pelatihan dengan pelatihan membuat jadi pelaku IKM yang sudah ahli membuat kita melatih teman-teman ada dua pelatihannya yaitu melatih keahlian baru maupun yang sudah bisa membuat tapi belum membuat dengan benar kita melatihnya.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kemampuan para pengrajin batik. Tidak jarang pelatih yang diundang adalah pengrajin batik yang sudah maju batiknya seperti di daerah Pekalongan yang lebih maju dalam urusan batik. Hal itu disampaikan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik dari batik Srikandi mengatakan bahwa:

“ada pelatihan batik mas kegiatannya cara nyanting yang bagus cara mewarnai dari kain putih sampai sudah jadi batik itu mas dan juga



alami kemudian kami perbaiki di *painting* dan *design* sedangkan untuk canting listrik sudah kompor listrik juga sudah, dulu banyak yang pake kompor minyak tanah sekarang sudah listrik semuanya.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Pembaharuan teknologi batik seperti canting listrik dan kompor listrik sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Bapak Trijoko IKM sudah banyak menggunakan canting listrik untuk menggambar batik. Tetapi walau sudah menggunakan canting listrik pengrajin batik belum terbiasa dengan hal tersebut. Pengrajin batik banyak yang kembali lagi ke canting tradisional karena belum terbiasa dengan canting elektrik sehingga penggunaan canting elektrik lebih lama daripada canting tradisional. Hal itu telah disampaikan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik dari batik Srikandi mengatakan bahwa:

“arek-arek pernah make canting listrik tapi arek-arek gak begitu senang lebih suka canting biasa kelamaan katanya ma enak manual kalo sewaktu dibawa pelatihan enak mas makenya karena tidak biasa make canting listrik arek-arek mas.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Ibu Hani)

Hal yang berbeda dinyatakan oleh Fr (L:45 tahun) selaku pemilik Godho batik yang menyatakan bahwa :

“kita sekarang memakai canting elektrik soale gampang mas gawene cepet pisan ketimbang canting yang manual lebih cepetan gawe seng elektrik, jadi sekarang disini memakai canting elektrik biar lebih cepet batik.e.”(wawancara pada 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya)

Modal sangat dibutuhkan dalam pengembangan IKM. Modal digunakan untuk awal memulai usaha. IKM ketika akan melakukan usahanya membutuhkan modal agar usaha tersebut berjalan. Kebanyakan IKM yang sulit maju dikarenakan sulitnya mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya.



Modal diperlukan agar para pengrajin IKM dibantu dengan pengembangan usahanya.

IKM batik Kabupaten Banyuwangi dalam permodalan para pengrajin batik mencari modal sendiri. Para pelaku IKM mendapatkan modalnya secara mandiri dengan meminjam di bank. Pemerintah Banyuwangi hanya memfasilitasi atau membantu dalam pengurusan surat-menyurat untuk meminjam modal di bank. Pemerintah Banyuwangi khususnya klinik UMKM membantu dengan memberikan akses peminjaman modal. Seperti yang dikatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping di klinik UMKM mengatakan bahwa:

“Khusus dipermodalan bukan dinas koperasi dan UMKM memberikan modal tapi kita bantu biasanya IKM gak tau akses modal seperti apa terus bagaimana keperbankan nantinya kita fasilitasi pelayanan bukan memberikan modal, jadi termasuk dalam perijinannya biasanya IKM tidak tau atau belum tau biasanya pasih yang dibutuhkan dalam permodalan itu di dalam perijinannya maupun yang lain kita damping disitu ini dan prosesnya ini, jadi klinik UMKM sebagai layanan konsultasi.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal senada juga disampaikan oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang industri Logam Mesin tekstil dan aneka di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan menyatakan bahwa :

“Permodalan mandiri jadi pemerintah daerah dalam hal ini disperindag tidak memberikan modal tetapi memfasilitasi apabila dia untuk mendapatkan ijin dari perbankan kita memfasilitasi mungkin kalo dia membutuhkan surat keterangan dan sebagainya kita memfasilitasi tapi setelahnya kita serahkan pada perbankan.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Modal merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pelaku IKM. Tanpa modal IKM tidak akan berjalan semestinya. Modal juga awal dari produksi batik agar tetap berjalan dan tetap produksi seperti biasa. Awal produksi IKM akan



kekurangan dana dan mencari pinjaman dari bank. IKM ketika pemesanan batik

melebihi kemampuan modal untuk memproduksi maka IKM akan pinjam ke bank.

Hal itu telah dikatakan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi

menyatakan bahwa :

“gini mas karena biasanya pembatik itu kan ada modal usaha dipilahkan sendiri karena dulu seperti itu akhirnya kadang pinjam tapi ya kadang kurang karena pesannya banyak dan masih banyak batik yang belum jalan, produksi terus tapi masih kurang modal, kemarin saya baru pindah kesini jadi butuh modal lagi ini mau kredit lagi mas karena modal usaha tidak satu dua kalo satu sih bisa tapi nanti tidak bisa berkembang mas.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumahnya

Hal senada juga dinyatakan oleh Fr (L:48 tahun) selaku pemilik Godho

batik yang menyatakan bahwa:

“Biasanya pemesanan batik yang banyak kita kekurangan modal mas jadinya ya pinjem mas di bank, kayak sekarang ini ada pesanan yang banyak modale kene kurang ya kita pinjam di bank kurangnya berapa untuk pinjam syarat-syarat yang diperlukan kita penuhi kayak SIUP dan segala maceme kita penuhi dan baru bisa kita pinjam di bank, poko ke syarat-syarat yang diperlukan ada gampang nyilibe mas.”(wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya)

b) Pengembangan Pemasaran

Meningkatkan penjualan IKM salah satu strategi yang dilakukannya adalah

pemasaran. Adanya pemasaran dapat meningkatkan penjualan untuk IKM batik.

Pemerintah daerah bisa membantu pemasaran agar penjualan IKM meningkat,

karena adanya pemasaran yang tepat sasaran maka batik Banyuwangi akan

dikenal oleh masyarakat luas di luar Banyuwangi. Pemasaran yang tepat sasaran

juga dapat membantu pemesanan untuk IKM batik tidak hanya di dalam

Banyuwangi saja tetapi di luar Banyuwangi juga.



Pemerintah Banyuwangi telah menggunakan strategi dalam pemasaran untuk batik dengan cara mengikuti event-event di dalam maupun di luar daerah. Event di Kabupaten Banyuwangi sendiri yang menjadi ajang pemasaran untuk batik se-Kabupaten Banyuwangi adalah Batik Banyuwangi Festival atau disingkat BBF. BBF merupakan salah satu strategi pemasaran pemerintah daerah untuk batik Banyuwangi. BBF diadakan setiap setahun sekali sebagai ajang untuk pengrajin batik dalam memasarkan hasil karya mereka. Hal tersebut sesuai apa yang diucapkan oleh dengan TJK (L:48 tahun) dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan sebagai seksi bidang industri Logam Mesin tekstil dan aneka di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan yang menyatakan bahwa:

“Kalau kita membantu memfasilitasi ya memberikan ruang pameran kita ada ruang gedung untuk jualan dan pameran, pameran seperti pameran lokal, provinsi maupun nasional tiap tahun ada maupun promosi yang lain seperti kita fashion di Jakarta kita ambil desainer dan modeling terkenal untuk fashion di BBF salah satu promosi yang lainnya.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)



Gambar 6. Pagelaran Batik Banyuwangi festival (BBF)

Sumber: Dokumenter Penulis 2016

Adanya pameran batik salah satunya BBF berdampak pada terlahirnya inovasi baru dalam desain batik. BBF tiap tahunnya sudah berganti tema dan



menampilkan desain-desain IKM yang baru dan masih bagus. Terlahirnya desain

baru membuat orang akan penasaran dengan batik Banyuwangi yang beragam

desainnya. Hal itu dituturkan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping IKM di

Klinik UMKM mengatakan bahwa:

“Ketika ada event tersebut contoh BBF kita buat tema pemerintah membuat tema entah tahun ini temanya gajah oling tahun depan ganti lagi, nah itu disitu temen-temen IKM sudah membuat inovasi apasih tahun depan motifnya diangkat pasti disitu orang-orang maupun di instansi pemerintah maupun swasta pasti akan mencari motif batik itu karena sebagai ajang kepuasan sendiri, oh ya karena kalau tidak ada event seperti itu orang-orang akan berpikir untuk apa batik untuk apa kita beli batik.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Event BBF diharuskan diikuti oleh semua pengrajin batik karena ini adalah acara yang dikhususkan pengrajin batik Banyuwangi. Selain sebagai ajang

pembuktian desain batik yang terbaik juga sebagai ajang promosi untuk batik

Banyuwangi. Adanya BBF juga sebagai penyemangat untuk para pengrajin batik

agar bisa memenangkan event tersebut dan mempromosikan IKM batiknya. Hal

tersebut seperti dituturkan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi

Menyatakan bahwa:

“BBF diharuskan karenakan yang punya gawe orang Banyuwangi jadi pengrajin batik harus ikut mas, yang pertama inggih mempromosikan batiknya menampilkan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai faktor penambah semangat terkadang batik iku menang apik iki batike oh batik iku kalah batik iki elek padahal semua pembatik itu memaksimalkan desainnya ya menambahlah pemasaran jadi sangat ramai.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di Rumahnya)

Selain event Batik Banyuwangi Festival di Kabupaten Banyuwangi ada tempat untuk menampung hasil produksi IKM yaitu Banyuwangi mall.

Banyuwangi mall adalah tempat wadah bagi para pelaku IKM untuk menaruh

hasil produksinya tetapi harus memiliki ijin dari pihak Banyuwangi mall. Jika



IKM sudah memiliki ijin dan memenuhi syarat untuk menjual hasil produksinya

maka akan diberikan tempat di Banyuwangi mall. Klinik UMKM juga

memberikan pendampingan kepada IKM yang masih belum bisa memenuhi syarat

untuk menempati Banyuwangi mall tersebut. seperti yang dikatakan oleh Tri

(P:35 tahun) selaku pendamping IKM dari klinik UMKM yang menyatakan

bahwa:

“Kalau kendala dipemasaran kita kan punya Banyuwangi mall sudah tau kan nah jadi dia seller kita upgrade kalau sudah memenuhi standarnya Banyuwangi mall maka bisa bergabung , tetapi jika belum maka kami akan dampingi dan ikutkan ke beberapa pameran-pameran.” (wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal serupa dinyatakan oleh Frm (L:48 tahun) selaku pemilik Godho arum

batik yang menyatakan bahwa:

“Kita punya stand di Banyuwangi mall mas jadinya kita gak kesulitan untuk menjualkan batik-batik kita karena di Banyuwangi mall sudah ada standnya dan gak kesulitan untuk memasarkan batik kita yang penting syarat-syarat yang diperlukan untuk jualan di sana sudah cukup ya bisa jualan di sana. Kita juga ikut BBF mas kan wajib itu jadi biar tahu desain mana yang paling bagus diantara batik Banyuwangi.” (wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pada pukul 10.00 wib di rumahnya)

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IKM) dipengaruhi oleh

beberapa faktor baik yang sifatnya mendukung maupun yang sifatnya

menghambat. Adanya faktor tersebut secara langsung atau tidak langsung mampu

mempengaruhi perkembangan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi. Faktor

pendukung harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk

mencapai tujuan dalam pengembangan IKM, sedangkan faktor penghambat harus



membantu mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh IKM khususnya

IKM batik. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku

pendamping IKM dari klinik IKM yang menyatakan bahwa:

“Klinik UMKM itu berfokus pada permodalan, perizinan dan pemasaran, nah jadi ketika pelaku IKM sedang ada masalah atau informasi yang sekiranya merugikan mereka bisa konsultasi disini tugas klinik UMKM sebagai penyambung untuk diikutkan acara festival dan pameran.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal serupa dinyatakan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi

yang menyatakan bahwa:

“Kita kalau masalah perizinan sama surat-surat minta sama klinik UMKM dan mereka yang mengurusnya kita dibantu dalam mengurus surat-surat itu mas. Makanya kita kalau mau pinjem ya urus-urus suratnya disitu.” (wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumahnya)

Klinik UMKM selain sebagai tempat konsultasi, juga mengikutsertakan

beberapa IKM batik untuk mengikuti beberapa pameran untuk mengembangkan

IKM tersebut. Pameran yang dibicarakan bisa berasal dari dalam daerah maupun

di luar daerah, klinik UMKM akan mengikutkan para pelaku IKM agar dapat

mengikuti pameran. Klinik UMKM akan memeriksa apakah IKM yang akan

diikutkan merupakan hasil produksi sendiri atau mengambil dari luar daerah,

karena yang akan diambil untuk mengikuti pameran adalah hasil dari produksi

sendiri bukan menjual barang yang diambil dari luar.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain mengadakan dan

mengikutsertakan IKM batik ke pameran juga membuat batik Banyuwangi

sebagai *icon* Kabupaten Banyuwangi. Batik Banyuwangi digunakan seragam

untuk dinas dan sekolah di Banyuwangi. Dinas dan sekolah negeri di Kabupaten



Banyuwangi di hari tertentu memakai batik Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Tri (P:35 tahun) dari pendamping Klinik UMKM yang menyatakan bahwa:

“Setiap tahunnya diwajibkan menggunakan batik khas Banyuwangi untuk pemerintah daerah pun batik sebagai ikon, digunakan untuk seragam jadi itu adalah bentuk pemberdayaan pemerintah terhadap pelaku IKM batik bayangkan aja kalo satu orang kita kan menggunakan batik hari senin kalau di bulan desember hari senin rabu kamis jum’at sebelumnya itu menggunakan hari rabu-jum’at sabtu satu orang aja gak mungkin punya satu batik pasti lebih dari satu nah itu dalam bentuk pemberdayaannya.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal serupa dinyatakan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik Batik Srikandi yang menyatakan bahwa:

“Dari pemerintah biasanya dipesenin batik mas untuk rumah sakit dan sekolah-sekolah katanya. Nah dari situ kita dapat penghasilan tambahan mas kan biasanya di sekolah-sekolah kalo pas masuk arek anyar pesen batik dibuat seragam sekolah mas.(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Ibu Hani)

Hal berbeda dinyatakan oleh Bapak Frm (L:48 tahun) pemilik Godho arum batik yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah ya mas ambil batiknya ya yang bagus dan yang maju saja mas, jadinya beberapa batik yang baru dan belum tahu apa-apa ya hanya bisa berusaha sendiri di kita sendiri belum pernah pemerintah ambilnya jadi kita berusaha sendiri mas, kalo pemerintah gak ambil di kita ya gapapa kan masih banyak pembatik di Banyuwangi yang bagus-bagus.” (wawancara pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya)

Dari wawancara oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya klinik UMKM merupakan salah satu cara pemerintah daerah memberikan dukungan untuk IKM batik. Klinik UMKM yang berfungsi sebagai tempat konsultasi untuk IKM yang sedang butuh bantuan.



2) Penggunaan Teknologi yang Lebih Modern

Teknologi dalam produksi IKM sangatlah penting untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Teknologi modern jauh lebih menghemat waktu dan biaya daripada dengan teknologi tradisional. IKM di Banyuwangi masih banyak yang menggunakan teknologi tradisional. Pengembangan teknologi yang lebih modern dapat lebih mempercepat pengerjaan batik. Namun pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan teknologi pembuatan batik agar lebih modern dan mempermudah pembuatan batik Banyuwangi. Penggunaan teknologi seperti canting elektrik sudah mulai dipelajari oleh pelaku IKM. Seperti yang dikatakan oleh TJK (L:48 tahun) selaku sebid Industri logam Mesin dan aneka di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan menyatakan bahwa:

“Ya teknologi untuk batik sendiri seperti teknologi batik yang biasa saja tapi kita memberi sentuhan pada pewarnaan untuk menggunakan pewarnaan alami kemudian kami perbaiki di *painting* dan *design* sedangkan untuk canting listrik sudah kompor listrik juga sudah, dulu banyak yang pake kompor minyak tanah sekarang sudah listrik semuanya.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Hal serupa sesuai dengan yang dinyatakan oleh Frm (L:48 tahun) selaku pemilik batik Godho arum yang menyatakan bahwa:

“kita sekarang memakai canting elektrik soale gampang mas gawene cepet pisan ketimbang canting yang manual lebih cepetan gawe seng elektrik, jadi sekarang disini memakai canting elektrik biar lebih cepet batik.e.”(wawancara pada 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya).



Gambar 7. Pengrajin batik Banyuwangi menggunakan canting elektrik
Sumber: Dokumentasi penulis 2016

Pembaharuan teknologi batik seperti canting listrik dan kompor listrik sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Bapak Trijoko IKM sudah banyak menggunakan canting listrik untuk menggambar batik. Tetapi walau sudah menggunakan canting listrik pengrajin batik belum terbiasa dengan hal tersebut. Pengrajin batik banyak yang kembali lagi ke canting tradisional karena belum terbiasa dengan canting elektrik sehingga penggunaan canting elektrik lebih lama daripada canting tradisional. Hal itu telah disampaikan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik dari batik Srikandi mengatakan bahwa:

“arek-arek pernah make canting listrik tapi arek-arek gak begitu senang lebih suka canting biasa kelamaan katanya ma enak manual kalo sewaktu dibawa pelatihan enak mas makenya karena tidak biasa make canting listrik arek-arek mas.”(wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya)

Dari wawancara oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi modern seperti canting elektrik sudah digunakan oleh IKM di Banyuwangi. Ada beberapa yang masih belum terbiasa dikarenakan



penggunaannya lebih lama daripada canting tradisional. Pengrajin juga ada yang sudah bisa menggunakan karena penggunaannya lebih efisien.

3) Ketersediannya Bahan Baku

Proses produksi untuk IKM mudahnya mendapatkan bahan baku sangat berperan untuk cepatnya produksi. Jika mudah mendapatkan bahan baku maka produksi dalam pembuatan batik akan jauh lebih cepat. Bahan baku untuk batik sendiri dulu sangatlah sulit didapatkan, karena harus pesan langsung ke daerah lain seperti Pekalongan. Jauhnya mendapatkan bahan baku dan masih belum adanya agen khusus yang mendistribusikan bahan baku langsung ke Banyuwangi membuat proses produksi sangatlah lama. Seperti yang dinyatakan oleh TJK (L:48 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Bahan baku sarana untuk batik baik kain maupun pewarna masih beli di Jawa Tengah, Jogja dan Bali karena masih belum adanya agen khusus yang menjual bahan baku di Banyuwangi.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa untuk mendapatkan bahan baku produksi batik sangatlah sulit karena harus pesan dari luar daerah. Namun untuk sekarang untuk mendapatkan bahan baku tidaklah sulit karena sudah ada agen khusus yang menyediakan bahan baku batik. Warna Asri merupakan agen yang menjual khusus bahan baku batik yang didatangkan langsung dari Jawa Tengah Jogja dan Bali. Adanya agen khusus penjual bahan baku batik ini dapat meringankan kebutuhan akan bahan baku batik di Banyuwangi. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh HN (P:45) yang menyatakan bahwa:

“Bahan baku untuk sekarang mudah mendapatkannya ada yang sekarang di warna asri mulai dari pewarna samapi selengkapny kalau dulu kita pesan di Pekalongan sekarang tidak karena di sini sudah ada banyak pembatik maka



otomatis buka toko untuk pembatik di sini kan bisa jadi gak kesulitan.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember 2016 pukul 11.00 di Rumahnya)

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menghambat produksi hasil IKM akan menjadi lebih lama. Selain itu faktor penghambat mempengaruhi perkembangan IKM batik. Faktor penghambat sangatlah menurunkan produktifitas untuk batik. Pemerintah daerah haruslah mengurangi atau menanggulangi faktor penghambat agar tidak memperlambat perkembangan IKM batik di Banyuwangi. Faktor penghambat tersebut antara lain:

1) Kurangnya Inovasi dalam Desain Batik

Desain dalam batik sangat mempengaruhi peminat untuk membeli batik tersebut. Desain batik jika dibuat lebih menarik lagi maka banyak orang yang lebih tertarik dengan desain batik tersebut. Desain batik Banyuwangi masih desain yang hanya bersifat umum saja belum punya desain baru. Pengrajin batik di Banyuwangi masih belum bisa membuat desain baru. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku Pendamping IKM di Klinik UMKM yang menyatakan bahwa:

“IKM batik masih stagnan di situ saja mas, karena kreatifitas pengrajin batik itu dia kan harus tau caranya desain dengan benar, desain untuk lengan juga masih kesusahan para pembatik jadi para pelaku batik belum bisa desain hanya secara global saja, desain yang itu-itu saja.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pemerintah Banyuwangi berusaha untuk mengembangkan desain batiknya agar lebih menarik dan tidaklah terlihat umum. Setiap tahun pemerintah daerah mencoba memperbarui desain batik dengan cara mengikutkan pada lomba-lomba



dan pameran di luar daerah. Desain baru yang digunakan untuk mengikuti pameran

diharapkan masyarakat luar daerah lebih tertarik dengan batik Banyuwangi.

Seperti yang dinyatakan oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang Industri

Logam Tekstil dan Aneka di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

yang menyatakan bahwa :

“Kita akui desain para pembatik masih umum tapi rencana ke depan terus kita tingkatkan baik itu peningkatan kualitas diri desain batik sendiri maupun pemasarannya ke luar negeri pameran tiap tahun kita memperbaharui desain melalui lomba-lomba kita sekarang sedang mempersiapkan kurang lebih enam puluh desain baru motif batik jadi Banyuwangi melalui kegiatan tiap tahun ada baik pelajar mahasiswa maupun umum.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor (DISPERINDAGTAM))



Gambar 8 Desain Batik Banyuwangi

Sumber : Dokumentasi Penulis 2017

Pernyataan di atas ditambahkan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik

Srikandi menambahi dengan:

“Desain *digawe* batik masih sama mas desainnya dan masih belum dirubah untuk desain karena desainnya kata orang-orang yang beli bagus jadinya gak saya buat baru untuk desainnya mas.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Ibu Hani)

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Frm (48 tahun) selaku pemilik

batik Godho arum yang menyatakan bahwa:



“Kalo jualan batik mas lek desain kuwi harus diperbarui dan harus ada perubahan mas, agar orang yang mau membeli karena ada inovasi mas. Sebetule kita belajar desain dari pembatik daerah lain mas makanya kita tahu desain-desain baru. (wawancara tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Firman di kecamatan Giri).

2) Tenaga Kerja Produksi

Tenaga kerja untuk pembatik di Banyuwangi saat ini masih kekurangan tenaga kerja. Para pelaku usaha batik sedang kesusahan karena pesanan untuk batik sendiri dari pemerintah daerah yang banyak jadi kesusasahan memenuhi permintaan yang banyak. Maka dari itu tenaga kerja untuk produksi sangat dibutuhkan dan juga ketika musim hujan telah memperlambat pengeringan batik.

Lamanya waktu produksi dapat membuat pemasaran terhambat. Hal ini telah dinyatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping IKM di klinik UMKM yang mengatakan bahwa:

“Informasi yang saya tahu justru mereka sekarang kuwalahan untuk pemesanan batik karena pegawai dinas maupun instansi yang didukung pemerintah itu adalah kan gak mungkin beli seragam satu pasti kan bareng nah SDM yang ada di batik contohnya kalo dia batik tulis itu masih kesusasahan pembatiknya, bisa sanggup memenuhi tapi pengerjaannya lama terus dan mereka keluhannya masih pada ketika musim hujan seperti ini terus ketika barang dan produksinya setengah jadi masuk belum kering.”(wawancara dilakukan tanggal 20 Desember pukul 09.00 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pernyataan di atas telah ditambah oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang Industri Logam tekstil dan Aneka di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan yang menyatakan bahwa:

“Kita perlu tenaga pencanting untuk tahun ini karena tenaga kerja pencanting terutama sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemesanan yang tiap tahun meningkat, makanya tiap tahun kita menyetak tenaga kerja kalo itu sudah terwujud banyak mungkin persaingan harga akan ditekan dan batik Banyuwangi akan jadi lebih murah.”(wawancara



dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi yang menyatakan bahwa:

“Sekarang lagi kesusahan mas nyari pekerja buat pembatik. Ada sih mas beberapa tapi masih baru dan belum bisa membatik sama. Orang membatik kan harus telaten nah banyak pekerja yang belum telaten untuk membatik apalagi pembatik baru.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Ibu Hani)

Dari pernyataan di atas ditambahi oleh bapak Frm (L:48 tahun) selaku pemilik batik Godho arum yang menyatakan bahwa:

“Belajar batik kudu telaten mas dan sekarang lagi butuh-butuhnya pekerja mas tapi kalo gak telaten untuk belajar batik kita gak bisa ambil mas makanya kita selalu telat terus dalam menyelesaikan pesanan mas.”(wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumah Bapak firman di Kecamatan Giri)

Univ 3) Rendahnya Daya saing IKM Batik

Meningkatnya jumlah IKM batik di Banyuwangi akan menurunkan permintaan produk-produk di IKM tersebut. banyaknya jumlah IKM batik di Banyuwangi akan menyebabkan kemudahan dalam mendapatkan batik, dimana hal ini menjadi permasalahan karena apabila permintaan batik di pasaran lokal semakin menurun sedangkan jumlah IKM batik semakin bertambah maka IKM batik banyak yang mengalami kerugian. Kerugian tersebut karena modal yang digunakan untuk membiayai pekerja yang sudah terlanjur dikontrak menjadi pekerja tetap.

Produk batik Banyuwangi saat ini masih kalah pamor dengan batik di daerah Yogyakarta. Produk khas batik Banyuwangi dari segi harga masih sangat



jauh berbeda dengan batik khas Yogyakarta dan Madura. Menurut Tri (P:35

tahun) selaku pendamping di Klinik UMKM menyatakan bahwa:

“Dari harga untuk bersaing dengan daerah lain kita masih belum mampu dengan batik luar daerah seperti Yogya Madura. Itu dikarenakan gaji pekerjanya rata-rata jauh lebih murah dengan kita. di Madura saja cuman Rp20.000,-. Banyuwangi sendiri masih sangat sulit mendapatkan pekerja dengan bayaran seperti itu bahkan Rp50.000,- masih sulit makanya harga batik kita jauh lebih mahal.”(wawancara dilakukan tanggal 20 Desember pukul 09.00 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pernyataan diatas sesuai dengan yang dinyatakan oleh HN (P:45 tahun)

selaku pemilik batik Srikandi:

“Batik Banyuwangi dari kita walau sudah di pesan dari daerah lain tapi kita masih kalah dengan batik dari daerah lain semisal batik Yogja dan Pekalongan kan batik Banyuwangi masih baru jadi ya susah untuk saingan dengan batik daerah lain yang sudah terkenal apalagi harganya yang masih mahal.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Bu hani)

Hal tersebut ditambahi oleh Frm (L:48 tahun) selaku pemilik batik Godho

Arum menyatakan bahwa:

“Iya mas banyak yang pesen batik Banyuwangi di daerah lain tapi ya tapi kita masih kalah pamor sama batik Jogja dan batik Pekalongan. Batik kita kan masih baru-baru ini pamor mas jadinya ya masih sulit bersaing dengan batik lain.”(wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumah Bapak Firman di Kecamatan Giri).

C. Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data yang dikumpulkan dengan metode (observasi, wawancara, dan dokumentasi), data kemudiann dinalisis dan diinterpretasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini ditunjukkan untuk dapat menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi dalam upaya pemerintah daerah dalam program pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

Berikut ini analisis data yang dimaksud:



1. Analisis Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Program

Pemberdayaan IKM Batik di Banyuwangi

a) Strategi Peningkatan Kemampuan *Financial*

Menurut Mardikanto dan soebianto (2012) pemberdayaan memiliki beberapa tujuan perbaikan salah satunya adalah perbaikan usaha yang artinya dengan perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Teori di atas menjelaskan bahwa perbaikan usaha digunakan untuk memperbaiki pendidikan para pelaku IKM. Memperbaiki pendidikan adalah salah satunya dengan pelatihan terhadap pelaku IKM. Peneliti menemukan berfokus pada perbaikan usaha terhadap IKM batik yang mana batik Banyuwangi semakin berkembang tiap tahunnya.

Peneliti menemukan bahwa pelatihan untuk IKM batik di Banyuwangi dilakukan setiap setahun sekali. Pelatihan untuk IKM dilakukan karena masyarakat meminta pelatihan tersebut ketika adanya musrenbangdes khususnya para pengrajin batik meminta adanya pelatihan agar para pembatik lebih ahli lagi dalam membatik. Setiap tahun dari hasil musrenbang para pengrajin diberi pelatihan untuk membatik. Pelatih yang diundang oleh pemerintah biasanya pelatih dari luar daerah yang di daerah tersebut batiknya sudah berkembang dan terkenal salah satunya yaitu Purwakarta dan Solo. Pelatihan yang dilakukan oleh para pengrajin yang sudah berpengalaman dan tempat usaha batiknya sudah maju terlebih dahulu agar batik yang dihasilkan jauh lebih bagus.



Pengrajin batik yang sudah terampil dan dalam membuat juga jauh lebih baik dari sebelumnya, maka diharuskan untuk melatih pengrajin batik dari IKM lain untuk membuat. Pemerintah menyarankan agar para pembatik di Banyuwangi yang sudah dilatih oleh pembatik dari daerah lain agar melatih para pembatik di Banyuwangi yang belum bisa membuat dengan benar. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk para pembatik yang sudah terampil dan yang masih belum bisa membuat dengan benar. Perbaikan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Banyuwangi dengan memberikan pelatihan membuat untuk para pengrajin pembatik seharusnya bisa membuat kemampuan untuk membuat bisa meningkat dan memberikan dampak yang baik untuk IKM batik.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain dalam melakukan pelatihan untuk membuat, juga melatih dalam penggunaan teknologi terbaru untuk membuat seperti misalnya canting elektrik. Modernisasi untuk IKM batik diupayakan agar pengerjaan dalam membuat jauh lebih cepat dan efisien dalam waktu. Penggunaan teknologi baru dalam membuat seperti canting elektrik dapat mempermudah dan mempercepat membuat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus bisa melakukan sosialisasi untuk penggunaan canting elektrik ini. Masih ada beberapa IKM batik yang belum terbiasa dengan canting elektrik dikarenakan masih kurangnya latihan untuk penggunaan canting elektrik tersebut. Penggunaan canting elektrik dapat menghemat waktu, tapi karena masih menggunakan canting tradisional waktu yang dibutuhkan lebih lama. Para pengrajin batik mengaku masih lebih mudah menggunakan canting tradisional daripada canting elektrik karena hanya berlatih beberapa kali ketika pelatihan yang diadakan oleh

pemerintah Banyuwangi. Pengembangan teknologi untuk membuat yang seharusnya memberikan kemudahan dalam membuat

Permodalan merupakan masalah utama yang dihadapi kebanyakan IKM, menurut Tambunan (2002), permodalan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh IKM di Indonesia. Berdasarkan konsep di atas sesuai dengan keadaan IKM batik di Banyuwangi. Permodalan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh IKM batik di Banyuwangi. Kebanyakan pelaku IKM batik Banyuwangi dalam melakukan produksi kekurangan modal ketika jumlah pemesanan lebih banyak. Kurangnya modal dalam usaha batik untuk produksi membuat produksi batik akan terhambat. Terhambatnya produksi membuat pengembangan IKM juga terhambat.

Pelaku usaha batik dalam memproduksi batik membutuhkan modal yang tidak sedikit dan sering kekurangan modal ketika akan memproduksi. Pelaku usaha batik dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara meminjam modal ke bank. Pemerintah daerah dalam permodalan tidak memberikan bantuan secara langsung, melainkan membantu dengan cara memberikan sosialisasi kepada pelaku IKM tentang peminjaman bank serta membantu dalam kelengkapan surat untuk meminjam di bank. Pemerintah daerah telah menuntut pelaku IKM batik untuk mandiri dalam permodalan hanya bisa membantu dalam kelengkapan surat saja untuk mempelancar peminjaman modal di bank.

IKM batik Banyuwangi dituntut untuk mandiri akan modal, maka dari itu banyak IKM yang sudah mandiri dalam permasalahan modal. Menurut Purwanti (2012) dalam konsep indikator kemandirian IKM dari segi kemampuan modal



disebutkan bahwa, “pelaku IKM mandiri dari segi permodalan apabila mampu dalam ketersediaan modal usaha, mampu memenuhi syarat untuk modal usaha, mampu mengatasi permasalahan permodalan, dan mampu menyerap permodalan dari pihak luar.” Dari indikator di atas pelaku IKM batik Banyuwangi sudah memenuhi indikator yang ada di atas karena modal usaha untuk IKM batik merupakan modal sendiri dari pelaku IKM batik tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah untuk modal.

Kemandirian IKM dalam permasalahan modal dapat berdampak positif pada perkembangan IKM itu sendiri agar tidak selalu bergantung pada pemerintah daerah. Dengan adanya kemandirian akan modal maka akan dapat mengurangi ketergantungan pelaku IKM batik dengan pemerintah daerah. Klinik UMKM Banyuwangi harus tetap memperhatikan kebutuhan akan modal untuk perkembangan IKM dan membantu ketika kesulitan dalam mencari modal. Pelaku IKM batik juga harus sering mencari informasi dalam mendapatkan modal untuk produksi di klinik UMKM. Dengan demikian menurut analisis peneliti perlunya kerja sama antara pelaku IKM dengan instansi daerah setempat untuk mendapatkan modal dan perlunya kemudahan informasi yang jelas bagaimana mendapatkan modal tersebut.

b) Pengembangan Pemasaran

Konsep strategi pemberdayaan IKM, menurut sjaifudin (1995) dalam Firmansyah (2014) dijelaskan bahwa, dalam strategi pemberdayaan IKM terdapat dua strategi pemasaran. Kedua pemasaran tersebut yaitu yang *pertama* adalah meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar, dan yang *kedua* adalah proteksi

pasar dengan mengusahakan keberhasilan mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh usaha kecil.

Upaya pemerintah daerah Banyuwangi dalam memasarkan hasil produksi IKM batik sudah sesuai dengan strategi di atas. Akses untuk memasarkan hasil IKM batik pemerintah daerah Banyuwangi sudah melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya Banyuwangi Mall yang menjadi tempat untuk menjual hasil produksi IKM batik di Banyuwangi. Adanya Banyuwangi Mall mempermudah akses IKM batik untuk menjual hasil produksinya. Pemerintah Banyuwangi juga membantu IKM yang belum mendapatkan izin untuk memasarkan produknya dibantu perijinannya agar bisa lebih mudah dalam perijinannya.

Selain dengan adanya Banyuwangi Mall, IKM batik juga diikuti beberapa event-event pameran di daerah Banyuwangi maupun pameran yang ada di luar daerah. Salah satunya yaitu Batik Banyuwangi Festival yang diadakan di Kabupaten Banyuwangi. Event ini digunakan untuk ajang memerikan bagi pelaku IKM batik sekaligus memasarkan hasil desain produksinya. Event yang diadakan setahun sekali ini mendapat respon positif dari pelaku IKM batik yang berguna untuk memasarkan produksinya. Pelaku IKM batik diwajibkan mengikuti event ini karena event ini merupakan wadah promosi yang bagus dalam memasarkan produksinya. Hasil event BBF juga menjadi tolak ukur akan kemampuan desain IKM tersebut dan sebagai penyemangat untuk IKM batik agar bisa mendesain batik lebih bagus lagi.

Dari hasil penelitian selain melalui akses tempat pemasaran seperti Banyuwangi Mall dan event-event pameran batik, pemerintah Banyuwangi juga melakukan pemasaran dengan memakai produk-produk batik Banyuwangi hasil produksi IKM batik di Banyuwangi. Instansi-instansi daerah seperti rumah sakit, sekolah, dinas dan lain-lain telah menerapkan pemakaian batik hasil produksi IKM batik Banyuwangi di hari tertentu. Pemakain batik oleh instansi daerah dengan ini merupakan salah satu upaya daaerah Kabupaten Banyuwangi untuk mempromosikan batik Banyuwangi.

Pemasaran memang menjadi salah satu cara yang cepat untuk mengembangkan IKM batik. Pemasaran yang tepat sasaran akan keadaan dan kebutuhan IKM akan membuat perkembangan IKM jadi lebih baik. Pemasaran dapat meningkatkan permintaan batik Banyuwangi dan karena itu akan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah daerah dalam melakukan pemasaran dengan memberikan akses untuk memasarkan produk batiknya dan memakai hasil produksinya untuk meningkatkan penjualan serta merupakan salah satu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Memberikan akses untuk media pemasaran serta menggunakan barang hasil produksi IKM batik Banyuwangi merupakan cara pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan IKM batik dengan pemasaran. Upaya yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkkn IKM dengan melalui pemasaran sudah cukup baik. Akses pemasaran di Banyuwangi Mall sudah mempermudah untuk memasarkan barang produksi IKM batik dan adanya festival batik di dalam maupun di luar daerah mempermudah untuk memamerkan hasil

produksiya tersebut, penggunaan barang produksi IKM batik untuk instansi daerah merupakan juga salah satu cara pemasaran untuk IKM batik. Menggunakan barang hasil produksi IKM batik Banyuwangi dapat membantu memasarkan batik Banyuwangi yang sebagai ikon baju dinas di Banyuwangi.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pemberdayaan IKM Batik

a) Faktor Pendukung

1) Dukungan dari Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Dari isi undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah wajib membangun daerah karena adanya otonomi yang membebaskan para pemerintah mengeksplorasi sumber daya yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah Banyuwangi memberikan berbagai kebijakan untuk memajukan daerahnya khususnya di bidang IKM batik. Kebijakan oleh pemerintah daerah di bidang IKM batik cukup beragam salah satunya adalah Klinik UMKM. Klinik UMKM mengontrol dan memberikan arahan kepada IKM yang sakit untuk mengembangkan IKM. Bantuan dari klinik UMKM dapat membantu memajukan IKM tersebut. Klinik UMKM merupakan salah satu dukungan pemerintah daerah

Banyuwangi untuk memberdayakan IKM batik di Banyuwangi. Klinik UMKM mengurus semua perizinan, permodalan dan pemasaran untuk IKM.

Kuncoro (2014) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan si miskin namun pemerintah juga bisa saja mengambil peran aktif seperti mendorong kegiatan swasta dan retribusi aset. Adanya Klinik UMKM dapat membantu para pelaku IKM untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan IKM yang ada. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik sangat penting, contohnya pemasaran yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu mengikutsertakan batik-batik Banyuwangi ke beberapa event daerah maupun luar daerah. Mengikutsertakan batik Banyuwangi dalam beberapa event dapat memberikan dampak yang besar dalam peningkatan pendapatan IKM batik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain dengan pemasaran lewat event-event batik juga telah menerapkan peraturan pemakaian batik di berbagai instansi daerah dan dinas. Adanya peraturan tersebut dapat memberikan dampak juga pada penjualan batik Banyuwangi.

Selain pemasaran dengan adanya perizinan dan pengendalian oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dapat mempermudah pemerintah untuk mengontrol dan memonitor IKM batik yang ada di Banyuwangi. Hal tersebut berguna untuk mengetahui berbagai macam hal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan masalah yang akan menimpa IKM batik. Maka dengan begitu ketika suatu IKM batik mengalami kemunduran ataupun kemajuan pemerintah daerah dapat dengan mudah menganalisis dan memberikan solusi agar

pengembangan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Perizinan dan pengendalian dalam hal ini diatur oleh Klinik UMKM.

2) Penggunaan Teknologi yang lebih Modern

Menurut Suparyanto (2012) yang menjadi kelemahan aspek manajemen operasi dalam IKM salah satunya adalah teknologi yang digunakan relatif rendah. Teknologi memiliki peran penting dalam proses produksi di industri ataupun IKM. Teknologi juga mempengaruhi cepat atau tidaknya IKM untuk berkembang menjadi lebih maju. Semakin maju teknologi yang digunakan untuk proses produksi maka akan semakin cepat dan efisien produksinya. IKM batik di Banyuwangi dalam produksi batik sebagian besar sudah menggunakan teknologi yang maju dalam membatik seperti canting elektrik. Penggunaan canting elektrik memudahkan para pengrajin batik untuk membatik karena lebih efisien waktu dan tidak perlu memakan banyak tenaga.

Pelaku IKM batik di Banyuwangi sudah banyak menggunakan pembaharuan teknologi membatik, walaupun masih ada beberapa IKM yang belum menggunakan teknologi baru untuk membatik tapi sudah banyak IKM batik yang menggunakan teknologi tersebut. IKM yang belum menggunakan teknologi baru dalam membatik mengaku belum terbiasa dengan teknologi tersebut dan masih menggunakan teknologi yang lama. Pemerintah daerah masih kurang dalam sosialisasi penggunaan teknologi maju dan para pengrajin batik masih kurang pengalaman dalam penggunaan teknologi ini, meski begitu dengan adanya pembaharuan teknologi untuk alat-alat membatik dapat mempercepat produksi IKM batik.

Sosialisasi dalam penggunaan teknologi diperlukan oleh para pengrajin batik untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam produksi batik. Sudah ada beberapa IKM batik yang menggunakan teknologi baru dan sudah lebih efektif dalam pengerjaan produksinya tersebut. Adanya teknologi baru dapat mempermudah untuk pemberdayaan bagi para pelaku IKM batik. Pengrajin batik haruslah sudah bisa menguasai beberapa teknologi baru dalam membuat batik agar lebih mudah dalam pengerjaan produksi batik. Pemberdayaan dengan menggunakan teknologi membuat batik yang lebih maju sebagai fokus utama dapat mempermudah pelaku IKM dalam membuat batik.

3) Bahan Baku Melimpah

Menurut Tambunan (2002), masalah dasar IKM di Indonesia adalah selain karena sumber daya manusia, yaitu masalah sulitnya mendapatkan bahan baku. Sulitnya mendapatkan bahan baku menjadi penghambat pengembangan IKM di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi sendiri dulu masih kesulitan dalam mendapatkan bahan baku batik. Bahan baku batik Banyuwangi diambil dari Pekalongan dan Bali, karena jauh jarak bahan baku tersebut dan belum ada orang yang menyuplai bahan baku batik maka perkembangan IKM juga terhambat dengan bahan bakunya yang sulit terjangkau.

Sekarang sudah ada toko yang menyuplai bahan baku batik tersebut, maka dari itu bahan baku yang dulu sulit didapatkan sekarang dapat dengan mudah didapatkan melalui toko penyuplai bahan baku batik. Toko itu ada karena banyaknya IKM batik yang berdiri di Kabupaten Banyuwangi, maka dari itu Kabupaten Banyuwangi membutuhkan toko yang menyediakan bahan baku batik,

karena untuk memenuhi permintaan IKM batik di Banyuwangi akan bahan baku yang semakin banyak. Toko suplaier ini telah menyediakan bahan baku batik yang sudah lengkap mulai dari “malam”, kain, pewarna alami dll. Sudah tersedia di toko tersebut.

Pelaku IKM sudah tidak perlu untuk membeli bahan baku dari luar daerah karena sudah ada toko bahan baku batik di Banyuwangi. Adanya toko ini dapat mempermudah dalam pengembangan IKM karena bahan bakunya yang melimpah dan cara mendapatkan bahan baku juga sekarang sangat mudah. Menurut pemerintah daerah Banyuwangi bahan baku di Banyuwangi masih sulit didapatkan, tapi kenyataannya sekarang sudah cukup mudah mendapatkan bahan baku batik karena sudah ada toko bahan baku batik. Pemerintah harus sering-sering mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan terkait dengan adanya bahan baku batik yang ternyata didapatkan dengan mudah.

b) Faktor Penghambat

1) Kurangnya Inovasi dalam Desain Batik

Menurut Machfoedz (2011) sebab kegagalan IKM salah satunya adalah sulit melakukan perubahan. Dalam IKM batik yang dimaksud perubahan adalah inovasi dalam desain batik. Desain dalam suatu karya menjadi daya tarik sendiri untuk para konsumen. Semakin menarik desain sebuah karya maka semakin tertariklah konsumen untuk membeli suatu karya tersebut. Hal ini juga termasuk pada batik, jika desain batik semakin menarik maka banyak pembeli yang akan membeli batik tersebut. Batik Banyuwangi sendiri untuk saat ini masih belum bisa berinovasi dalam batik. Desain batik Banyuwangi masih menggunakan desain

batik yang lama dan belum diperbarui. Inovasi dalam desain dibutuhkan untuk memberikan hasil produksi batik yang beragam. Masih banyak IKM yang hanya menggunakan batik hanya sebagai pakaian saja dan belum adanya inovasi dengan produk selain pakaian.

Belum adanya inovasi baru dalam desain batik Banyuwangi mengakibatkan sulitnya berkembangnya IKM batik Banyuwangi. Pemerintah daerah dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut dan akan menyiapkan desain-desain baru untuk batik Banyuwangi. Desain tersebut digunakan untuk memperbarui desain batik Banyuwangi yang sudah lama, namun pelaku IKM batik masih belum terbiasa dengan desain baru dan masih menggunakan desain yang lama. Penggunaan desain yang lama bagi para pelaku IKM batik menyebabkan terhambatnya pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

2) Tenaga Kerja Produksi

Tenaga kerja dalam sebuah usaha merupakan hal yang terpenting karena tenaga kerja yang menjalankan sebuah produksi sebuah usaha. Kebutuhan akan tenaga kerja dalam suatu usaha tergantung pendapatan usaha tersebut, jika pendapatan di usaha tersebut, jika dalam usaha pendapatnya besar dan permintaannya juga banyak maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak, begitu juga sebaliknya jika pendapatan suatu usaha sedikit dan permintaan akan barang produksi itu sedikit maka tenaga kerja produksi yang dibutuhkan juga kecil. Peneliti mengungkapkan di Banyuwangi permintaan batik semakin meningkat maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin besar mengingat permintaan juga semakin meningkat.



Tenaga kerja dibutuhkan untuk memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi dan menjalankan proses produksi dalam suatu industri. Tenaga kerja jika semakin banyak maka semakin cepat pula untuk menyelesaikan hasil produksi, tetapi itu tidak efisiensi harga karena dengan banyaknya tenaga kerja maka pengeluaran untuk gaji semakin besar dan harus disesuaikan dengan pendapatan agar bisa seimbang dengan pengeluaran. Tenaga kerja jika terlalu sedikit maka akan terlalu memakan waktu lama walaupun mengurangi biaya pengeluaran gaji. Jumlah tenaga kerja haruslah sesuai kebutuhan dan keinginan produsen agar tidak terjadi pengeluaran gaji yang besar atau waktu yang terlalu lama dalam produksinya.

Meningkatnya permintaan terhadap batik Banyuwangi akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja produksi, namun tenaga kerja untuk membuat sangat sulit didapatkan di Banyuwangi. Tenaga kerja yang ada bayarnya cukup mahal dan mengakibatkan harga batik Banyuwangi menjadi lebih mahal dari batik dari daerah lain. Selain mengakibatkan daya saing dengan batik daerah lain menjadi lebih rendah juga akan mengakibatkan penurunan permintaan. Penurunan permintaan akan mengakibatkan terhambatnya pemberdayaan IKM batik.

Permintaan yang meningkat sedangkan tenaga kerja yang sedikit akan mengakibatkan lamanya pengerjaan batik. Ketika pengerjaannya jauh lebih lama dengan pengerjaan yang biasanya maka banyak pelaku IKM yang menolak untuk pemesanan selanjutnya dan akan tetap mengerjakan pemesanan batik yang sebelumnya. Akibat dari kurangnya tenaga kerja produksi untuk batik melambat dan pengerjaannya kurang tepat waktu apalagi ketika cuacanya sedang tidak

mendukung maka waktu pengerjaan produk jauh lebih lama seperti biasanya.

Kurangnya tenaga kerja produksi yang terampil membuat kesulitan untuk memberdayakan IKM.

3) Daya Saing Rendah

Menurut Tambunan (2001) daya saing suatu keunggulan pembeda dari yang lain terdiri dari *comperative advantage* (faktor keunggulan komparatif) dan *competitive advantage* (faktor keunggulan kompetitif). Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi yang dinamakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang merupakan tantangan bagi para pelaku IKM. Para pelaku IKM dituntut agar bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi agar tidak kalah dengan produk dari negara-negara ASEAN yang lainnya. Adanya MEA tersebut, menurut peneliti berdampak pada daya saing batik Banyuwangi kepada pasar menjadi rendah. Batik Banyuwangi yang masih tergolong baru di masyarakat luas dibandingkan dengan batik dari batik daerah lain yang sudah maju terlebih dahulu, selain itu harga batik Banyuwangi yang masih tergolong mahal karena biaya gaji untuk karyawan pembatik masih mahal dan masih kurangnya tenaga kerja produksinya. Maka dari itu daya saing batik Banyuwangi masih rendah dan masih belum terkenalnya batik Banyuwangi di masyarakat luas membuat daya saing masih tergolong rendah.

Tantangan yang selain dari MEA dan daya saing dengan produk batik dari daerah lain, menurut peneliti berkembangnya jumlah IKM batik di Kabupaten Banyuwangi yang menyebabkan persaingan di Kabupaten Banyuwangi semakin tinggi. Banyaknya jumlah IKM batik di Banyuwangi menunjukkan pada dasarnya



pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi sudah semakin pesat, tetapi para pelaku IKM batik di Banyuwangi tidak mampu bersaing dengan sesama pelaku IKM batik, sehingga pasti dari salah satu IKM mengalami penurunan produksi dan permintaan batik. Persaingan di daerah sendiri mengakibatkan akan adanya IKM yang menurun perkembangannya. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya suatu keberdayaan para pelaku IKM batik untuk tumbuh berkembang dan mandiri, karena kemampuan mereka bersaing kurang berdaya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan oleh peneliti di bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi

- a. Strategi Peningkatan Kemampuan *Financial*

Pemberdayaan IKM batik dilakukan dengan cara melatih para pengrajin IKM batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi tiap tahunnya. Adanya musrenbangdes dapat membantu terlaksananya pelatihan untuk IKM

batik karena banyak masyarakat yang meminta adanya pelatihan membuat batik. Pelatihan membuat batik dilaksanakan dengan mendatangkan para pelatih dari luar daerah. Pemerintah Banyuwangi juga melakukan pelatihan untuk penggunaan teknologi baru dalam membuat batik salah satu contohnya canting elektrik yang dapat memudahkan dan memberikan efektivitas waktu. Perbaikan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki

kualitas dan ketepatan waktu dalam membuat batik. Modal yang didapatkan oleh para pelaku IKM batik di Banyuwangi merupakan modal mandiri dan tidak dibantu secara langsung oleh pemerintah daerah. Pelaku IKM batik dalam mendapatkan modal yaitu dengan cara kredit di bank.

Peminjaman yang diperoleh dari IKM batik merupakan usaha mandiri dari IKM itu sendiri. Pemerintah Banyuwangi membantu untuk kepengurusan surat untuk kebutuhan kredit yang akan dilakukan oleh

IKM, serta memberikan sosialisasi untuk IKM batik tentang kredit di bank. Kemandirian IKM batik dalam permodalan membuktikan bahwa pelaku IKM dalam permodalan tidak bergantung terus dengan bantuan modal pemerintah.

b. Pengembangan Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi untuk IKM batik dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan cara diadakan event-event dan pameran untuk batik. Salah satu event yang menjadi ajang promosi batik di Kabupaten Banyuwangi yaitu Batik Banyuwangi Festival (BBF) yang diadakan setiap setahun sekali di Banyuwangi. Adanya BBF dapat menunjang penjualan produk untuk batik Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi selain dengan mengikutsertakan IKM batik ke event local seperti BBF juga mengikutkan IKM batik ke event di luar daerah untuk mempromosikan pada luar daerah mengenai eksistensi batik Banyuwangi. Hal tersebut juga dapat menambah pendapatan IKM batik. Adanya BBF dan event untuk batik merupakan salah satu upaya pemerintah Banyuwangi untuk mempromosikan batik Banyuwangi, selain itu dengan adanya Banyuwangi Mall yang merupakan tempat khusus untuk hasil IKM di Banyuwangi menjadi wadah untuk IKM dalam menjual hasil produksi IKM yang ada di Banyuwangi tak terkecuali IKM batik. Masih adanya beberapa IKM yang belum bisa dimasukan ke Banyuwangi Mall karena terkendala dengan perizinan, walaupun begitu pemerintah daerah sudah berusaha dengan membantu dalam mengurus permasalahan perizinan

IKM batik yang akan memasarkan ke Banyuwangi Mall. Pemerintah Banyuwangi juga menerapkan kebijakan untuk instansi daerah menggunakan batik Banyuwangi sebagai seragam wajib untuk instansi-instansi dan dinas di hari tertentu. Seragam untuk dinas-dinas di Banyuwangi ini ditentukan di hari tertentu saja tiap bulannya, untuk instansi seperti sekolah batik dikenakan tiap hari rabu dan kamis. Batik Banyuwangi sebagai seragam wajib untuk instansi dan dinas di Banyuwangi merupakan salah satu cara pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

2. Pemberdayaan IKM batik oleh pemerintah ada factor pendukung dan penghambat

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik yang dilakukan oleh pemerintah terdapat tiga faktor. Tiga factor tersebut yaitu dukungan dari pemerintah daerah yang memeberikandukungandenganmelakukanpelatihansertapromosi, perkembangan teknologi yang digunakan oleh para pelaku IKM batik, dan bahan baku untuk IKM melimpah yang biasanya harus memesan langsung dari daerah lain untuk sekarang sudah ada toko yang menjual bahan baku untuk membuat batik.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi ada tiga faktor, yaitu tenaga kerja untuk menjadi



pengrajin masih kurang, kurangnya inovasi dalam desain batik, dan daya saing untuk batik Banyuwangi masih kurang dengan batik di daerah lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar produksi IKM batik menjadi lebih produktif maka dari itu perlu mempergunakan mobil UMKM sebaik-baiknya dengan menggerakkan mobil UMKM lebih sering lagi untuk mengontrol dan mendata apa saja kebutuhan IKM dengan begitu akan mempermudah pemberdayaan IKM batik serta memenuhi kebutuhan IKM.
2. Kegiatan untuk pemasaran seperti BBF dan festival batik lainnya hendaknya dievaluasi kembali apa yang kurang dan bagaimana agar para pelaku IKM batik dapat mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Anonym. 2014. *Banyuwangi dorong pengembangan ekonomi berbasis pariwisata*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 dari Banyuwangikab.go.id/berita-daerah/Banyuwangi-dorong-pengembangan-ekonomi-berbasis-pariwisata.html.

Anonym. 2014. *Mengenal batik khas Banyuwangi*. Diakses pada tanggal 29 September 2016 dari www.banyuwangibagus.com/2014/10/mengenal-batik-khas-banyuwangi.html.

Anonym. 2014. *Banyuwangi genjor promosi produk UMKM unggulan*. Diakses pada tanggal 29 September 2016 dari m.beritasatu.com/industri-perdagangan/177487-banyuwangi-genjot-promosi-produk-umkm-unggulan.html.

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: FE UGM.

Gunawan Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.

Machfoed, Mas'ud. 2011. *Kewirausahaan Metode, Manajemen, dan Implementasi*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, Jhonny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book*. Singapore: SAGE Publication. (pdf)

Moleong, Lexy. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Muluk, M.R Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia.

_____. 2009. *Peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Surabaya: ITS press.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

_____. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Prawirokusumo, Soeharto. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*.

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Sjaifudin, Hetifah, dkk. 1995. *Strategidan Agenda pengembangan usaha kecil*.

Bandung: AKATIGA.

Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan*

Strateginya). Cetakan kedelapan. Jakarta. Gunung Agung.

Simatupang, Lono Lastoro. 2013. *Kerajinan Batik dan Tenun*. Yogyakarta: Balai

Pelestarian Nilai Budaya.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*

dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Suprayanto, W.R. 2012. *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*.

Bandung: Alfabeta.

Suryana. 2013. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: mengubah Ide dan Menciptakan*

peluang. Jakarta: Salemba Empat.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Yogyakarta.

UB Press.

Suseno, T. W, dkk. 2005. *Responsisi usaha mikro, kecil, menengah dalam*

perekonomian nasional. Yogyakarta: universitas sanata Darma.

Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.



- Syahroni, 2001. *Pengertian Dasar dan Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal visi perencana Vol. 1 No 1, Oktober 2001
Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran pembangunan tingkat nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES
- _____. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Tambunan, tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- _____. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia: Beberapa isu penting*. Jakarta: Salemba empat.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ([pdf](#))
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- World Bank. 1997. *The Development Report*. Washington DC: World Bank.





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah proses pengelolaan biogas pada Kelompok Petani Peternak Sumber Hasil dan masyarakat Dusun Toyomerto ?
2. Apa saja dampak yang muncul dalam pengembangan biogas terhadap masyarakat Dusun Toyomerto ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh KLH, KPPSH, dan masyarakat agar pengembangan biogas dapat dilaksanakan secara berkelanjutan hingga generasi mendatang ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan biogas di Dusun Toyomerto ?
5. Apa saja solusi dalam menangani kendala tersebut ?
6. Apa upaya KLH dalam membantu KPPSH dan masyarakat Dusun Toyomerto agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengembangan biogas ?
7. Bagaimanakah proses dan prosedur pembangunan instalasi biogas di Dusun Toyomerto ?
8. Bagaimanakah partisipasi masyarakat terhadap fasilitas instalasi biogas yang diberikan ?
9. Bagaimanakah upaya KLH dalam memperhatikan dampak terhadap fasilitas yang diberikan ?
10. Mengapa KLH memberikan fasilitas berupa instalasi biogas pada KPPSH dan masyarakat Dusun Toyomerto ?



11. Bagaimanakah upaya KLH dalam meningkatkan kesadaran masyarakat

Dusun Toyomerto ?

12. Apa saja upaya KLH dalam memberikan informasi yang relefan kepada

KPPSH dan masyarakat ?

13. Bagaimanakah upaya KLH dalam memperoleh berbagai sumberdaya dari

pihak ketiga diluar KPPSH dan masyarakat ?

14. Apakah ada upaya dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman yang

dilakukan oleh pihak ketiga diluar KPPSH dan masyarakat dusun ?



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Blok A Lt.3 Telp/Fax (0341)-513265
KOTA BATU 65313

Nomor : 660/ /422.208/2016

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, bertempat di Kota Batu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **HARI SANTOSO, SH**
NIP : **19691001 199003 1 006**
Jabatan : **Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu**
Alamat : **Jl. Panglima Sudirman No. 507 Blok A Lt.3**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu berdasarkan Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/79/KEP/422.012/2016 Tanggal 8 Maret 2016 Tentang Pemberian Hibah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak menjadi Biogas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama : **MAT REKEN**
Nomor KTP : **3579010107600001**
Alamat : **RT.02 RW. 09 Dusun Dresel Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu**

Yang bertindak untuk dan atas Juwono dan Prayitno selaku warga Dusun Dresel Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH



1. **PIHAK KESATU** memberikan hibah berupa Instalasi Pengolahan Limbah Ternak menjadi Biogas dan Pupuk sebanyak 1 (satu) unit kapasitas kecil dengan volume 15m³.
2. Instalasi Pengolahan Limbah Ternak menjadi Biogas dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipergunakan untuk mengolah limbah tinja/kotoran hewan ternak (sapi) menjadi biogas sesuai dengan hasil survey sebagai tindak lanjut dari Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan (16.11).
3. Penggunaan Instalasi Pengolahan Limbah Ternak menjadi Biogas dan Pupuk sebagaimana ayat 2 bertujuan untuk mengurangi beban pencemaran serta meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat dengan pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar alternatif.

Pasal 2

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan hibah berupa Instalasi Pengolahan Limbah Ternak menjadi Biogas dan Pupuk kepada **PIHAK KEDUA** sejak tanggal ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
2. **PIHAK KEDUA** setelah menerima hibah dari **PIHAK KESATU** segera melaksanakan kegiatan/memanfaatkannya dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan/pemanfaatan hibah.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas penggunaan/pemanfaatan hibah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak menjadi Biogas dan Pupuk yang telah disetujui **PIHAK KESATU** dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.



3. Pemeliharaan hibah Instalasi Pengolahan Limbah Ternak menjadi Biogas dan Pupuk sejak berakhirnya masa pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

LAIN-LAIN

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat rangkap 2 (dua), rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

MAT REKEN

HARI SANTOSO, SH

NIP. 19691001 199003 1 006



PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BATU
DESA PESANGGRAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PESANGGRAHAN
NOMOR : 141/13/KEP/500.510.007/2005
TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PETANI PETERNAK SUMBER HASIL
DUSUN TOYOMERTO DESA PESANGGRAHAN**

KEPALA DESA PESANGGRAHAN

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dibentuk Kelompok Petani Peternak Sumber Hasil Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan dengan Keputusan Kepala Desa Pesanggrahan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 - Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Batu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- P E R T A M A :** Membentuk Kelompok Petani Peternak Sumber Hasil Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir ;
- K E D U A :** Kelompok Petani Peternak Sumber Hasil Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan bertugas melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan wajib melaporkan hasilnya kepada anggota ;
- K E T I G A :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Pesanggrahan
pada tanggal : 05 Januari 2005



Dr. H. ISMAIL HASAN, MM.



CURRICULUM VITAE

Nama : Fatchur Rochman Amiin
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Minat : Ilmu Administrasi/Administrasi Pemerintahan
NIM : 125030500111018
Universitas : Brawijaya



Alamat Asal : Jln. SD Kedungrejo Barat No 41, Waru, Sidoarjo
Email : fatchurra@gmail.com
No. Telepon : 082333699876
Pendidikan Formal :

1. SD Darul Ulum Bungurasih (2000-2006)
2. SMP Unggulan Amanatul Ummah Surabaya (2006-2009)
3. SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya (2009-2012)
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2012-2016)

Karya Ilmiah : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Biogas Berbasis *Community Development* (Studi pada Kelompok Petani Peternak Sumber Hasil di Dusun Toyomerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu)



**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(IKM) DI SEKTOR BATIK**

**(Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan
Kabupaten Banyuwangi)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**BAYU NIRWANA KUSWONO
NIM. 125030600111008**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG**

2017



MOTTO

**“AWALI DENGAN *BISMILLAH* AKHIRI
DENGAN *ALHAMDULLIAH* SERTA MINTA
RESTU PADA ORANG TUA”**

(Bayu Nirwana Kuswono, 2017)



LEMBAR PERSEMBAHAN

FATCHUR PERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA

Kedua orang tua, Ibu Sarofah dan Ayah Alm. H. Mashuri Kuswono yang telah memberikan semangat dan dukungan moril maupun materiil serta adik-adik saya Basofi, Oktavian dan Hakiki yang selalu memberikan dukungan dan semangat

Keluarga Besar Alm. Mbah Nadah dan Alm. Mbah Syamsul yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa

Keluarga besar Mbah Dariah dan Mbah Sarkoyang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa

Wanita spesial dari hidup saya yang kelak akan jadi pasangan

Sahabat-sahabat dari Banyuwangi yang tak terlupakan (Dian, Candra, dan Khusnul alias si upin)

Abah Shodiq dan Umi Lilik serta saudara “Kost Kertorahayu 62 A” (Wisnu, Fatur, Bang Riki, Bang Irvan, Bang Suryo, Bang Kemal, Fila, Ahmad, Dadang, dan Gema) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa

Sahabat-sahabat mahasiswa akhir saya Tino, Anas, Rizky, Rifqi, Sigit, Abdul, Nur, Muhsin, Arif Shofi, Syarifuddin, Veggy, Alif, Pepen dan Agus.

Teman-teman baru saya di Kontrakan Joyogrand (Handoko, Veggy, JB, Marben, dan Dikin)

Teman-teman Perencanaan Pembangunan 2012

RINGKASAN

Bayu Nirwana Kuswono, 2017, **Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan IKM Batik Banyuwangi** (studi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi), Pembimbing Dr. Abdullah Said, M.si. anggota Pembimbing: Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMG110 Hal.+xvii

Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu upaya dalam memperbaiki dan membantu IKM batik dalam mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha tersebut berguna untuk meningkatkan pendapatan pelaku IKM. Salah satu cara untuk mengembangkan usaha IKM batik di Banyuwangi yaitu dengan adanya pelatihan untuk membuat serta sosialisasi tentang peminjaman di bank.

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian meliputi (1) Upaya pemerintah dalam pemberdayaan IKM batik Banyuwangi (2) Faktor pendukung dan faktor pendorong. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana 2014.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi dilaksanakan melalui pelatihan setiap tahunnya setelah diadakan musrenbangdes. Masyarakat banyak yang meminta adanya pelatihan untuk membuat di daerahnya. Adanya pelatihan berguna untuk meningkatkan kemampuan dan menciptakan tenaga kerja baru untuk pengrajin batik. Klinik IKM juga berguna untuk mengatasi IKM yang mengalami permasalahan akan dibantu. Permasalahan yang dihadapi oleh IKM batik di Banyuwangi bisa dikonsultasikan ke klinik IKM untuk mendapat bantuan dari klinik IKM seperti permasalahan perizinan untuk melakukan peminjaman. Pelaku IKM sangat terbantu dengan adanya klinik IKM untuk melakukan peminjaman dan sangat dibantu dalam pemasaran karena IKM batik banyak diikuti pada beberapa event-event batik di dalam daerah maupun di luar daerah. Pelaku IKM dalam mendapatkan modal rata-rata sudah mandiri dan tanpa adanya bantuan modal dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah membantu dalam memberikan kemudahan kepengurusan surat dan memberikan sosialisasi kepada pelaku IKM tentang bagaimana peminjaman di bank.

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya desain baru untuk batik Banyuwangi serta penggunaan alat-alat membuat yang lebih modern, selain untuk menambah eksistensi batik Banyuwangi di luar daerah dan dapat memperbaiki kualitas batik Banyuwangi agar menjadi lebih baik, dan juga perlu adanya pelatihan sejak dini untuk menciptakan pekerja yang siap kerja dan berkualitas.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, IKM dan Batik.



SUMMARY

Bayu Nirwana Kuswono, 2017, the Effort of Local Government in Small and Medium Industries Batik Banyuwangi (Studies in The Department of Industry, Trade and Mining Banyuwangi) Tutors Dr., Abdullah Said, M.si. A member of Tutor: Alfi Haris wanto, SAP., M.AP., MMG. 110 thing + XVII.

The local government effort in empowering the Small and Medium Industries batik in Banyuwangi Regency is an eggort in fixing and help small and medium industries of batik in developing his business. Development of the useful effort to increase the income of the perpetrator of the small and medium industries. One way to expand the small and medium industries batik in Banyuwangi namelu the existance of training for batik and dissemination about loaning in the bank.

A method of the research ises researcn descriptive with a qualitative approach. Focus research covering (1) government effort to in small and medium industries batik Banyuwangi (2) factors in support and factors driving. Technique data collection using interviews, observation, and documentation. Analysis data using Miles, Huberman, and Saldana (2014).

The results of this research show that the local government effort in empowering the small and medium industries batik in Banyuwangi was implemented through training every year once held MUSRENBANGDES. The community requesting the presence of a lot of training to make batik on its territory. The presence of useful training to enhance skills and create new workforce for batik craftsmen. The clinic is also useful for Small and Medium Industries overcome problems that experienced small and medium industries will be helped. The problems faced by small and medium industries of batik in Banyuwangi can be cosulted to small and medium industries clinic to get help from the licensing issues such as small and medium industries clinic to do the borrowing. The perpetrators of the small and medium industries greatly helped by the presence of small and medium industries borrowing to do clinics and assisted in marketing because of the very small and medium industries included many batik on batik several events in the region and outside region. Perpetrators of small and medium industries in capital gain on avaeage already independently and without any help from the local government capital. Local governments assist in providing ease of stewardship of letters for lending in banks and providing socialization to small and medium industries about how to lend in banks.

Advice of research is needed a new design for batik Banyuwang and the use of tools batik more modern, in addition to increase in ecistence Banyuwangi in other regions and can improve Banyuwangi batik to be better, and also need to the training in early to create workers ready to work and quality.

Keywords: Effort, Local Government, Empowerment, small and medium industries and Batik.





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan IKM Batik Banyuwangi** (Studi di Dinas Koperasi dan IKM dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Hermawan S.IP., M.Si selaku koordinator minat perencanaan Pembangunan;
4. Dr., Abdullah Said, M.si selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan dorongan moril serta saran selama mengajar dan membimbing saya;



5. Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMGselaku Anggota Dosen

Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, banyak dorongan semangat dalam penulisan ini serta selalu sabar menghadapi saya;

6. Bapak dan Ibu dosen Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

7. Bapak Trijoko selaku seksi bidang ILOMETA Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangiyang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian;

8. Ibu Triyani selaku pembimbing klinik IKM Kabupaten Banyuwangi

yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu melakukan penelitian di Dinas Koperasi dan IKM Kabupaten Banyuwangi;

9. Ibu Hanni selaku pemilik batik yang telah mengizinkan saya untuk

melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta saran dalam penelitian ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan Pemerintah.....	16
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	16
2. Peran Pemerintah Daerah.....	18
B. Administrasi Pembangunan	22
1. Administrasi Publik.....	22
2. Pengertian Administrasi Pembangunan	24
3. Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	26
C. Konsep Pemberdayaan	30
1. Pengertian Pemberdayaan	30
2. Tujuan Pemberdayaan.....	31
3. Proses Pemberdayaan.....	33
4. Manfaat Pemberdayaan.....	34
5. Tahapan Pemberdayaan	35
6. Hambatan Pemberdayaan	37
7. Indikator Pemberdayaan.....	38
D. Industri Kecil dan Menengah.....	39
1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah.....	39
2. Pengembangan industri Kecil dan Menengah.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43



B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	47
G. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Kabupaten Banyuwangi	52
a) Gambaran Geografis Banyuwangi	52
b) Pembagian Wilayah Administrasi	53
c) Keadaan Penduduk	54
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan	55
3. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM	59
4. Gambaran Umum IKM batik Banyuwangi	62
B. Penyajian Data	
1. Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM batik	66
a) Strategi Peningkatan kemampuan <i>financial</i>	69
b) Pengembangan Pemasaran	74
2. Faktor Pendukung dan faktor penghambat	77
a) Faktor pendukung	78
1) Dukungan dari Pemerintah daerah	78
2) Penggunaan Teknologi yang lebih modern	81
3) Ketersediannya Bahan Baku	83
b) Faktor Penghambat	84
1) Kurangnya Inovasi dalam desain Batik	84
2) Tenaga Kerja Produksi	86
3) Rendahnya Daya Saing UMKM batik	87
C. Analisis dan Interpretasi Data	88
1. Analisis terhadap Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM Batik di Banyuwangi	89
a) Strategi Peningkatan kemampuan <i>financial</i>	89
b) Pengembangan Pemasaran	92
2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pemberdayaan UMKM Batik	95
a) Faktor pendukung	95
1) Dukungan dari Pemerintah Daerah	95
2) Penggunaan Teknologi yang lebih modern	97
3) Bahan Baku Melimpah	98
b) Faktor Penghambat	99
1) Kurangnya Inovasi dalam Desain Batik	99
2) Tenaga Kerja Produksi	100
3) Daya saing Rendah	102



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi	7
2.	Peran Pemerintah	19
3.	Ciri-ciri pembeda Administrasi Publik dengan Administrasi Pembangunan.....	25
4.	Nama Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi	54
5.	Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.....	54
6.	Tugas Klinik UMKM dan Koperasi	61
7.	Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi	63
8.	Potensi IKM Batik	65



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Analisis data Interaktif.....	47
2.	Peta Kabupaten Banyuwangi.....	51
3.	Struktur Organisasi DISPERINDAGTAM.....	59
4.	Mobil Klinik UMKM.....	67
5.	Pelatihan Desain Batik Baru Banyuwangi.....	70
6.	Pagelaran Batik Banyuwangi Festival (BBF).....	74
7.	Pengrajin Batik Banyuwangi Menggunakan Canting Elektrik.....	80
8.	Desain Batik Banyuwangi.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan wujud kemauan suatu negara untuk berkembang menjadi lebih baik. Pembangunan dapat memberikan hasil yang baik untuk sebuah negara jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada di negara tersebut. Siagian (2012:4) berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dari definisi di atas pembangunan merupakan usaha secara sadar dan terencana suatu negara untuk melakukan perubahan dengan memandatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Dengan adanya pembangunan yang baik diharapkan pemerintah dapat mengolah sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan, berlangsung secara terus menerus. Pembangunan di suatu negara secara bertahap akan semakin berkembang sesuai keadaan masyarakat. Dengan adanya pembangunan, negara berkembang sedang berusaha untuk mengubah keadaan masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern. Dalam hal ini ada sangkut pautnya dengan ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian yang baik salah satunya ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran,



hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial. Sejak adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan sudah tidak lagi terpusat lagi melainkan sudah merata di berbagai daerah, karena adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sendiri.

Pemberian kewenangan yang besar terhadap daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga pelayanan terhadap masyarakat berjalan lebih baik dan potensi daerah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan agar dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memutuskan kebijakan untuk daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Pembangunan daerah jika dilihat administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1994:97) menyatakan :

“Masalah pemerintahan daerah dilihat pula dari segi apakah pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai konsisten dalam usaha pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerahnya. Hal ini berarti bahwa rencana kebijakan maupun program-program pembangunan nasional harus memperhatikan pertimbangan regional”.

Pemerintah daerah meskipun sudah diberi wewenang untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerahnya tetap saja haruslah mengikuti arahan dari pembangunan nasional. Hal ini dilakukan agar pembangunan daerah sejalan dengan pembangunan nasional.



Menurut Syahroni (2001:16), pembangunan daerah secara umum memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja;
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah;
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang atau berkelanjutan.

Pernyataan dari tujuan-tujuan pembangunan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dengan terwujudnya pembangunan ekonomi yang baik maka dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah mempunyai otoritas dalam membangun perekonomiannya sendiri, maka dari itu setiap daerah memiliki hak untuk mengolah dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerahnya. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut.

Pembangunan daerah, pemerintah daerah harus melihat potensi apa saja yang ada di daerahnya. Potensi di beberapa daerah di Indonesia yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu pengembangan IKM.

Upaya pengembangan IKM dapat dilakukan dengan cara mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau disebut dengan pemberdayaan (Surjono dan Nugroho, 2008:25). Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui pemberian pengetahuan, penguatan modal dan perlindungan terhadap produk. Sedarmayanti (2003: 113) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat mendorong tumbuh dan



berkembangnya kreatifitas dan inovasi, mampu mendayagunakan modal intelek, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Sumodiningrat (1999) menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat jika dikembangkan membuat masyarakat menjadi mandiri dan perekonomiannya meningkat.

Pemberdayaan dibutuhkan untuk melatih kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap IKM tidak hanya ditujukan pada pemecahan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada saat ini, namun pemberdayaan diharapkan mampu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada masa mendatang. Hal itu dikarenakan IKM memiliki tujuan-tujuan visioner dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan SDM, menciptakan produk domestic yang berkualitas dan berdaya saing serta kemampuan IKM dalam menghadapi krisis ekonomi. Menurut Tambunan (2009: 46) yang menyatakan bahwa IKM memiliki kontribusi yang sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan, fakta mengungkapkan bahwa IKM mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar, oleh karenanya IKM sangat diharapkan untuk bisa terus berperan dalam menanggulangi pengangguran.

Pemberdayaan masyarakat yang melatih kemandirian masyarakat memiliki sejumlah hambatan. Menurut Adi (2008) hambatan yang sering muncul adalah



sulitnya untuk menyinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Kebutuhan tiap masyarakat berbeda satu sama lain, makanya untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat dalam pemberdayaan sulit dilaksanakan karena kebutuhan akan pemberdayaan berbeda. Sekelompok masyarakat juga akan menolak jika program pemberdayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 5 tentang Industri kecil dan menengah dijelaskan tujuan-tujuan UMKM yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
3. Meningkatkan peran usaha kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka IKM merupakan hal penting dalam upaya mewujudkan bangsa yang mampu berdaya saing, menciptakan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, peranan IKM sangat penting dalam pembangunan nasional, seperti yang diungkapkan oleh Suprayanto (2012: 31) yang menyatakan bahwa peranan usaha kecil dalam pembangunan nasional antara lain:

1. Menyerap Tenaga Kerja baru.
2. Penyedia Barang dan Jasa bagi Masyarakat.
3. Penyedia Suku Cadang bagi Usaha Skala Menengah Dan Besar.
4. Mengurangi Urbanisasi.
5. Mendayagunakan Sumber Ekonomi Daerah.
6. Menunjukkan Citra Diri bangsa Indonesia.



Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Peranan IKM merupakan salah satu kunci sukses peningkatan perekonomian nasional. IKM juga memegang peran penting dalam pengembangan masyarakat untuk menjadi lebih berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM sangatlah dibutuhkan, hal ini karena pemerintah daerah berperan penting dalam pemberdayaan IKM guna menciptakan perekonomian daerah yang terus berkembang. Pemberdayaan IKM secara berkala dan berkelanjutan pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa keberadaan IKM sangat membantu pengembangan perekonomian di daerah. Menurut Suprayanto (2012: 31) menyatakan bahwa salah satu peranan atau keuntungan dari IKM dalam pembangunan nasional adalah penyerapan tenaga kerja yang kreatif serta penyediaan produk bagi masyarakat. Sektor IKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, sumber daya alam yang dapat ditingkatkan sebagai produk-produk unggulan yang memiliki daya saing lebih tinggi.

Pemberdayaan IKM jika berhasil akan meningkatkan ekonomi di nasional dan daerah. Pemerintah khususnya pemerintah daerah diharuskan untuk meningkatkan IKM di daerah masing-masing agar meningkatkan perekonomian daerahnya. Beberapa daerah sudah melakukan pemberdayaan IKM untuk meningkatkan perekonomian daerahnya salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa tahun ini Kabupaten Banyuwangi mengembangkan ekonomi lokal melalui pariwisata alam. Dengan perkembangan pariwisata di



Kabupaten banyuwangi membuat perkembangan IKM di Kabupaten Banyuwangi meningkat.

Hal itu merupakan strategi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan IKM di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Dengan mengembangkan pariwisata maka akan berdampak langsung pada IKM karena banyaknya wisatawan dari luar daerah Kabupaten Banyuwangi yang mendatangi tempat wisata. Promosi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi maka akan menarik wisatawan datang ke Banyuwangi secara otomatis sektor perhotelan, kuliner dan transportasi akan mendapatkan keuntungan. Demikian juga produk-produk yang dihasilkan IKM seperti kerajinan, cinderamata, aksesoris atau makanan ringan akan laku, karena wisatawan pasti akan mencari barang khas Banyuwangi untuk dijadikan oleh-oleh.

Tabel 1 Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		2015	2016	2015	2016
1	Wongsorejo	311	323	1.156	1.171
2	Kalipuro	818	875	2.419	2.528
3	Licin	195	198	464	488
4	Glagah	342	352	1.445	1.556
5	Giri	111	113	384	385
6	Banyuwangi	642	691	2.286	2.407
7	Kabat	1.114	1.154	2.660	2.822



8	Rogojampi	2.345	2.371	7.684	7.707
9	Songgon	556	577	1.479	1.572
10	Sempu	938	985	1.854	1.861
11	Singojuruh	399	403	985	1.042
12	Srono	2.822	2.929	8.013	8.550
13	Cluring	450	484	1.346	1.350
14	Gambiran	516	537	2.154	2.169
15	Genteng	1.252	1.316	3.418	3.678
16	Glenmore	761	814	3.485	3.764
17	Kalibaru	330	338	1.118	1.202
18	Tegalsari	298	308	1.063	1.140
19	Muncar	1.602	1.615	9.829	9.937
20	Tegaldlimo	761	814	4.748	4.784
21	Purwoharjo	380	383	1.433	1.543
22	Bangorejo	339	344	839	852
23	Siliragung	493	512	1.131	1.189
24	Pesanggaran	488	551	1.909	1.974
Jumlah		18.305	18.987	63.302	65.635

Sumber: Dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi 2017

Tabel di atas menjelaskan jumlah industri kecil dan menengah di tahun 2016 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Beberapa daerah mengalami kenaikan jumlah industri kecil dan menengah. Adanya peningkatan jumlah ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Banyuwangi.



Karena jika jumlah unit IKM bertambah maka kebutuhan akan tenaga kerja bertambah.

Ada beberapa prinsip yang mendasari pemberdayaan IKM di Kabupaten Banyuwangi. Prinsip-prinsip tersebut sudah diatur dalam PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM pasal 3 (tiga) yakni: 1) Efektif; 2) Efisien; 3) Terpadu; 4) Berkesinambungan; 5) Professional; 6) Adil; 7) Transparan; 8) Akuntabel; 9) Kemandirian; 10) Etika usaha; 11) Peningkatan daya saing; 12) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.

Prinsip-prinsip di atas adalah yang mendasari adanya pemberdayaan IKM di Kabupaten banyuwangi. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat membuat IKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Salah satu sektor IKM yang saat ini sedang berkembang adalah IKM sektor batik. Sektor IKM batik di Kabupaten banyuwangi saat ini perlu dikembangkan karena memiliki potensi yang cukup besar. Karena dengan adanya pemberdayaan IKM di sektor batik maka akan menjadi salah satu ikon untuk Kabupaten Banyuwangi dibuat oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi ketika wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi maka diharapkan IKM sektor batik diharapkan ikut berkembang juga. Sebanyak 32 pengrajin batik yang telah tumbuh di 32 lokasi lapangan pekerjaan yang tersedia di sektor industri batik, dimana di salah pengrajin batik tersebut mampu memperkejakan dan menyerap tenaga kerja



hingga 20 orang tenaga kerja. (Dinas perindustrian perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi : 2017)

Salah satu yang menjadi sentra IKM batik di Kabupaten Banyuwangi adalah Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Di desa ini, masyarakat masih menyimpan batik motif asli Kemiren yang berusia ratusan tahun. Di Kemiren terdapat banyak motif batik asli suku Using. Diantaranya, Sembruk cacing, Gajah oling, umah tawon, kopi peacah, gedheg'an, gajah mungkung, paras gempal, srimpet, wader kesit, kangkung setingkes, lakaran, juwono, gringsing, garuda mungkur dan sekar jagad. Motif-motif asli batik Desa Kemiren tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. (www.banyuwangibagus.com)

Salah satu strategi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan IKM di sektor batik adalah dengan mengadakan sebuah acara yang dinamakan BANYUWANGI BATIK FESTIVAL (BBF). Acara ini digelar diharapkan dapat menarik masyarakat Banyuwangi sendiri dan para wisatawan dari luar daerah agar tertarik membeli batik Banyuwangi. Acara ini dilaksanakan mulai dari tahun 2012 lalu semenjak diangkatnya Azwan Anas menjadi Bupati Kabupaten Banyuwangi. Namun strategi ini memiliki hambatan yaitu para pelaku usaha batik masih belum siap dalam menerima permintaan pasar dikarenakan kurangnya modal dan kurangnya bahan-bahan pembuatan batik. Pemerintah daerah tidak melihat bagaimana kesiapan para pengrajin batik dalam menyelenggarakan acara tersebut, sehingga hanya ada beberapa para pengrajin yang ikut serta dalam acara BBF. Sedangkan yang lain masih belum bisa siap dalam mengikuti penyelenggaraan acara tersebut. (sumber olahan penulis)



Pengrajin batik di Kabupaten banyuwangi saat ini mengalami kesulitan dalam hal pengadaan bahan produksi. Beberapa bahan dasar produksi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan batik adalah jagrak (kayu yang digunakan untuk membentangkan kain) wajan (sebagai tempat untuk mencairkan “malam” di atas api yang berasal dari kompor), “malam” (lilin untuk membatik), kain, canting (alat untuk melukiskan “malam” yang sudah cair), dan pewarna (Salamun dalam Simatupang (2013:31-34)). Beberapa bahan tersebut didatangkan di luar Kabupaten Banyuwangi, namun untuk jagrak, wajan, canting dan pewarna yang berasal dari alam seperti daun dan kayu tersedia di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Bahan dasar “malam” didatangkan di luar Kabupaten Banyuwangi seperti Bali dan Pekalongan, sedangkan kain didatangkan langsung dari Malang. Jika ketersediaan bahan baku yang dekat atau mungkin berada di wilayah industri, akan memudahkan dalam proses produksi. Pemerintah daerah Banyuwangi harus memberikan akses untuk alat-alat dan bahan-bahan pembuat batik. (hasil wawancara dengan dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan)

Pemerintah Banyuwangi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk IKM batik mengalami masalah. Salah satu masalahnya yaitu karena permintaan masyarakat yang berbeda-beda jadi sulit untuk mewujudkan suatu program yang terpadu untuk pemberdayaan. Banyak masyarakat yang tidak ingin mengikuti pemberdayaan karena kebutuhan yang diinginkan berbeda. Ada juga yang sudah bosan dengan pemberdayaan yang itu-itu saja, karena pada dasarnya banyak yang sudah terlatih dalam membatik. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi masih kurang dalam memberikan pemberdayaan dalam penggunaan



IPTEK kepada para pengrajin IKM. Banyak pengusaha batik yang masih belum bisa menggunakan IPTEK dalam memasarkan produknya dengan baik yang akan menyebabkan hasil produk batik masih kurang dalam berdaya saing dengan daerah lain. Karena kurangnya pemahaman akan IPTEK, maka masyarakat sulit menerima apa yang disosialisasikan tentang penggunaan teknologi baru dalam membuat batik. Pembaharuan teknologi membuat digunakan untuk efisiensi membuat batik. Kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi, mengakibatkan pemberdayaan menjadi sulit dilaksanakan.

Kurangnya daya saing dikarenakan karena adanya kurangnya pemasaran yang tepat sasaran dan inovatif. Hasil yang kurang memiliki daya saing tersebut maka IKM butuh perhatian khusus terutama dalam pemberdayaan IKM batik. Belum terkenalnya batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi membuat pemasaran masih sulit dilakukan karena batik Banyuwangi masih kalah pamor dengan batik-batik yang ada di daerah Jawa Tengah dan Jogjakarta. Adanya pemberdayaan IKM batik Banyuwangi diharapkan pelaku IKM akan lebih mandiri.

Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah memberikan bantuan modal kepada pengrajin batik berupa pinjaman lunak. Tetapi para pengrajin banyak yang tidak mau menggunakan pinjaman lunak karena para pengrajin batik menginginkan bantuan berupa modal bukan pinjaman. Pengrajin batik dinilai masih belum mampu melakukan pinjaman karena takut tidak sanggup membayar tagihan pinjaman. Selain itu kurangnya informasi dalam memberikan pinjaman atau modal membuat para pengrajin batik sulit mengembangkan usaha batik dan



belum bisa melayani permintaan pasar. Hal ini disebabkan Karena pemerintah daerah sendiri masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi dengan adanya pinjaman lunak kepada pengrajin batik.

Berdasarkan masalah di atas dapat menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik sangat diperlukan. Hal tersebut karena pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan IKM batik. Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM dibutuhkan karena pemerintah daerah merupakan aktor sentral dalam pemberdayaan IKM di Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu penulis tertarik meneliti IKM batik dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan IKM Sektor Batik di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberdayaan IKM batik?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang potensi IKM batik dalam potensi daerah

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis

c. Memperkaya kajian keilmuan administrasi publik

2. Manfaat Praktis

a. Tersedianya informasi mengenai potensi IKM sektor batik di Kabupaten Banyuwangi

b. Sebagai dasar arah penentuan kebijakan ekonomi daerah di industri kecil menengah konveksi dalam menghadapi era otonomi daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi

c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan IKM sektor batik.

E. Sistematika Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penelitian yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN



Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang teori-teori, konsep-konsep, dan definisi-definisi yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diangkat

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis strategi yang telah dilakukan serta memberikan saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan :

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945 yaitu, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah

dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mekanisme pembagian urusan pemerintahan atau pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan mengalami pergeseran di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, terakhir mengalami pergeseran kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditambahi dengan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang



perangkat daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal 1 ayat 6 pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Haris (dalam Nurcholis 2007: 100), mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan melalui pemerintah daerah akan lebih membantu pemerintah pusat dalam mengontrol pembangunan di daerah.

Hossein dalam nurcholis (2010: 20) Menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengandung tiga artikulasi yaitu:

1. Dalam arti menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya adalah pemerintah daerah disini sebagai badan pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintah di daerah.
2. Merujuk pada arti fungsi/kegiatannya. Pemerintah daerah disini adalah pemerintah daerah yang merupakan bentuk aktifnya. Jadi pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri.
3. Pemerintah daerah diartikan sebagai otonom, yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga yang ada ditingkat daerah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sendiri yang mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal tidak termasuk beberapa urusan yang harus dibicarakan



dulu pada pemerintah pusat terlebih dahulu. Pemerintah daerah yang dimaksud di atas :

1. Pemerintah daerah propinsi yaitu pemerintah provinsi dan DPRD provinsi, yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pemerintah daerah/kota, yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Muluk (2007: 57) menambahkan bahwa pandangan tradisional tentang pemerintah daerah memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan serta bertugas menegakan keadilan secara pasti, sehingga pandangan mengenai pemerintah daerah hanya terbatas. Berbagai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah pusat dan provinsi di serahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk meningkatkan keefisiensi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan suatu badan atau organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pemimpin dan pengatur pemerintah daerah serta berhak menentukan prioritas pembangunan di daerahnya sendiri sesuai potensi yang dimiliki.

2. Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah sangat diperlukan guna menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan peraturan untuk masyarakat. Menurut adam smith dalam muluk (2009:111) pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap



anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti.

Pengertian peran pemerintah di atas menyatakan bahwa hak-hak setiap masyarakat dalam memperoleh perlindungan dari pemerintah. Namun peran pemerintah sangat kompleks sekarang karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berbeda dengan Kuncoro (2004:110), yang menyatakan bahwa peran pemerintah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan terhadap si miskin, namun pemerintah juga bisa saja mengambil peran aktif, seperti mendorong kegiatan swasta dan retribusi aset. Pengertian menurut Kuncoro lebih kompleks daripada pengertian menurut Adam Smith yang hanya meminta perlindungan dari pemerintah saja, peran pemerintah menurut Kuncoro meminta penyediaan kebutuhan publik bagi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi hanya terpaku pada masyarakat miskin saja.

World Bank menjelaskan bahwa peran pemerintah secara umum terdiri dari peran minimal, peran antara, dan peran aktif yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Peran Pemerintah

	Menanggulangi Kegagalan Pasar	Meningkatkan Pemerataan
Peran Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan barang-barang publik 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Manajemen ekonomi makro 5. Penyediaan fasilitas kesehatan public 	<p>Melindungi si miskin: Program pengentasan kemiskinan Bantuan Bencana</p>



	Menanggulangi Kegagalan Pasar	Meningkatkan Pemerataan
Peran Antara	Menanggulangi eksternalitas: 1. Pendidikan dasar 2. Perlindungan lingkungan	Menyediakan asuransi Sosial: Pemerataan pensiun Dana pensiun Tunjangan pengangguran
	Mengatur monopoli: 1. Peraturan jasa umum 2. Kebijakan anti monopoli	
	Mengatasi informasi yang tidak sempurna: 1. Asuransi (kesehatan, jiwa, pension) 2. Peraturan keuangan 3. Perlindungan konsumen	
Peran Aktif	Mengkoordinasi kegiatan swasta: 1. Mendukung fungsi pasar 2. Memberikan inisiatif	Retribusi Aset

Sumber: World Bank (1997)

Bedasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa peran pemerintah tidak hanya ditujukan pada pemenuhan aspek kebutuhan dasar masyarakat, namun pemerintah juga berperan dalam penanganan isu kemiskinan, kesehatan dan pemerataan perekonomian. Hal ini dikarenakan dalam konteks otonomi daerah pemerintah khususnya pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatasi isu-isu yang berkenaan dengan permasalahan masyarakat yang mendasar, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini pemerintah daerah tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat yang mana akan mempermudah dalam mengurus urusan pemerintah daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat.



Peran pemerintah yang begitu kompleks menjadikan dasar pembentukan sebuah pemerintahan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pemerintahan sebelumnya yang masih terpusat diatur langsung dari pemerintah pusat sudah tidak efisien lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Pemerintahan harusnya sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka dari itu terbentuklah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

Asas-asas otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah memiliki asas-asas yaitu:

1. Asas Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara pemerintahan pusat.
2. Asas Desentralisasi adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.
4. Asas Pembantuan adalah asas yang menyatakan turut sertadalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan tertentu di daerahnya sendiri sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah daerah harus bisa



memaksimalkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk memajukan daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah adalah mengatur dan melindungi masyarakat serta sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dengan tetap mengikuti syarat dari pemerintah pusat.

B. Administrasi Pembangunan

1. Administrasi Publik

Administrasi publik sejatinya sudah ada sejak dulu ketika terdapat pembagian status antara pemerintah dengan yang diperintah, apapun bentuknya.

Karena dalam proses memerintah dan melayani masyarakat pastinya dibutuhkan sistem administrasi atau manajemen yang kompleks. Meskipun begitu, ilmu ini baru mulai diajarkan di Universitas di Indonesia pada tahun 1950'an. Literatur kuno administrasi negara dapat dilihat dalam buku pemikiran Confucius, Plato, Machiavelli, De Montesquieu, Roessau, Bonnin, Hegel, Vievin, John Stuart Mill.

Tulisan tersebut telah membuktikan bahwa ternyata administrasi publik sudah sering dibicarakan sebelum berdirinya administrasi publik yang diprakarsai oleh Wodrow Wilson.

Sampai saat ini terjadi beberapa kali pergeseran paradigma Administrasi Publik. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar,



atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah

pada suatu masa tertentu. Menurut Nicholas Henry, terdapat 5 paradigma, yaitu :

1. Paradigma 1 (1900-1926) adalah “dikotomi politik-administrasi negara”. Tokoh yang memperkenalkan adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam “Politics and Administration” berkata bahwa politik sebagai pembuat kebijakan sedangkan administrasi negara adalah pelaksana kebijakan. Administrasi negara harus bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan.
2. Paradigma 2 (1927-1937) disebut “Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara”. Tokoh yang terkait adalah Willoughby, Gullick & Urwick yang dipengaruhi pemikiran Fayol dan Taylor. Prinsip yang diperkenalkan adalah POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).
3. Paradigma 3 (1950-1970) adalah “Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik”. Menurut John Gauss, teori administrasi negara adalah teori politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan.
4. Paradigma 4 (1956-1970) berkembang pemikiran “Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi”. Prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokusnya adalah perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern. Namun lokusnya kurang jelas.
5. Paradigma 5 (1970-sekarang) adalah “Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik”. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen,



Administrasi pembangunan dalam perkembangannya dari disiplin ilmu yang mendahului yaitu administrasi publik atau administrasi negara. Administrasi negara telah berkembang dan menghasilkan paradigma ilmu baru yaitu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan lebih berorientasi untuk mendorong perubahan di masa depan berbanding terbalik dengan administrasi negara yang hanya berorientasi pada masa kini. Ada beberapa ciri yang membedakan administrasi negara atau publik dengan administrasi pembangunan berikut: (Tjokroamidjojo, 1987:9)

Tabel 2. Ciri-Ciri Pembeda Administrasi Publik dengan Administrasi Pembangunan

Ciri Administrasi Negara	Ciri Administrasi Pembangunan
1. Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat Negara maju.	1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda, terutama bagi lingkungan masyarakat Negara baru berkembang.
2. Masih netral terhadap tujuan pembangunan.	2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, bahkan ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat.
3. Lebih menekankan pada orientasi masa kini.	3. Berorientasi untuk mendorong perubahan, atau berorientasi masa depan.
4. Menekankan pada tugas umum dalam rangka pelayanan masyarakat, lebih bersikap sebagai <i>"balancing agent"</i> .	4. Berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah, kemampuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan pelaksanaan yang efektif.
5. Lebih melihat dari keteraturan dari aparatur administrasi itu sendiri.	5. Meningkatkan diri dengan substansi prtumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan pembangunan di berbagai bidang
6. Seakan menempatkan administrator dalam aparatur pelaksana pemerintah.	6. Administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan agen penggerak perubahan.
7. Pendekatan legalitas.	7. Pendekatan lingkungan, berorientasi



kepada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah.

Sumber: Pengantar Administrasi Pembangunan (1987:9)

Perbedaan administrasi negara atau publik dengan administrasi pembangunan dijelaskan bahwa administrasi pembangunan merupakan perkembangan di administrasi negara. Administrasi negara yang lebih memerhatikan negara maju namun administrasi lebih menekankan kepada masyarakat yang berbeda terutama masyarakat di negara berkembang.

Pekembangan dunia mengakibatkan sebuah ilmu atau konsep memaksa harus ikut berubah, dimana konsep administrasi publik yang dipikir masih belum cukup untuk masyarakat maka munculah paradigma baru yaitu administrasi pembangunan yang merupakan perkembangan dari administrasi publik.

Administrasi pembangunan berorientasi proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan yang lebih mengarah ke pertumbuhan yang lebih baik. Proses yang dilakukan haruslah sesuai dengan peraturan dan konsep pembangunan yang ada. Siagian (2012:5) mendefinikan administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangkaian pencapaian tujuan akhirnya. Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses dan usaha pemerintahan suatu negara untuk berkembang ke arah yang lebih baik demi mensejahterahkan masyarakat di negara tersebut.

3. Pengertian Perencanaan Pembangunan



1) Perencanaan

Dalam mencapai tujuan di suatu organisasi perlu adanya suatu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan sebelum kegiatan pokok dilakukan. Perencanaan dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan.

Menurut Tjokroamidjojo (1984:12) perencanaan didefinisikan sebagai;

Suatu proses menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan sumberdaya (termasuk sumberdaya ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai suatu tujuan-tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Dalam perencanaan lebih baik mengedepankan keadaan masyarakat yang ada agar tercapainya tujuan mensejahterahkan masyarakat. Menurut Syamsi (1986:134) perencanaan yang baik dan lengkap haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Apa (*What*), yakni mengenai materi kegiatana apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapai tujuan;
- b. Mengapa (*Why*), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan;
- c. Bagaimana dan Berapa (*How and How much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan, dan dengan dana yang tersedia harus dipertimbangkan;
- d. Dimana (*Where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek);
- e. Kapan (*When*), yaitu pemilihan waktu (*timming*) yang tepat dalam pelaksanaannya;
- f. Siapa (*Who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatana tersebut (subyek pelaksana).

Dari pengertian perencanaan dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan analisis atau merumuskan suatu kegiatan yang



akan terjadi dan dilakukan di masa depan berdasarkan asumsi yang matang dari beberapa fakta yang terbukti dan akurat akan terbukti kebenarannya untuk mencapai tujuan tertentu.

2) Pembangunan

Suryono (2010:1) menyatakan bahwa pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuan, bangkit, berdiri, dan juga berarti bentuk. Pembangunan merupakan kegiatan yang biasanya berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur. Sedangkan menurut Sukirno (1995:13) dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan merupakan suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Menurut Rogers dalam Suryono (2010:3) menyatakan bahwa:

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan, dan berbagai masalah kehidupan lain).

Tujuan mempelajari teori pembangunan sebagai program studi menurut (Suryono 2010:77) secara umum adalah:

- a. Menganalisis kelayakan teori-teori pembangunan yang berkembang selama ini dengan perubahan yang terjadi di masyarakat kontemporer (*theoretical adequacy*)
- b. Membandingkan antara teori dengan kenyataan fakta dan data lapangan (*empirical validity*)
- c. Menganalisis konsistensi dan relevansi teori dengan kebijakan (*policy effectiveness*)
- d. Menjelaskan dan membuktikan seberapa kuat pengaruh teori terhadap metodologi penelitian (*methodological soundness*)
- e. Sebagai landasan kritik teori dan debat teori (*critical theory*)



Teori pembangunan seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dapat digunakan sebagai analisa kelayakan pembangunanyang berkembang pada dewasa ini, pembanding antar teori yang lain, relevansi teori dengan kebijakan yang ada, pembuktian teori dalam petodologi penelitian, dan memberikan kritik dan debat antar teori yang bersangkutan.

Secara khusus tujuan teori pembangunan menurut Suryono (2010:78) selanjutnya antara lain:

- a. Memperkenalkan beberapa teori tentang proses terjadinya *under development* di Negara yang sedang berkembang atau Negara yang sedang membangun
- b. Memperkenalkan beberapa teori tentang bagaimana merubah keadaan *under development* menjadi negaradan masyarakat yang *developed* (maju)
- c. Mengaitkan kajian-kajian teori tersebut dengan fenomena pembangunan yang terjadi.

Di Indonesia sendiri perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bahwa untuk menjadim pembangunan berjalan efisien, dan efektif maka diperlukan Perencanaan Pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam perencanaan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalaian dan pengawasan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah untuk mendapatkan kemajuan yang baik secara sosial maupun material serta untuk mensjehaterahkan masyarakat.



C. Konsep Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut Sulistyani (2004:7) maka menjelaskan pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan, dan proses pemberian daya, kekuatan dan kekuatan dari pihak yang dimiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Menurut shardlow (1998) yang dikutip oleh Rukminto Adi (2008:78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan Kartasamita (1996:45) menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "*people centered, participatory, empowering, and suitable*". Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) atau menyediakan mekanisme mencegah proses



pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternative-alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa lalu.

Selain berbagai pendapat diatas, Sumodiningrat (1999:32) menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat yang senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memperdayakan. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk mengubah masyarakat atau memberikan daya, kekuatan, ataupun kemampuan yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat dan masyarakat menjadi lebih mandiri dalam berbagai aspek.

2. Tujuan Pemberdayaan

Suatu pemberdayaan (*empowerment*) menurut Payne (1997) yang dikutip oleh Rukminto Adi (2008:77) pada intinya, ditujukan guna:

“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients (membantu klien yang memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terikat dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”.



Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Hal ini sesuai dengan Mardikanto dan Sebianto (2012:29) yang menjelaskan bahwasannya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakanga. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan hal tersebut Mardikanto dan Soebianto (2012:111) memaparkan tujuan pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan yakni:

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- b. Perbaikan aksesibilitas artinya dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan artinya dengan berbekal kebaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan artinya dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- e. Perbaikan usaha artinya dengan perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan artinya dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapat keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan artinya dengan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan



lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- h. Perbaikan kehidupan artinya dengan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat dimana keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

3. Proses Pemberdayaan

Kartasmita (1996: 23) menatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: pertama: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (*encourage*) dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta serupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Tjokrowinoto (2001:32) menyatakan bahwasannya meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses pemberdayaan, namun dalam implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam



komunitas yang melakukan penolakan terhadap “pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul.

Pranarka & Vidhyandika (1996:45) menjelaskan mengenai proses pemberdayaan yaitu ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan.

Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Adapun ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan, (2) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (5) bertanggungjawab atas tindakannya.

4. Manfaat Pemberdayaan

Adanya pemberdayaan dapat membuat masyarakat menjadi daya dan melatih kreatifitas sendiri. Jika masyarakat sudah bisa berdaya maka kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera. Menurut Kartasmita dalam Anwa (2007) mengemukakan bahwa proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan berbagai pendekatan salah satunya adalah



pemberdayaan. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu manfaat pemberdayaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini juga diungkapkan oleh Abubakar dkk (2009) menyatakan bahwa:

“proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk dinas atau instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, proses pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya terhadap instansi-instansi pemberi pelayanan.”

Pemberdayaan membuat masyarakat mandiri dalam kemampuan untuk melakukan pekerjaannya setiap hari. Dengan membentuk masyarakat yang mandiri agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Sulistiyani (2004) mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah mandiri dalam kemampuan berpikir untuk mengatasi semua masalah yang ada. Dari pengertian di atas manfaat pemberdayaan adalah agar masyarakat mandiri dan sejahtera.

5. Tahapan pemberdayaan

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap kesadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
 - b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).



Menurut Hogan dalam Adi (2008) pemberdayaan memiliki lima tahapan utama yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan;
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan;
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek;
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan; dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan implementasikannya.

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat yaitu :

“*Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi”

6. Hambatan pemberdayaan

Hambatan pemberdayaan menurut Adi (2008) mengungkapkan bahwa hambatan pemberdayaan yang sering muncul adalah sulitnya untuk menunergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam suatu program terpadu.



Keinginan masyarakat yang berbeda-beda membuat kesulitan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat yang terpadu. Keinginan masyarakat yang berbeda membuat kesulitan menjadikan program pemberdayaan yang terpadu.

Menurut Ife dan Tesoriero (2008) mengemukakan bahwa:

“Pengembangan masyarakat satu dimensi sudah pasti akan gagal karena didasarkan pada pemikiran linear bukan mengambil pendekatan holistic yang mendasarkan pada perspektif ekologis, dengan memusatkan pada satu dimensi, pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusai dan pengalaman masyarakat.”

Dari pengertian di atas mengungkapkan bahwa program pemberdayaan tidaklah haruslah terpadu, tetapi pilih apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Tidak ada lasan berbagai tindakan masyarakat haruslah disnergiskan. Namun, pengertian terpadu maksudnya berarti semua jenis kegiatan pemberdayaan tidaklah dilakukan secara serentak. Pemberdayaan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi.

Adi (2008) mengemukakan bahwa hambatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok dalam komunitas yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi. Kelompok ini masih terbiasa dengan hal yang mereka lakukan dan belum mau berubah, karena takut jika berubah akan mengakibatkan kemunduran. Mereka berpikir bahwa kebiasaan lama tidaklah harus dirubah dan harus tetap dilaksanakan tak peduli perubahan jaman yang terjadi. Selain itu ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah dalam memberikan bantuan membuat semakin terhambatnya mengalami pemberdayaan.



7. Indikator keberhasilan Pemberdayaan

Indikator keberhasilan dalam suatu pemberdayaan ditentukan oleh beberapa hal. Menurut Suharto (2006) mengemukakan indikator pemberdayaan adalah :

1. Kebebasan mobilitas
2. Kemampuan membeli komoditas kecil
3. Kemampuan membeli komoditas besar
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga
6. Kesadaran hukum dan politik
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Menurut Sumodiningrat (1999) indikator keberhasilan dalam program-program suatu pemberdayaan adalah :

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin;
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin ;
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya;
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dari kelompok, makin mudahnya permodalan kelompok, makin rapi sistem administrasi kelompok, serta semakin banyak interaksi dengan kelompok lain di masyarakat.

Dari penjabaran teori di atas dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan adalah meningkatnya produktifitas masyarakat, serta berkurangnya



kemiskinan yang ada di masyarakat untuk menuju kondisi masyarakat yang lebih baik.

C. Industri Kecil dan Menengah

1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan industri besar dan menengah di Indonesia sangat cepat sejak tahun 1970-an melampaui pertumbuhan industri kecil dan Rumah tangga. Meskipun demikian industri kecil dan Rumah tangga memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan jumlah perusahaan, dan menopang pendapatan rumah tangga. Menurut Disperindag bersama dengan Badan Pusat Statistik (2002) industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersil, yang mempunyai kekayaan paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar satu milyar atau kurang.

Industri kecil selama ini mengalami kekaburan definisi dan batasan dikalangan masyarakat. Sementara acuan dan penggolongan yang biasanya dipakai adalah menekankan pada aspek jumlah tenaga kerja dan modal. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa industri kecil adalah usaha perseorangan atau rumah tangga maupun badan yang memiliki kerja antara 5 sampai 9 orang, mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan nilai penjualan pertahun Rp. 1 milyar atau kurang.

Saleh (1986) telah menjelaskan bahwa terdapat tiga industri kecil yaitu:

a. Industri lokal, yaitu kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif



tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas, sehingga pada umumnya mempergunakan sarana transportasi yang sederhana (misalnya: sepeda, gerobak, dan pikulan). Adapun karena pemasaran hasil produknya ditangani sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.

b. Industri yang terkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan atau kawasan produksi yang terdiri dari segi kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas dari pada kategori yang pertama. Sehingga peranan atau pengumpulan menjadi cukup menonjol.

c. Industri mandiri yaitu kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah mempunyai kemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang canggih. Pasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dalam mengakomodasi berbagai aspek modernisasi dan sesungguhnya hanya dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor industri kecil.

Dengan adanya pengelompokan tersebut maka akan mudah mendeskripsikan perananan industri kecil. Pemantauan pengembangan industri juga harus diperhatikan untuk menciptakan kondisi industri yang kondusif

berdasarkan klarifikasi dan tujuannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Industri kecil

dan menengah merupakan suatu kegiatan usaha industri yang memiliki aset sampai dengan 5 milyar rupiah di luar tanah dan bangunan serta beromzet sampai dengan 25 milyar rupiah per tahun.



2. Pengembangan Industri Kecil Menengah

Industri kecil menengah perlu dikembangkan karena dinilai sektor terpenting untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi suatu daerah, yakni pengangguran dan kemandirian daerah dalam perkenomian. Oleh karena itu pengembangan industri kecil sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di daerah setempat. Menurut syarief (1991: 3) pengembangan industri kecil menengah meliputi:

a) Perangkat lunak meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Pembinaan usaha.
- 3) Bantuan promosi dagang.
- 4) Keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha.

b) Perangkat keras meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha kecil dan sentra-sentra industri kecil.
- 2) Bantuan langsung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan permodalan.

Pengembangan industri kecil baik lunak maupun keras diharapkan mampu memberikan dukungan bagi industri kecil di Indonesia. Pengembangan industri kecil menengah di Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan industri yang lebih besar dan berkembang pesat sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang lebih baik. Selain itu pengembangan industri kecil menengah di atas merupakan salah satu alternatif mengatasi permasalahan-permasalahan industri di Indonesia. Selain bentuk-bentuk pengembangan industri kecil menengah juga terdapat strategi pengembangan industri yang diharapkan



memberi dukungan bagi industri kecil supaya lebih berkembang dan bisa bersaing serta dapat mewujudkan tujuan industri kecil menengah itu sendiri.

Dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan tahun 2011-2105 Kabupaten Banyuwangi ada beberapa sasaran yang salah satunya meningkatnya laju pertumbuhan yang memberikan nilai tambah dimana untuk mencapai keberhasilan tersebut harus mencapai sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas produk IKM
2. Pengembangan diversifikasi produk IKM
3. Pengembangan desain produk dan kemasan
4. Peningkatan teknologi bagi IKM
5. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri
6. Jumlah fasilitas dan pendamping untuk IKM
7. Cakupan pembinaan sentra IKM
8. Jumlah yang difasilitasi penerapan standarisasi
9. Jumlah yang difasilitasi perlindungan HKI

Strategi pengembangan industri kecil menengah menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan usaha lain. Hatten dalam Suseno

T.W,dkk (2005), keunggulan kompetitif adalah aspek dari suatu usaha yang dilakukan secara lebih baik dibandingkan usaha lainnya. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif dalam pengembangan industri terdapat strategi yang perlu diperhatikan.

Sjaifudin (1995: 66-75), mengungkapkan bahwa strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil adalah:



1. Strategi peningkatan kemampuan *financial*

Berkembangnya beberapa model penguatan *financial* bagi usahawan kecil akhir-akhir ini telah menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui penyertaan modal sementara.

2. Pengembangan pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi industri kecil. Terdapat tiga cara strategi pemasaran yaitu: a) meningkatkan akses usaha kecil pada pasar, caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak memberikan manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang-kadang juga modal; b) Proteksi pasar; c) Menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing, langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan antara lain penghapusan proteksi *infant industries* (industri kecil) mendorong terciptanya iklim persaingan dalam konteks ini fungsi control sangat diperlukan.

Dalam mewujudkan pengembangan IKM diperlukan peran pemerintah daerah didalamnya, oleh karena itu pengembangan IKM memerlukan adanya bantuan dari pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengembangan IKM di daerahnya masing-masing. Adanya proteksi pasar terhadap IKM dan pelatihan di beberapa IKM serta membantu dalam memasarkan hasil dari IKM dengan harapan industri kecil menengah bisa cepat berkembang pesat dan dapat bersaing dengan pasar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiono (2007:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Melalui metode penelitian tersebut maka peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan secara holistic kepada aktor yang terlibat di Kabupaten Banyuwangi untuk mengetahui peran dan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan industri di daerah tersebut, selanjutnya peneliti mengolah dengan mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi yang telah didapatkan kemudian mendeskripsikan dalam hasil laporan, sehingga hasil yang didapatkan menunjukkan alternatif pemecahan permasalahan yang dialami dengan peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi sehingga penelitian bisa lebih terarah dengan tujuan dan juga dapat menyaring data dan informasi. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Sugiono (2014:34) bahwa fokus penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan,



urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu.

Berdasarkan peran pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi maka peneliti menetapkan fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan Industri kecil dan Menengah sektor batik berdasarkan teori sjaifudin (1995) dilihat dari:

- a) Strategi Peningkatan Kemampuan *financial*;
- b) Pengembangan Pemasaran.

2) Faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik meliputi:

- a. Faktor Pendukung;
- b. Faktor penghambat.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana berlangsungnya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti diharapkan dapat mendapatkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, termasuk lokasi, lingkungan serta kegiatan yang berada didalamnya.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena Kabupaten banyuwangi karena usaha di sektor batik telah mengalami perkembangan jumlah unit. Selain itu pemerintah



daerah Kabupaten Banyuwangi juga gencar-gencarnya mempromosikan batik Banyuwangi. Namun ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha batik di Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menemukan dan mengetahui keadaan objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi;
2. Dinas perindustrian perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi;
3. Tempat-tempat pelaku sentra IKM sektor batik di Kabupaten Banyuwangi (Kecamatan Giri dan Kecamatan Kabat).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumberdata adalah sumber dimana data diperoleh. Sedangkan untuk jenis data dibedakan menjadi data primer dan data skunder. Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian atau dari sumbernya. Data ini nantinya diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu:

- a. Ibu Trivina selaku pendamping diklinik UMKM Kab. Banyuwangi
- b. Bapak Trijoko selaku seksi bidang ILOMETA (Industri,Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan di Kabupaten Banyuwangi.



c. Perwakilan dari pelaku IKM batik adalah Godho batik di Kecamatan Giri, dan Batik Srikandi di Kecamatan Kabat.

2) Data Sekunder

Adalah data yang mendukung data primer, dapat berupa catatan-catatan resmi, makalah serta laporan atau dokumen, data internet, serta data pendukung lainnya. Data sekunder ini dapat diperoleh dari publikasi otentik, baik dari pemerintah maupun publikasi ilmiah.

Adapun batasan dari data sekunder tersebut adalah sepanjang mendukung isi dan pembahasan yang diperlukan dalam penelitian.

Data sekunder yang berupa dokumen, catatan arsip serta laporan-laporan resmi antara lain:

- a) Dokumen formal maupun non formal yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi
- b) Arsip-arsip, dan dokumen maupun laporan yang dapat mengukur keberhasilan pemberdayaan IKM sektor batik.
- c) Buku referensi, jurnal, artikel, maupun situs resmi yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Studi Pustaka, pengumpulan data dilengkapi dengan studi pustaka, berupa bahan-bahan dalam tulisan, buku, majalah, jurna, dokumen atau penjarangan data hasil penelitian.



2) Studi Lapangan, yaitu mengamati dan terjun ke lapangan untuk mengetahui pemberdayaan IKM sektor batik. Studi lapangan ini terdiri dari:

a) Observasi, pengumpulan data dengan cara mengamati langsung masalah dengan menggunakan indra penglihatan dari peneliti. Observasi ini dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam aktivitas masyarakat untuk mendapatkan data akurat tentang pemberdayaan IKM sektor batik di Kabupaten Banyuwangi.

b) Wawancara mendalam, wawancara dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan keterangan lisan, dengancara bertanya langsung kepada informan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran informan, serta mampu untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang diamati oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan cara mendalam kepada informan dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara dan alat perekam.

c) Dokumentasi, peneliti mencari data mengenai hal-hal atau konsep berupa catatan buku, majalah dan sebagainya yang terkait dengan tema pemberdayaan IKM sektor batik.

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Peneliti sendiri, peneliti sebagai instrument pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena obyek yang terjadi dengan dibekali



pengetahuan serta penguasaan terhadap permasalahan yang ingin diteliti.

- 2) Pedoman wawancara (*interview guide*), instrument ini dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
- 3) Catatan lapangan (*field note*) yaitu berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi utama selama peneliti melakukan observasi. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *tape recorder* agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008:91) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

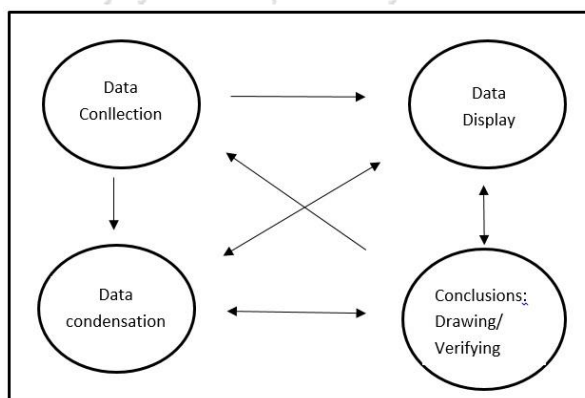
Tujuan dari analisis data adalah untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih berarti dan dapat diinterpretasikan. Sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, maka peneliti menganalisis data maka peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka diadakan



penyusunan, pengolahan, dan interpretasi data dan diambil kesimpulan sementara.

from the start of data collections, the qualitative analyze interpret what thing mean by nothing pattern, explanation, causal flows, and positions. The competent researcher hold these conclusions lightly, maintaining opens and skepticism, but the conclusions are still there, vague at first, then increasingly explicit and grounded "final" conclusion may not appear until data collection is over, depending on the size of the corpus of field notes, the coding storage, and retrieval method used, the sophistication of the researcher: and any necessary deadlines to be met. (dari mulai koleksi data, analisis kualitatif menafsirkan apa yang dimaksud dengan pola mencatat, menjelaskan, grafik, dan proporsi. Peneliti yang kompeten menganggap bahwa kesimpulan ini ringan, menjaga keterbukaan dan skeptis, tetapi kesimpulan masih ada, tidak jelas pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan beralasan. Pada akhirnya kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada bahan dari catatan lapangan, penyimpanan pengkodean, dan metode pengambilan digunakan, kecanggihan peneliti: dan batas waktu yang diperlukan harus terpenuhi).

Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan, kemudian memilih data yang diperlukan, setelah itu data disajikan dalam pembahasan. Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi dari data-data yang telah dikumpulkan.



Gambar 1: Model Analisis Data Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)



Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis daa model Miles, Huberman dan Saldana. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berangsur secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data yang didapat semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui kondensasi data. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2013:11) kondensasi data mencakup pengertian

“The process of selecting, simplify, abstractiong, and/or transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-up field notes, interview transcript, document, and other emperial materials.”

“kondensasi mengacu pada proses penyeleksian, memfokuskan, menyederhanakan, dan abstraksi data yang telah diperoleh mellui catatan yang diperoleh dari lapangan , wawancara dengan narasumber, dokumen dan lain-lain.”

Dengan demikian kondensasi data ini dilakukan secara terus-menerus oleh peneliti, hingga peneliti benar-benar mendapat data yang kuat da terfokus seseuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.



2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah berikutnya setelah kondensasi data adalah penyajian data.

Menurut Sugiyono (2008:95) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Selanjutnya Miles, dkk (2013:12) menyatakan

“Data display is an organized, compressed assembly of information that allows concluding drawing and action.”

“penyajian data adalah proses perorganisasian data, meringkas data terkumpul dari informasi yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.”

Dengan penyajian data, maka akan mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan dalam penyajian data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*. Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk laporan. Penyajian data bersumber dari situs dan lokasi penelitian disajikan sesuai dengan format yang telah dibuat oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak terutama mahasiswa. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi dan diinterpretasikan oleh peneliti juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.



3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh data yang valid dan konsisten saat peneliti terjun di lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

a) Gambaran Geografis Banyuwangi



Gambar 2. Peta Kabupaten Banyuwangi

Sumber : RENSTRA DISPERINDTAM Kabupaten Banyuwangi 2016-2020

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 Km². Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunandengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas



sekitar 127.454,22ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 13 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa.

Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa kegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 70° 43' - 80° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur.

b) Pembagian Wilayah Administratif

Luas Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 Km², dengan pembagian wilayah 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Berikut adalah nama-nama kecamatan di Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 4. Nama Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Pesanggaran	13	Srono
2	Siliragung	14	Rogojampi
3	Bangorejo	15	Kabar
4	Purwoharjo	16	Singojuruh
5	Tegaldlimo	17	Sempu
6	Muncar	18	Songgon
7	Cluring	19	Glagah
8	Gambiran	20	Licin
9	Tegalsari	21	Banyuwangi
10	Glenmore	22	Giri
11	Kalibaru	23	Kalipuro
12	Genteng	24	Wongsorejo

Sumber: data sekunder diolah penulis 2016

c) Keadaan Penduduk

Hasil registrasi penduduk menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2-14 sebesar 1.588.082 jiwa yang terdiri dari 789.924 penduduk laki-laki dan 798.158 penduduk perempuan. Dengan begitu tahun 2014 jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dari jumlah penduduk laki-laki. Berikut tabel tentang jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi tahun 2014:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014



Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pesanggaran	25.743	25.424	51.167
Siliragung	23.866	23.037	46.903
Bangorejo	32.047	31.120	63.167
Purwoharjo	34.310	33.777	66.751
Tegaldlimo	33.723	33.028	66.751
Muncar	67.508	65.501	133.009
Cluring	38.890	38.173	77.063
Gambiran	32.663	32.310	64.973
Tegalsari	24.828	24.274	49.102
Glenmore	37.571	37.631	75.202
Kalibaru	32.073	32.179	64.252
Genteng	45.086	44.352	89.438
Srono	47.892	46.679	94.571
Rogojampi	48.727	49.136	97.863
Kabat	36.707	36.218	72.925
Singojuruh	26.012	26.036	52.048
Sempu	40.793	39.961	80.754
Songgon	28.465	28.274	56.739
Glagah	17.326	17.691	35.017
Licin	14.205	14.033	28.238
Banyuwangi	57.076	58.132	115.208
Giri	14.698	14.793	29.491
Kalipuro	39.878	39.465	79.343



Wongsorejo	38.769	38.358	77.127
Jumlah	838.856	829.582	1.668.438

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2015

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi berdiri pada tanggal 5 September 2011 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 48 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan. Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan dalam melaksanakan tugas dituntut melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan (DISPERINDAGTAM) Kabupaten Banyuwangi menerapkan visi sebagai berikut “Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan berbasis pada paguyubanpotensi lokal sebagai penggerak perkenomian menuju masyarakat yang sejahtera”. Visi tersebut dapat diwujudkan dengan merumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas bagi organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah



setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat di daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

DISPERINDAGTAM Kabupaten Banyuwangi menerapkan misinya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan peningkatan kemandirian dan daya saing usaha berbasis pendayagunaan potensi lokal.
- 2) Mewujudkan peningkatan iklim usaha yang kondusif, tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- 3) Mewujudkan penataan kawasan pertambangan, peningkatan nilai tambah hasil pertambangan, pemanfaatan air tanah dan pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan.
- 4) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan profesionalisme SDM aparatur.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan perangkat daerah yang baru perubahan dari Dinas Perindustrian dan, perdagangan Perdagangan dan Pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran pembangunan perindustrian, perdagangan dan pertambangan mengacu pada visi dan misi DISPERINDAGTAM yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2016-2021. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan dan perdagangan yang berkualitas dan inklusif.

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut:

Sasaran :

a. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang berkualitas

b. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan yang berkualitas

c. Menurunnya kesenjangan pendapatan industri kecil dan menengah antar wilayah

d. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik

Berikut adalah struktur organisasi DISPERINDAGTAM Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:



- 1) Dinas perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan terdiri dari:
 - a) Kepala Dinas;
 - b) Sekertariat;
 - c) Bidang Perindustrian;
 - d) Bidang Perdagangan;
 - e) Bidang standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - f) Bidang Pertambangan;
 - g) UPTD; dan
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekertariat membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
- 3) Bidang perindustrian membawahi:
 - a) Seksi Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan
 - b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil, dan Aneka
- 4) Bidang Perdagangan membawahi:
 - a) Seksi Perdagangan Dalam negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar negeri;
- 5) Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen membawahi:
 - a) Seksi Standarisasi dan HAKI;
 - b) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrlgian.
- 6) Bidang Pertambangan mebahawi:
 - a) Seksi Pertambangan Umum dan Energi;
 - b) Seksi Pengolahan Air Dalam Tanah.

Berdasarkan susunan di atas, bidang yang terkait dengan perkembangan usaha batik adalah bidang perindustrian pada sub bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka atau disingkat ILOMETA. Adapun tugas ILOMETA adalah sbegai berikut:

- a. Menyusun rencana seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. Menyusun pedoman bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, dan proses produksi industri logam, elektronika, tekstil dan aneka;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan proses produksi industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;



- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian pencemaran industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- e. Melakukan kegiatan pendampingan terkait penguasaan manajerial usaha industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- f. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pemrosesan perizinan industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- g. Melakukan fasilitas pemberian modal penyertaan industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- h. Melakukan fasilitas kerjasama usaha dengan dunia usaha industri logam, mesin, elektronika, tekstil, dan aneka;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada daerah.

3. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah atau Diskop IKM Kabupaten Banyuwangi terletak di alamat JL. Laksana Adi Sucipto No.76 Banyuwangi. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupetan Banyuwangi memiliki Visi

“terwujudnya badan usaha, koperasi dan UMKM yang mandiri, beradaya saing menuju kesejahteraan masyarakat Banyuwangi”. Visi dinas Koperasi dan UMKM di atas akan dijabarkan lagi menjadi beberapa misi adalah sebagai berikut:

- a. Membangun kemandirian Koperasi melalui peningkatan dan pengembangan kualitas SDM pengelola badan usaha koperasi dan UMKM;
- b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen, proses, standarisasi, teknologi, sarana dan prasarana usaha, permodalan, promosi, dan pemasaran serta kerjasama kemitraan badan usaha Koperasi dan UMKM dengan badan usaha lainnya;
- c. Memperluas pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan pendayagunaan kekuatan potensi-potensi koperasi dan UMKM untuk memberikan nilai tambah yang tinggi dengan tetap berwawasan lingkungan; dan
- d. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif untuk kegiatan usaha koperasi dan UMKM guna memperlancar pergerakan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.



Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi dan UMKM, untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM diatur dalam peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Banyuwangi. Adapun susnan organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari:
 - a) Kepala dinas;
 - b) Sekretariat;
 - c) Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d) Bidang Usaha Koperasi;
 - e) Bidang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah;
 - f) UPTD;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
 - a) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan usaha bagi UMKM
 - b) Penyelenggaraan promosi porduk UMKM dengan sub kegiatan:
 1. Penyelenggaraan promosi produk UMKM di outlet Ketapang
 2. Fasilitas promosi produk UMKM
 3. Promosi produk UMKM di Smesco Jakarta
 - c) Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal sub kegiatan pengadaan asept tenda UMKM
- 3) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif IKM dengan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi telah mendirikan klinik UMKM.

Klinik koperasi dan UMKM didirikan merupakan salah satu upaya pemerintah



Kabupaten Banyuwangi untuk memberdayakan usaha lokal khususnya koperasi dan UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Klinik koperasi dan UMKM memiliki tugas fungsi yang sebagai berikut:

Tabel 6. Tugas Klinik UMKM dan Koperasi

No	Petugas Pelaksana	Tugas
1	Tugas Pendamping IKM pada Koperasi dan UMKM	Memberikan informasi promosi dan layanan konsultasi bisnis kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan UMKM;
2	Tugas Pendamping Informasi dan Teknologi pada Klinik Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginformasikan dan mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan menengah (IKM) melalui teknologi dan informasi internet sehingga bisa diakses oleh dunia usaha; b. Melaporkan hasilnya setelah selesai kegiatan kepada pihak kesatu; dan c. Tugas-tugas lainnya yang berkaitan klinik Koperasi dan UMKM
3	Tugas Pendamping Koperasi pada Klinik Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan layanan konsultasi manajemen organisasi koperasi; b. Memberikan layanan konsultasi manajemen keuangan/akutansi koperasi; c. Memberikan layanan Bintek, Diklat dan pendampingan pada Koperasi; d. Memberikan layanan mediasi permasalahan Koperasi; e. Memberikan layana penyaluhan perkoperasian; dan f. Memberikan layanan seminar perkoperasian.
No	Petugas Pelaksana	Tugas
4	Tugas Operator Klinik Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengolah data hasil kegiatan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KIKM); b. Menginformasikan produk-produk pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Internet;



		c. Mengakses informasi bisnis dunia usaha; dan d. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Klinik KIKM.
5	Tugas Pengemudi	Mengemudikan mobil Klinik Koperasi dan UMKM sesuai dengan jadwal kegiatan Klinik Koperasi dan UMKM keliling.

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi diolah (2016)

4. Gambaran Umum IKM Batik Banyuwangi

Potensi IKM di Kabupaten Banyuwangi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, mengingat IKM dalam pemasaran lokal maupun regional mampu menyerap banyak tenaga kerja. Industri Kecil dan Menengah mampu membawa pengaruh positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Banyuwangi hal tersebut ditunjukkan pada jumlah IKM maupun tenaga kerja yang terserap telah mengalami kenaikan di tahun 2016 dibandingkan dengan kondisi tahun 2015. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyuwangi, jumlah IKM pada tahun 2015 sebanyak 23.348 unit dan pada tahun 2016 sebesar 29.774 unit, sedangkan tenaga kerja sebanyak 40.117 orang pada tahun 2015 dan 66.338 orang pada tahun 2016. Peningkatan jumlah IKM dan tenaga kerja yang terserap menjadi bukti bahwa IKM di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan yang bagus. Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2014 hingga 2015 dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 7. Potensi IKM Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
		2015	2016	2015	2016



1	Wongsorejo	311	323	1.156	1.171
2	Kalipuro	818	875	2.419	2.528
3	Licin	195	198	464	488
4	Glagah	342	352	1.445	1.556
5	Giri	111	113	384	385
6	Banyuwangi	642	691	2.286	2.407
7	Kabat	1.114	1.154	2.660	2.822
8	Rogojampi	2.345	2.371	7.684	7.707
9	Songgon	556	577	1.479	1.572
10	Sempu	938	985	1.854	1.861
11	Singojuruh	399	403	985	1.042
12	Srono	2.822	2.929	8.013	8.550
13	Cluring	450	484	1.346	1.350
14	Gambiran	516	537	2.154	2.169
15	Genteng	1.252	1.316	3.418	3.678
16	Glenmore	761	814	3.485	3.764
17	Kalibaru	330	338	1.118	1.202
18	Tegalsari	298	308	1.063	1.140
19	Muncar	1.602	1.615	9.829	9.937
20	Tegaldlimo	761	814	4.748	4.784
21	Purwoharjo	380	383	1.433	1.543
22	Bangorejo	339	344	839	852
23	Siliragung	493	512	1.131	1.189
24	Pesanggaran	488	551	1.909	1.974



Jumlah	18.305	18.987	63.302	65.635
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Dinas perindustrian, perdagangan dan pertambangan Kabupaten Banyuwangi 2017

Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah IKM dan tenaga kerja yang terserap di tahun 2016 mengalami peningkatan daripada tahun 2015.

Peningkatan jumlah unit IKM di tiap tahun dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Potensi IKM di Kabupaten Banyuwangi layak mendapatkan perhatian yang lebih dalam pengembangan dan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar mempunyai daya saing.

Batik Banyuwangi merupakan hasil proses penurunan warisan keahlian dari jaman kerajaan. Menurut pak TJK (L:48 tahun) selaku kepala bidang ILOMETA di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perdagangan menyatakan bahwa:

“Ketika Kerajaan Blambangan sekarang Banyuwangi dikalahkan oleh oleh Mataram sekitar abad 15, banyak orang-orang sini dibawa ke sana untuk dijadikan pekerja salah satunya yaitu jadi tukang membatik terus mereka kembali lagi ke sini untuk mengajari mereka membatik.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Sehingga batik Banyuwangi merupakan warisan leluhur bangsa yang sampai saat ini dilestarikan oleh masyarakat dan harus didukung oleh pemerintah daerah setempat.

IKM batik Kabupaten Banyuwangi awalnya dulu pertama kali ada di kelurahan Temenggungan. Menurut pernyataan pak TJK (L:48 tahun) selaku kepala bidang ILOMETA di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Perdagangan menyatakan bahwa :

“Batik awalnya dulu di Kelurahan Temenggungan yang mengawali persebaran industri batik di Banyuwangi, nah dari situ nanti tersebar lagi ke



berbagai daerah di Banyuwangi, karena mereka para karyawan mulai buat batik sendiri di daerahnya masing-masing.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Pernyataan di atas ditambah oleh Ibu HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik

Srikandi menyatakan bahwa :

“Dulu saya karyawan di batik virdes, terus keluar sekitar setahun kemudian pinjam modal ke ibu saya untuk mendirikan batik sendiri, nah emang dulu di Temenggungan awalnya pengrajin batik di Banyuwangi mas.” (wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 12.00 di rumahnya)

Pengrajin batik awalnya ada di Kelurahan Temenggungan dan mulai tersebar di beberapa daerah Kabupaten Banyuwangi, karena banyak karyawan yang keluar untuk mendirikan batik sendiri.

Jumlah IKM batik di Banyuwangi mengalami peningkatan dikarenakan banyak karyawan yang membuat batiknya sendiri. Awalnya peningkatan jumlah IKM batik Banyuwangi hanya di Temenggungan, tetapi sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Banyuwangi. Persebaran jumlah IKM batik Banyuwangi dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 8. Potensi IKM batik

Kecamatan	Jumlah IKM batik	
	2015	2016
Cluring	3	5
Kabat	6	9
Banyuwangi	4	4
Licin	40	40
Rogojampi	3	3
Singojuruh	1	2



Siliragung	1	1
Kalipuro	7	9
Songgon	1	3
Glagah	1	3
Muncar	1	1
Giri	7	8
Sempu	7	8
Genteng	1	2
Jumlah	83	98

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan diolah oleh penulis 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah IKM batik beberapa daerah memiliki kenaikan di beberapa kecamatan. Data di atas menunjukkan kenaikan jumlah IKM dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kenaikan jumlah IKM batik di Banyuwangi merata di beberapa daerah. Adanya kenaikan jumlah IKM membuat peneliti tertarik meneliti batik di Banyuwangi.

B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam

Pemberdayaan IKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IKM) sektor batik di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan jumlah unit usaha. Salah satu usaha pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan IKM batik adalah dengan mendirikan klinik Koperasi dan UMKM.

Klinik ini sama seperti dengan klinik kesehatan pada umumnya, yang mengobati



orang sakit tetapi klinik UMKM bertujuan untuk membantu IKM yang sedang sakit, maka klinik UMKM bersedia membantu untuk memberikan pelayanannya.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping di klinik UMKM yang menyatakan bahwa:

“Klinik UMKM sendiri bertugas untuk mendata IKM mana saja yang sedang mengalami kesulitan dan kita bantu dengan memberikan sosialisasi, bahkan gak jarang mereka datang kesini untuk melakukan konsultasi tentang masalah yang terjadi. Yang banyak ya konsultasi tentang modal mas ya jadi kita bantu bagaimana caranya meminjam uang di bank tata caranya gimana gitu.”(wawancara dilakukan 20 Desember 2016 pada pukul 10.00 wib di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pernyataan tersebut ditambahi oleh HN (L:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi yang menyatakan bahwa:

“Mobil klinik UMKM biasanya datang seminggu sekali mas cuman data di kita apa yang kurang dan apa saja yang dibutuhkan, kita juga suka konsultasi ke sana.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember 2016 pukul 10.00 wib



dirumahnya)

Gambar 4. Mobil Klinik UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM 2017

Dinas koperasi dan UMKM serta dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan sama-sama bekerja sama dalam memberdayakan IKM batik. Dinas perindustrian Perdagangan dan Pertambangan yang bertanggungjawab atas pemberdayaan IKM batik sesuai dengan Renja tahun 2016 salah satu isu yang



diangkat adalah batik yang dijadikan OVOP (One Village One Product)

Kabupaten Banyuwangi yang perlu ditingkatkan lagi dan dikembangkan baik

secaraintensifikasi maupun ekstensifikasi. Isu yang diangkat dari Renja Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan ini ditambahi dengan pernyataan

dari TJK (L:48 tahun) selaku Seketariat bidang Industri Logam Mesin Tekstil dan

Aneka yang menyatakan bahwa:

“Kalau pemberdayaan dari dinas sini untuk industri batik tiap tahun ada, tiap tahun tuh ada karena kita mengakses dari hasil musren ya musrenbangdes dan cam terus tingkat kabupaten mesti ada tiap tahun.”(wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 10.00 di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan).

Pernyataan diatas ditambahi oleh Tri (P:35 tahun) selaku pedanmping di

klinik UMKM yang menyatakan bahwa:

“Kalo di sini kita sebagai Pembina mas dan bekerja sama di Dinas Perindustrian untuk masalah pemberdayaan batiknya kita serahkan pada mereka, kita kebagian kuliner, tapi kita tetap ikut andil dalam memberikan pemberdayaannya.”(wawncara dilakukan pada tanggal 21 Desember 2016 pada pukul 10.00 di Kantor Dinas koperasi dan UMKM)

Dinas Perindustrian yang bertanggung jawab penuh dalam mengembangkan

IKM batik sedangkan Dinas koperasi dan UMKM membantu dalam pembinaan

yang salah satunya adanya klinik UMKM. Petugas klinik yang merupakan

daerahnya sendiri menyediakan pelayanan pemberdayaan dan konsultasi bagi

seluruh masyarakat yang akan berwirausaha maupun masyarakat yang sedang

menjalankan IKM, sehingga bukan hanya berperan mengatasi masalah IKM,

tetapi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat. kesediaan pelayanan

pemberdayaan masyarakat diberikan kepada masyarakat di beberapa daerah di



Kabupaten Banyuwangi melalui kegiatan seminar dengan mendatangi secara langsung daerah tersebut.

Strategi pemberdayaan IKM dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan beserta pihak lain yang memberdayakan IKM batik. Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut dilakukan dengan cara pengembang usaha, koordinasi dan pengendalian, kemitraan dan perizinan. Perda di atas dapat diambil beberapa sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberdayaan IKM adalah:

a) Strategi Peningkatan Kemampuan *financial*

Industri Kecil dan Menengah (IKM) sektor batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi mengalami perkembangan usahanya. Pemerintah daerah berupaya untuk mengembangkan usaha yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan usaha merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan Daerah tersebut mengatur apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM di Kabupaten Banyuwangi.



kualitas berarti sudah pernah mengikuti kegiatan semula kita tingkatkan mungkin pewarnaannya ya mungkin desainnya.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Hal serupa juga diutarakan oleh TRI (P:35 tahun) selaku pendamping IKM di Klinik UMKM:

“Di IKM ada pelatihan dengan pelatihan membuat jadi pelaku IKM yang sudah ahli membuat kita melatih teman-teman ada dua pelatihannya yaitu melatih keahlian baru maupun yang sudah bisa membuat tapi belum membuat dengan benar kita melatihnya.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kemampuan para pengrajin batik. Tidak jarang pelatih yang diundang adalah pengrajin batik yang sudah maju batiknya seperti di daerah Pekalongan yang lebih maju dalam urusan batik. Hal itu disampaikan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik dari batik Srikandi mengatakan bahwa:

“ada pelatihan batik mas kegiatannya cara nyanting yang bagus cara mewarnai dari kain putih sampai sudah jadi batik itu mas dan juga pelatihnya dari daerah lain seperti pekalongan yang batiknya sudah maju duluan mas.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 12.00 di rumahnya)



Gambar 5. Pelatihan Desain Batik Baru Banyuwangi

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM 2017

Pengembangan usaha dalam IKM tidak hanya mengembangkan segi kualitas saja, tetapi teknologi yang digunakan oleh pelaku usaha juga termasuk dalam pengembangan usaha. Masih banyak IKM di Banyuwangi yang menggunakan teknologi tradisional. Pengembangan teknologi yang lebih modern dapat lebih mempercepat pengerjaan batik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan teknologi pembuatan batik agar lebih modern dan mempermudah pembuatan batik Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang industri Logam Mesin tekstil dan aneka di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan.

“Ya teknologi untuk batik sendiri seperti teknologi batik yang biasa saja tapi kita memberi sentuhan pada pewarnaan untuk menggunakan pewarnaan alami kemudian kami perbaiki di *painting* dan *design* sedangkan untuk canting listrik sudah kompor listrik juga sudah, dulu banyak yang pake kompor minyak tanah sekarang sudah listrik semuanya.”(wawancara



IKM batik Kabupaten Banyuwangi dalam permodalan para pengrajin batik

mencari modal sendiri. Para pelaku IKM mendapatkan modalnya secara mandiri dengan meminjam di bank. Pemerintah Banyuwangi hanya memfasilitasi atau membantu dalam pengurusan surat-menyurat untuk meminjam modal di bank. Pemerintah Banyuwangi khususnya klinik UMKM membantu dengan memberikan akses peminjaman modal. Seperti yang dikatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping di klinik UMKM mengatakan bahwa:

“Khusus dipermodalan bukan dinas koperasi dan UMKM memberikan modal tapi kita bantu biasanya IKM gak tau akses modal seperti apa terus bagaimana keperbankan nantinya kita fasilitasi pelayanan bukan memberikan modal, jadi termasuk dalam perijinannya biasanya IKM tidak tau atau belum tau biasanya pasih yang dibutuhkan dalam permodalan itu di dalam perijinannya maupun yang lain kita damping disitu ini dan prosesnya ini, jadi klinik UMKM sebagai layanan konsultasi.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal senada juga disampaikan oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang industri Logam Mesin tekstil dan aneka di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan menyatakan bahwa :

“Permodalan mandiri jadi pemerintah daerah dalam hal ini disperindag tidak memberikan modal tetapi memfasilitasi apabila dia untuk mendapatkan ijin dari perbankan kita memfasilitasi mungkin kalo dia membutuhkan surat keterangan dan sebagainya kita memfasilitasi tapi setelahnya kita serahkan pada perbankan.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Modal merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pelaku IKM. Tanpa modal IKM tidak akan berjalan semestinya. Modal juga awal dari produksi batik agar tetap berjalan dan tetap produksi seperti biasa. Awal produksi IKM akan kekurangan dana dan mencari pinjaman dari bank. IKM ketika pemesanan batik melebihi kemampuan modal untuk memproduksi maka IKM akan pinjam ke bank.



Hal itu telah dikatakan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi menyatakan bahwa :

“gini mas karena biasanya pembatik itu kan ada modal usaha dipilahkan sendiri karena dulu seperti itu akhirnya kadang pinjam tapi ya kadang kurang karena pesannya banyak dan masih banyak batik yang belum jalan, produksi terus tapi masih kurang modal, kemarin saya baru pindah kesini jadi butuh modal lagi ini mau kredit lagi mas karena modal usaha tidak satu dua kalo satu sih bisa tapi nanti tidak bisa berkembang mas.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumahnya

Hal senada juga dinyatakan oleh Fr (L:48 tahun) selaku pemilik Godho batik yang menyatakan bahwa:

“Biasanya pemesanan batik yang banyak kita kekurangan modal mas jadinya ya pinjem mas di bank, kayak sekarang ini ada pesanan yang banyak modale kene kurang ya kita pinjam di bank kurangnya berapa untuk pinjam syarat-syarat yang diperlukan kita penuhi kayak SIUP dan segala maceme kita penuhi dan baru bisa kita pinjam di bank, pokoke syarat-syarat yang diperlukan ada gampang nyilihe mas.”(wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya)

b) Pengembangan Pemasaran

Meningkatkan penjualan IKM salah satu strategi yang dilakukannya adalah pemasaran. Adanya pemasaran dapat meningkatkan penjualan untuk IKM batik. Pemerintah daerah bisa membantu pemasaran agar penjualan IKM meningkat, karena adanya pemasaran yang tepat sasaran maka batik Banyuwangi akan dikenal oleh masyarakat luas di luar Banyuwangi. Pemasaran yang tepat sasaran juga dapat membantu pemesanan untuk IKM batik tidak hanya di dalam Banyuwangi saja tetapi di luar Banyuwangi juga.

Pemerintah Banyuwangi telah menggunakan strategi dalam pemasaran untuk batik dengan cara mengikuti event-event di dalam maupun di luar daerah. Event di Kabupaten Banyuwangi sendiri yang menjadi ajang pemesanan untuk



batik se-Kabupaten Banyuwangi adalah Batik Banyuwangi Festival atau disingkat

BBF. BBF merupakan salah satu strategi pemasaran pemerintah daerah untuk

batik Banyuwangi. BBF diadakan setiap setahun sekali sebagai ajang untuk

pengrajin batik dalam memasarkan hasil karya mereka. Hal tersebut sesuai apa

yang diucapkan oleh dengan TJK (L:48 tahun) dari Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Pertambangan sebagai seksi bidang industri Logam Mesin

tekstil dan aneka di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan yang

menyatakan bahwa:

“Kalau kita membantu memfasilitasi ya memberikan ruang pameran kita ada ruang gedung untuk jualan dan pameran, pameran seperti pameran lokal, provinsi maupun nasional tiap tahun ada maupun promosi yang lain seperti kita fashion di Jakarta kita ambil desainer dan modeling terkenal untuk fashion di BBF salah satu promosi yang lainnya.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)



Gambar 6. Pagelaran Batik Banyuwangi festival (BBF)

Sumber: Dokumenter Penulis 2016

Adanya pameran batik salah satunya BBF berdampak pada terlahirnya

inovasi baru dalam desain batik. BBF tiap tahunnya sudah berganti tema dan

menampilkan desain-desain IKM yang baru dan masih bagus. Terlahirnya desain

baru membuat orang akan penasaran dengan batik Banyuwangi yang beragam



desainnya. Hal itu dituturkan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping IKM di

Klinik UMKM mengatakan bahwa:

“Ketika ada event tersebut contoh BBF kita buat tema pemerintah membuat tema entah tahun ini temanya gajah oling tahun depan ganti lagi, nah itu disitu temen-temen IKM sudah membuat inovasi apasih tahun depan motifnya diangkat pasti disitu orang-orang maupun di instansi pemerintah maupun swasta pasti akan mencari motif batik itu karena sebagai ajang kepuasan sendiri, oh ya karena kalau tidak ada event seperti itu orang-orang akan berpikir untuk apa batik untuk apa kita beli batik.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Event BBF diharuskan diikuti oleh semua pengrajin batik karena ini adalah acara yang dikhususkan pengrajin batik Banyuwangi. Selain sebagai ajang pembuktian desain batik yang terbaik juga sebagai ajang promosi untuk batik Banyuwangi. Adanya BBF juga sebagai penyemangat untuk para pengrajin batik

agar bisa memenangkan event tersebut dan mempromosikan IKM batiknya. Hal tersebut seperti dituturkan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi Menyatakan bahwa:

“BBF diharuskan karenakan yang punya gawe orang Banyuwangi jadi pengrajin batik harus ikut mas, yang pertama inggih mempromosikan batiknya menampilkan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai faktor penambah semangat terkadang batik iku menang apik iki batike oh batik iku kalah batik iki elek padahal semua pembatik itu memaksimalkan desainnya ya menambahlah pemasaran jadi sangat ramai.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di Rumahnya)

Selain event Batik Banyuwangi Festival di Kabupaten Banyuwangi ada tempat untuk menampung hasil produksi IKM yaitu Banyuwangi mall. Banyuwangi mall adalah tempat wadah bagi para pelaku IKM untuk menaruh hasil produksinya tetapi harus memiliki ijin dari pihak Banyuwangi mall. Jika IKM sudah memiliki ijin dan memenuhi syarat untuk menjual hasil produksinya maka akan diberikan tempat di Banyuwangi mall. Klinik UMKM juga



memberikan pendampingan kepada IKM yang masih belum bisa memenuhi syarat

untuk menempati Banyuwangi mall tersebut. seperti yang dikatakan oleh Tri

(P:35 tahun) selaku pendamping IKM dari klinik UMKM yang menyatakan

bahwa:

“Kalau kendala dipemasaran kita kan punya Banyuwangi mall sudah tau kan nah jadi dia seller kita upgrade kalau sudah memenuhi standarnya Banyuwangi mall maka bisa bergabung , tetapi jika belum maka kami akan dampingi dan ikutkan ke beberapa pameran-pameran.””(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal serupa dinyatakan oleh Frm (L:48 tahun) selaku pemilik Godho arum

batik yang menyatakan bahwa:

“Kita punya stand di Banyuwangi mall mas jadinya kita gak kesulitan untuk menjualkan batik-batik kita karena di Banyuwangi mall sudah ada standnya dan gak kesulitan untuk memasarkan batik kita yang penting syarat-syarat yang diperlukan untuk jualan di sana sudah cukup ya bisa jualan di sana. Kita juga ikut BBF mas kan wajib itu jadi biar tahu desain mana yang paling bagus diantara batik Banyuwangi.” (wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pada pukul 10.00 wib di rumahnya)

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IKM) dipengaruhi oleh

beberapa faktor baik yang sifatnya mendukung maupun yang sifatnya

menghambat. Adanya faktor tersebut secara langsung atau tidak langsung mampu

mempengaruhi perkembangan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi. Faktor

pendukung harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk

mencapai tujuan dalam pengembangan IKM, sedangkan faktor penghambat harus

segera diatasi agar lebih mudah dalam mencapai pengembangan IKM batik.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Faktor Pendukung



“Klinik UMKM itu berfokus pada permodalan, perizinan dan pemasaran, nah jadi ketika pelaku IKM sedang ada masalah atau informasi yang sekiranya merugikan mereka bisa konsultasi disini tugas klinik UMKM sebagai penyambung untuk diikutkan acara festival dan pameran.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal serupa dinyatakan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik Srikandi

yang menyatakan bahwa:

“Kita kalau masalah perizinan sama surat-surat minta sama klinik UMKM dan mereka yang mengurusnya kita dibantu dalam mengurus surat-surat itu mas. Makanya kita kalau mau pinjem ya urus-urus suratnya disitu.” (wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumahnya)

Klinik UMKM selain sebagai tempat konsultasi, juga mengikutsertakan beberapa IKM batik untuk mengikuti beberapa pameran untuk mengembangkan IKM tersebut. Pameran yang dibicarakan bisa berasal dari dalam daerah maupun di luar daerah, klinik UMKM akan mengikutkan para pelaku IKM agar dapat mengikuti pameran. Klinik UMKM akan memeriksa apakah IKM yang akan diikutkan merupakan hasil produksi sendiri atau mengambil dari luar daerah, karena yang akan diambil untuk mengikuti pameran adalah hasil dari produksi sendiri bukan menjual barang yang diambil dari luar.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain mengadakan dan mengikutsertakan IKM batik ke pameran juga membuat batik Banyuwangi sebagai *icon* Kabupaten Banyuwangi. Batik Banyuwangi digunakan seragam untuk dinas dan sekolah di Banyuwangi. Dinas dan sekolah negeri di Kabupaten Banyuwangi di hari tertentu memakai batik Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Tri (P:35 tahun) dari pendamping Klinik UMKM yang menyatakan bahwa:



“Setiap tahunnya diwajibkan menggunakan batik khas Banyuwangi untuk pemerintah daerah pun batik sebagai ikon, digunakan untuk seragam jadi itu adalah bentuk pemberdayaan pemerintah terhadap pelaku IKM batik bayangkan aja kalo satu orang kita kan menggunakan batik hari senin kalau di bulan desember hari senin rabu kamsi jum’at sebelumnya itu menggunakan hari rabu-jum’at sabtu satu orang aja gak mungkin punya satu batik pasti lebih dari satu nah itu dalam bentuk pemberdayaannya.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Hal serupa dinyatakan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik Batik Srikandi yang menyatakan bahwa:

“Dari pemerintah biasanya dipesenin batik mas untuk rumah sakit dan sekolah-sekolah katanya. Nah dari situ kita dapat penghasilan tambahan mas kan biasanya di sekolah-sekolah kalo pas masuk arek anyar pesen batik dibuat seragam sekolah mas.(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Ibu Hani)

Hal berbeda dinyatakan oleh Bapak Frm (L:48 tahun) memiliki Godho arum batik yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah ya mas ambil batiknya ya yang bagus dan yang maju saja mas, jadinya beberapa batik yang baru dan belum tahu apa-apa ya hanya bisa berusaha sendiri di kita sendiri belum pernah pemerintah ambilnya jadi kita berusaha sendiri mas, kalo pemerintah gak ambil di kita ya gapapa kan masih banyak pembatik di Banyuwangi yang bagus-bagus.” (wawancara pada tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya)

Dari wawancara oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya klinik UMKM merupakan salah satu cara pemerintah daerah memberikan dukungan untuk IKM batik. Klinik UMKM yang berfungsi sebagai tempat konsultasi untuk IKM yang sedang butuh bantuan.

2) Penggunaan Teknologi yang Lebih Modern

Teknologi dalam produksi IKM sangatlah penting untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Teknologi modern jauh lebih menghemat waktu dan biaya



Gambar 7. Pengrajin batik Banyuwangi menggunakan canting elektrik

Sumber: Dokumentasi penulis 2016

Pembaharuan teknologi batik seperti canting listrik dan kompor listrik sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Bapak Trijoko IKM sudah banyak menggunakan canting listrik untuk menggambar batik. Tetapi walau sudah menggunakan canting listrik pengrajin batik belum terbiasa dengan hal tersebut. Pengrajin batik banyak yang kembali lagi ke canting tradisional karena belum terbiasa dengan canting elektrik sehingga penggunaan canting elektrik lebih lama daripada canting tradisional. Hal itu telah disampaikan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik dari batik Srikandi mengatakan bahwa:

“arek-arek pernah make canting listrik tapi arek-arek gak begitu senang lebih suka canting biasa kelamaan katanya ma enak manual kalo sewaktu dibawa pelatihan enak mas makenya karena tidak biasa make canting listrik arek-arek mas.”(wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2016 pukul 10.00 di rumahnya)

Dari wawancara oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi modern seperti canting elektrik sudah digunakan oleh IKM di Banyuwangi. Ada beberapa yang masih belum terbiasa dikarenakan penggunaannya lebih lama daripada canting tradisional. Pengrajin juga ada yang sudah bisa menggunakan karena penggunaannya lebih efisien.

3) Ketersediannya Bahan Baku

Proses produksi untuk IKM mudahnya mendapatkan bahan baku sangat berperan untuk cepatnya produksi. Jika mudah mendapatkan bahan baku maka produksi dalam pembuatan batik akan jauh lebih cepat. Bahan baku untuk batik sendiri dulu sangatlah sulit didapatkan, karena harus pesan langsung ke daerah lain seperti Pekalongan. Jauhnya mendapatkan bahan baku dan masih belum



adanya agen khusus yang mendistribusikan bahan baku langsung ke Banyuwangi

membuat proses produksi sangatlah lama. Seperti yang dinyatakan oleh TJK

(L:48 tahun) yang menyatakan bahwa:

“Bahan baku sarana untuk batik baik kain maupun pewarna masih beli di Jawa Tengah, Jogja dan Bali karena masih belum adanya agen khusus yang menjual bahan baku di Banyuwangi.” (wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Pernyataan di atas menyatakan bahwa untuk mendapatkan bahan baku

produksi batik sangatlah sulit karena harus pesan dari luar daerah. Namun untuk

sekarang untuk mendapatkan bahan baku tidaklah sulit karena sudah ada agen

khusus yang menyediakan bahan baku batik. Warna Asri merupakan agen yang

menjual khusus bahan baku batik yang didatangkan langsung dari Jawa Tengah

Jogja dan Bali. Adanya agen khusus penjual bahan baku batik ini dapat

meringankan kebutuhan akan bahan baku batik di Banyuwangi. Hal ini tidak

sesuai dengan yang dikatakan oleh HN (P:45) yang menyatakan bahwa:

“Bahan baku untuk sekarang mudah mendapatkannya ada yang sekarang di warna asri mulai dari pewarna samapi selengkapny kalau dulu kita pesan di Pekalongan sekarang tidak karena di sini sudah ada banyak pembatik maka otomatis buka toko untuk pembatik di sini kan bisa jadi gak kesulitan.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember 2016 pukul 11.00 di Rumahnya)

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menghambat produksi hasil

IKM akan menjadi lebih lama. Selain itu faktor penghambat mempengaruhi

perkembangan IKM batik. Faktor penghambat sangatlah menurunkan

produktifitas untuk batik. Pemerintah daerah haruslah mengurangi atau



menanggulangi faktor penghambat agar tidak memperlambat perkembangan IKM

batik di Banyuwangi. Faktor penghambat tersebut antara lain:

1) Kurangnya Inovasi dalam Desain Batik

Desain dalam batik sangat mempengaruhi peminat untuk membeli batik tersebut. Desain batik jika dibuat lebih menarik lagi maka banyak orang yang lebih tertarik dengan desain batik tersebut. Desain batik Banyuwangi masih desain yang hanya bersifat umum saja belum punya desain baru. Pengrajin batik di Banyuwangi masih belum bisa membuat desain baru. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku Pendamping IKM di Klinik UMKM yang menyatakan bahwa:

“IKM batik masih stagnan di situ saja mas, karena kreatifitas pengrajin batik itu dia kan harus tau caranya desain dengan benar, desain untuk lengan juga masih kesusahan para pembatik jadi para pelaku batik belum bisa desain hanya secara global saja, desain yang itu-itu saja.”(wawancara tanggal 20 Desember 2016 pukul 09.30 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pemerintah Banyuwangi berusaha untuk mengembangkan desain batiknya agar lebih menarik dan tidaklah terlihat umum. Setiap tahun pemerintah daerah mencoba memperbarui desain batik dengan cara mengikutkan pada lomba-lomba dan pameran di luar daerah. Desain baru yang digunakan untuk mengikuti pameran diharapkan masyarakat luar daerah lebih tertarik dengan batik Banyuwangi.

Seperti yang dinyatakan oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang Industri Logam Tekstil dan Aneka di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan yang menyatakan bahwa :

“Kita akui desain para pembatik masih umum tapi rencana ke depan terus kita tingkatkan baik itu peningkatan kualitas diri desain batik sendiri maupun pemasarana ke luar negeri pameran tiap tahun kita memperbarui desain melalui lomba-lomba kita sekarang sedang mempersiapkan kurang



lebih enam puluh desain baru motif batik jadi Banyuwangi melalui kegiatan tiap tahun ada baik pelajar mahasiswa maupun umum.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)



Gambar 8 Desain Batik Banyuwangi
Sumber : Dokumentasi Penulis 2017

Pernyataan di atas ditambahkan oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik batik

Srikandi menambahi dengan:

“Desain *digawe* batik masih sama mas desainnya dan masih belum dirubah untuk desain karena desainnya kata orang-orang yang beli bagus jadinya gak saya buat baru untuk desainnya mas.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Ibu Hani)

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Frm (48 tahun) selaku pemilik

batik Godho arum yang menyatakan bahwa:

“Kalo jualan batik mas lek desain kuwi harus diperbarui dan harus ada perubahan mas, agar orang yang mau membeli karena ada inovasi mas. Sebetule kita belajar desain dari pembatik daerah lain mas makanya kita tahu desain-desain baru. (wawancara tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Firman di kecamatan Giri).

2) Tenaga Kerja Produksi

Tenaga kerja untuk pembatik di Banyuwangi saat ini masih kekurangan tenaga kerja. Para pelaku usaha batik sedang kesusahan karena pesanan untuk



batik sendiri dari pemerintah daerah yang banyak jadi kesusasahan memenuhi

permintaan yang banyak. Maka dari itu tenaga kerja untuk produksi sangat

dibutuhkan dan juga ketika musim hujan telah memperlambat pengeringan batik.

Lamanya waktu produksi dapat membuat pemasaran terhambat. Hal ini telah

dinyatakan oleh Tri (P:35 tahun) selaku pendamping IKM di klinik UMKM yang

mengatakan bahwa:

“Informasi yang saya tahu justru mereka sekarang kuwalahan untuk pemesanan batik karena pegawai dinas maupun instansi yang didukung pemerintah itu adalah kan gak mungkin beli seragam satu pasti kan bareng nah SDM yang ada di batik contohnya kalo dia batik tulis itu masih kesusasahan pembatiknya, bisa sanggup memenuhi tapi pengerjaannya lama terus dan mereka keluhannya masih pada ketika musim hujan seperti ini terus ketika barang dan produksinya setengah jadi masuk belum kering.”(wawancara dilakukan tanggal 20 Desember pukul 09.00 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)

Pernyataan di atas telah ditambah oleh TJK (L:48 tahun) selaku seksi bidang

Industri Logam tekstil dan Aneka di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Pertambangan yang menyatakan bahwa:

“Kita perlu tenaga pencanting untuk tahun ini karena tenaga kerja pencanting terutama sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemesanan yang tiap tahun meningkat, makanya tiap tahun kita menyetak tenaga kerja kalo itu sudah terwujud banyak mungkin persaingan harga akan ditekan dan batik Banyuwangi akan jadi lebih murah.”(wawancara dilakukan tanggal 19 Desember pukul 09.00 di kantor DISPERINDAGTAM)

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh HN (P:45 tahun) selaku pemilik

batik Srikandi yang menyatakan bahwa:

“Sekarang lagi kesusahan mas nyari pekerja buat pembatik. Ada sih mas beberapa tapi masih baru dan belum bisa membatik sama. Orang membatik kan harus telaten nah banyak pekerja yang belum telaten untuk membatik apalagi pembatik baru.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Ibu Hani)



Dari pernyataan di atas ditambahi oleh bapak Firm (L:48 tahun) selaku

pemilik batik Godho arum yang menyatakan bahwa:

“Belajar batik kudu telaten mas dan sekarang lagi butuh-butuhnya pekerja mas tapi kalo gak telaten untuk belajar batik kita gak bisa ambil mas makanya kita selalu telat terus dalam menyelesaikan pesanan mas.”(wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumah Bapak firman di Kecamatan Giri)

Univ 3) Rendahnya Daya saing IKM Batik

Meningkatnya jumlah IKM batik di Banyuwangi akan menurunkan permintaan produk-produk di IKM tersebut. banyaknya jumlah IKM batik di Banyuwangi akan menyebabkan kemudahan dalam mendapatkan batik, dimana hal ini menjadi permasalahan karena apabila permintaan batik di pasaran lokal semakin menurun sedangkan jumlah IKM batik semakin bertambah maka IKM batik banyak yang mengalami kerugian. Kerugian tersebut karena modal yang digunakan untuk membiayai pekerja yang sudah terlanjur dikontrak menjadi pekerja tetap.

Produk batik Banyuwangi saat ini masih kalah pamor dengan batik di daerah Yogyakarta. Produk khas batik Banyuwangi dari segi harga masih sangat jauh berbeda dengan batik khas Yogyakarta dan Madura. Menurut Tri (P:35 tahun) selaku pendamping di Klinik UMKM menyatakan bahwa:

“Dari harga untuk bersaing dengan daerah lain kita masih belum mampu dengan batik luar daerah seperti Yogya Madura. Itu dikarenakan gaji pekerjanya rata-rata jauh lebih murah dengan kita. di Madura saja cuman Rp20.000,-. Banyuwangi sendiri masih sangat sulit mendapatkan pekerja dengan bayaran seperti itu bahkan Rp50.000,- masih sulit makanya harga batik kita jauh lebih mahal.”(wawancara dilakukan tanggal 20 Desember pukul 09.00 di kantor Dinas Koperasi dan UMKM)



Pernyataan diatas sesuai dengan yang dinyatakan oleh HN (P:45 tahun)

selaku pemilik batik Srikandi:

“Batik Banyuwangi dari kita walau sudah di pesan dari daerah lain tapi kita masih kalah dengan batik dari daerah lain semisal batik Yogja dan Pekalongan kan batik Banyuwangi masih baru jadi ya susah untuk saingan dengan batik daerah lain yang sudah terkenal apalagi harganya yang masih mahal.”(wawancara dilakukan tanggal 27 Desember pukul 11.00 di rumah Bu hani)

Hal tersebut ditambahi oleh Frm (L:48 tahun) selaku pemilik batik Godho

Arum menyatakan bahwa:

“Iya mas banyak yang pesen batik Banyuwangi di daerah lain tapi ya tapi kita masih kalah pamor sama batik Jogja dan batik Pekalongan. Batik kita kan masih baru-baru ini pamor mas jadinya ya masih sulit bersaing dengan batik lain.”(wawancara dilakukan tanggal 31 Desember 2016 pukul 10.00 di rumah Bapak Firman di Kecamatan Giri).

C. Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data yang dikumpulkan dengan metode (observasi, wawancara, dan dokumentasi), data kemudiann dinalisis dan diinterpretasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini ditunjukkan untuk dapat menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi dalam upaya pemerintah daerah dalam program pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

Berikut ini analisis data yang dimaksud:

1. Analisis Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Program Pemberdayaan IKM Batik di Banyuwangi

a) Strategi Peningkatan Kemampuan *Financial*

Menurut Mardikanto dan soebianto (2012) pemberdayaan memiliki beberapa tujuan perbaikan salah satunya adalah perbaikan usaha yang artinya dengan perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan akseibilitas, kegiatan



dan perbaikan kelembagaan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Teori di atas menjelaskan bahwa perbaikan usaha digunakan untuk memperbaiki pendidikan para pelaku IKM. Memperbaiki pendidikan adalah salah satunya dengan pelatihan terhadap pelaku IKM. Peneliti menemukan berfokus pada perbaikan usaha terhadap IKM batik yang mana batik Banyuwangi semakin berkembang tiap tahunnya.

Peneliti menemukan bahwa pelatihan untuk IKM batik di Banyuwangi dilakukan setiap setahun sekali. Pelatihan untuk IKM dilakukan karena masyarakat meminta pelatihan tersebut ketika adanya musrenbangdes khususnya para pengrajin batik meminta adanya pelatihan agar para pembatik lebih ahli lagi dalam membatik. Setiap tahun dari hasil musrenbang para pengrajin diberi pelatihan untuk membatik. Pelatih yang diundang oleh pemerintah biasanya pelatih dari luar daerah yang di daerah tersebut batiknya sudah berkembang dan terkenal salah satunya yaitu Purwakarta dan Solo. Pelatihan yang dilakukan oleh para pengrajin yang sudah berpengalaman dan tempat usaha batiknya sudah maju terlebih dahulu agar batik yang dihasilkan jauh lebih bagus.

Pengrajin batik yang sudah terampil dan dalam membatik juga jauh lebih baik dari sebelumnya, maka diharuskan untuk melatih pengrajin batik dari IKM lain untuk membatik. Pemerintah menyarankan agar para pembatik di Banyuwangi yang sudah dilatih oleh pembatik dari daerah lain agar melatih para pembatik di Banyuwangi yang belum bisa membatik dengan benar. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk para pembatik yang sudah terampil dan yang masih belum bisa membatik dengan benar. Perbaikan usaha yang dilakukan



oleh pemerintah daerah Banyuwangi dengan memberikan pelatihan membuat untuk para pengrajin pembatik seharusnya bisa membuat kemampuan untuk membuat bisa meningkat dan memberikan dampak yang baik untuk IKM batik.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain dalam melakukan pelatihan untuk membuat, juga melatih dalam penggunaan teknologi terbaru untuk membuat seperti misalnya canting elektrik. Modernisasi untuk IKM batik diupayakan agar pengerjaan dalam membuat jauh lebih cepat dan efisien dalam waktu. Penggunaan teknologi baru dalam membuat seperti canting elektrik dapat mempermudah dan mempercepat membuat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus bisa melakukan sosialisasi untuk penggunaan canting elektrik ini. Masih ada beberapa IKM batik yang belum terbiasa dengan canting elektrik dikarenakan masih kurangnya latihan untuk penggunaan canting elektrik tersebut. Penggunaan canting elektrik dapat menghemat waktu, tapi karena masih menggunakan canting tradisional waktu yang dibutuhkan lebih lama. Para pengrajin batik mengaku masih lebih mudah menggunakan canting tradisional daripada canting elektrik karena hanya berlatih beberapa kali ketika pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Banyuwangi. Pengembangan teknologi untuk membuat yang seharusnya memberikan kemudahan dalam membuat

Permodalan merupakan masalah utama yang dihadapi kebanyakan IKM, menurut Tambunan (2002), permodalan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh IKM di Indonesia. Berdasarkan konsep di atas sesuai dengan keadaan IKM batik di Banyuwangi. Permodalan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh IKM batik di Banyuwangi. Kebanyakan pelaku IKM batik



Banyuwangi dalam melakukan produksi kekurangan modal ketika jumlah pemesanan lebih banyak. Kurangnya modal dalam usaha batik untuk produksi membuat produksi batik akan terhambat. Terhambatnya produksi membuat pengembangan IKM juga terhambat.

Pelaku usaha batik dalam memproduksi batik membutuhkan modal yang tidak sedikit dan sering kekurangan modal ketika akan memproduksi. Pelaku usaha batik dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan cara meminjam modal ke bank. Pemerintah daerah dalam permodalan tidak memberikan bantuan secara langsung, melainkan membantu dengan cara memberikan sosialisasi kepada pelaku IKM tentang peminjaman bank serta membantu dalam kelengkapan surat untuk meminjam di bank. Pemerintah daerah telah menuntut pelaku IKM batik untuk mandiri dalam permodalan hanya bisa membantu dalam kelengkapan surat saja untuk mempelancar peminjaman modal di bank.

IKM batik Banyuwangi dituntut untuk mandiri akan modal, maka dari itu banyak IKM yang sudah mandiri dalam permasalahan modal. Menurut Purwanti (2012) dalam konsep indikator kemandirian IKM dari segi kemampuan modal disebutkan bahwa, “pelaku IKM mandiri dari segi permodalan apabila mampu dalam ketersediaan modal usaha, mampu memenuhi syarat untuk modal usaha, mampu mengatasi permasalahan permodalan, dan mampu menyerap permodalan dari pihak luar.” Dari indikator di atas pelaku IKM batik Banyuwangi sudah memenuhi indikator yang ada di atas karena modal usaha untuk IKM batik merupakan modal sendiri dari pelaku IKM batik tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah untuk modal.



Kemandirian IKM dalam permasalahan modal dapat berdampak positif pada perkembangan IKM itu sendiri agar tidak selalu bergantung pada pemerintah daerah. Dengan adanya kemandirian akan modal maka akan dapat mengurangi ketergantungan pelaku IKM batik dengan pemerintah daerah. Klinik UMKM Banyuwangi harus tetap memperhatikan kebutuhan akan modal untuk perkembangan IKM dan membantu ketika kesulitan dalam mencari modal. Pelaku IKM batik juga harus sering mencari informasi dalam mendapatkan modal untuk produksi di klinik UMKM. Dengan demikian menurut analisis peneliti perlunya kerja sama antara pelaku IKM dengan instansi daerah setempat untuk mendapatkan modal dan perlunya kemudahan informasi yang jelas bagaimana mendapatkan modal tersebut.

b) Pengembangan Pemasaran

Konsep strategi pemberdayaan IKM, menurut sjaifudin (1995) dalam Firmansyah (2014) dijelaskan bahwa, dalam strategi pemberdayaan IKM terdapat dua strategi pemasaran. Kedua pemasaran tersebut yaitu yang *pertama* adalah meningkatkan akses usaha kecil kepada pasar, dan yang *kedua* adalah proteksi pasar dengan mengusahakan keberhasilan mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh usaha kecil.

Upaya pemerintah daerah Banyuwangi dalam memasarkan hasil produksi IKM batik sudah sesuai dengan strategi di atas. Akses untuk memasarkan hasil IKM batik pemerintah daerah banyuwangi sudah melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya Banyuwangi Mall yang menjadi tempat untuk menjual hasil produksi IKM batik di Banyuwangi. Adanya Banyuwangi Mall



mempermudah akses IKM batik untuk menjual hasil produksinya. Pemerintah Banyuwangi juga membantu IKM yang belum mendapatkan izin untuk memasarkan produknya dibantu perijinannya agar bisa lebih mudah dalam perijinannya.

Selain dengan adanya Banyuwangi Mall, IKM batik juga diikuti beberapa event-event pameran di daerah Banyuwangi maupun pameran yang ada di luar daerah. Salah satunya yaitu Batik Banyuwangi Festival yang diadakan di Kabupaten Banyuwangi. Event ini digunakan untuk ajang memerikan bagi pelaku IKM batik sekaligus memasarkan hasil desain produksinya. Event yang diadakan setahun sekali ini mendapat respon positif dari pelaku IKM batik yang berguna untuk memasarkan produksinya. Pelaku IKM batik diwajibkan mengikuti event ini karena event ini merupakan wadah promosi yang bagus dalam memasarkan produksinya. Hasil event BBF juga menjadi tolak ukur akan kemampuan desain IKM tersebut dan sebagai penyemangat untuk IKM batik agar bisa mendesain batik lebih bagus lagi.

Dari hasil penelitian selain melalui akses tempat pemasaran seperti Banyuwangi Mall dan event-event pameran batik, pemerintah Banyuwangi juga melakukan pemasaran dengan memakai produk-produk batik Banyuwangi hasil produksi IKM batik di Banyuwangi. Instansi-instansi daerah seperti rumah sakit, sekolah, dinas dan lain-lain telah menerapkan pemakaian batik hasil produksi IKM batik Banyuwangi di hari tertentu. Pemakaian batik oleh instansi daerah dengan ini merupakan salah satu upaya daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mempromosikan batik Banyuwangi.



Pemasaran memang menjadi salah satu cara yang cepat untuk mengembangkan IKM batik. Pemasaran yang tepat sasaran akan keadaan dan kebutuhan IKM akan membuat perkembangan IKM jadi lebih baik. Pemasaran dapat meningkatkan permintaan batik Banyuwangi dan karena itu akan meningkatkan hasil produksi. Pemerintah daerah dalam melakukan pemasaran dengan memberikan akses untuk memasarkan produk batiknya dan memakai hasil produksinya untuk meningkatkan penjualan serta merupakan salah satu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Memberikan akses untuk media pemasaran serta menggunakan barang hasil produksi IKM batik Banyuwangi merupakan cara pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan IKM batik dengan pemasaran. Upaya yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkkn IKM dengan melalui pemasaran sudah cukup baik. Akses pemasaran di Banyuwangi Mall sudah mempermudah untuk memasarkan barang produksi IKM batik dan adanya festival batik di dalam maupun di luar daerah mempermudah untuk memamerkan hasil produksinya tersebut. penggunaan barang produksi IKM batik untuk instansi daerah merupakan juga salah satu cara pemasaran untuk IKM batik.

Menggunakan barang hasil produksi IKM batik Banyuwangi dapat membantu memasarkan batik Banyuwangi yang sebagai ikon baju dinas di Banyuwangi.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pemberdayaan

IKM Batik

a) Faktor Pendukung

1) Dukungan dari Pemerintah Daerah



Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah menyatakan :

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Dari isi undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah wajib membangun daerah karena adanya otonomi yang membebaskan para pemerintah mengeksploitasi sumber daya yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah Banyuwangi memberikan berbagai kebijakan untuk memajukan daerahnya khususnya di bidang IKM batik. Kebijakan oleh pemerintah daerah di bidang

IKM batik cukup beragam salah satunya adalah Klinik UMKM. Klinik UMKM mengontrol dan memberikan arahan kepada IKM yang sakit untuk mengembangkan IKM. Bantuan dari klinik UMKM dapat membantu memajukan IKM tersebut. Klinik UMKM merupakan salah satu dukungan pemerintah daerah Banyuwangi untuk memberdayakan IKM batik di Banyuwangi. Klinik UMKM mengurus semua perizinan, permodalan dan pemasaran untuk IKM.

Kuncoro (2014) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan si miskin namun pemerintah juga bisa saja mengambil peran aktif seperti mendorong kegiatan swasta dan retribusi aset. Adanya Klinik UMKM dapat membantu para pelaku IKM untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan IKM yang ada. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik sangat penting, contohnya pemasaran yang dilakukan pemerintah daerah



Kabupaten Banyuwangi yaitu mengikutsertakan batik-batik Banyuwangi ke beberapa event daerah maupun luar daerah. Mengikutsertakan batik Banyuwangi dalam beberapa event dapat memberikan dampak yang besar dalam peningkatan pendapatan IKM batik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selain dengan pemasaran lewat event-event batik juga telah menerapkan peraturan pemakaian batik di berbagai instansi daerah dan dinas. Adanya peraturan tersebut dapat memberikan dampak juga pada penjualan batik Banyuwangi.

Selain pemasaran dengan adanya perizinan dan pengendalian oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dapat mempermudah pemerintah untuk mengontrol dan memonitor IKM batik yang ada di Banyuwangi. Hal tersebut berguna untuk mengetahui berbagai macam hal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan masalah yang akan menimpa IKM batik. Maka dengan begitu ketika suatu IKM batik mengalami kemunduran ataupun kemajuan pemerintah daerah dapat dengan mudah menganalisis dan memberikan solusi agar pengembangan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Perizinan dan pengendalian dalam hal ini diatur oleh Klinik UMKM.

2) Penggunaan Teknologi yang lebih Modern

Menurut Suparyanto (2012) yang menjadi kelemahan aspek manajemen operasi dalam IKM salah satunya adalah teknologi yang digunakan relatif rendah. Teknologi memiliki peran penting dalam proses produksi di industri ataupun IKM. Teknologi juga mempengaruhi cepat atau tidaknya IKM untuk berkembang menjadi lebih maju. Semakin maju teknologi yang digunakan untuk proses produksi maka akan semakin cepat dan efisien produksinya. IKM batik di



Banyuwangi dalam produksi batik sebagian besar sudah menggunakan teknologi yang maju dalam membatik seperti canting elektrik. Penggunaan canting elektrik memudahkan para pengrajin batik untuk membatik karena lebih efisien waktu dan tidak perlu memakan banyak tenaga.

Pelaku IKM batik di Banyuwangi sudah banyak menggunakan pembaharuan teknologi membatik, walaupun masih ada beberapa IKM yang belum menggunakan teknologi baru untuk membatik tapi sudah banyak IKM batik yang menggunakan teknologi tersebut. IKM yang belum menggunakan teknologi baru dalam membatik mengaku belum terbiasa dengan teknologi tersebut dan masih menggunakan teknologi yang lama. Pemerintah daerah masih kurang dalam sosialisasi penggunaan teknologi maju dan para pengrajin batik masih kurang pengalaman dalam penggunaan teknologi ini, meski begitu dengan adanya pembaharuan teknologi untuk alat-alat membatik dapat mempercepat produksi IKM batik.

Sosialisasi dalam penggunaan teknologi diperlukan oleh para pengrajin batik untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam produksi batik. Sudah ada beberapa IKM batik yang menggunakan teknologi baru dan sudah lebih efektif dalam pengerjaan produksinya tersebut. Adanya teknologi baru dapat mempermudah untuk pemberdayaan bagi para pelaku IKM batik. Pengrajin batik haruslah sudah bisa menguasai beberapa teknologi baru dalam membatik agar lebih mudah dalam pengerjaan produksi batik. Pemberdayaan dengan menggunakan teknologi membatik yang lebih maju sebagai fokus utama dapat mempermudah pelaku IKM dalam membatik.



3) Bahan Baku Melimpah

Menurut Tambunan (2002), masalah dasar IKM di Indonesia adalah selain karena sumber daya manusia, yaitu masalah sulitnya mendapatkan bahan baku.

Sulitnya mendapatkan bahan baku menjadi penghambat pengembangan IKM di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi sendiri dulu masih kesulitan dalam mendapatkan bahan baku batik. Bahan baku batik Banyuwangi diambil dari Pekalongan dan Bali, karena jauh jarak bahan baku tersebut dan belum ada orang yang menyuplai bahan baku batik maka perkembangan IKM juga terhambat dengan bahan bakunya yang sulit terjangkau.

Sekarang sudah ada toko yang menyuplai bahan baku batik tersebut, maka dari itu bahan baku yang dulu sulit didapatkan sekarang dapat dengan mudah didapatkan melalui toko penyuplai bahan baku batik. Toko itu ada karena banyaknya IKM batik yang berdiri di Kabupaten Banyuwangi, maka dari itu Kabupaten Banyuwangi membutuhkan toko yang menyediakan bahan baku batik, karena untuk memenuhi permintaan IKM batik di Banyuwangi akan bahan baku yang semakin banyak. Toko suplaier ini telah menyediakan bahan baku batik yang sudah lengkap mulai dari “malam”, kain, pewarna alami dll. Sudah tersedia di toko tersebut.

Pelaku IKM sudah tidak perlu untuk membeli bahan baku dari luar daerah karena sudah ada toko bahan baku batik di Banyuwangi. Adanya toko ini dapat mempermudah dalam pengembangan IKM karena bahan bakunya yang melimpah dan cara mendapatkan bahan baku juga sekarang sangat mudah.

Menurut pemerintah daerah Banyuwangi bahan baku di Banyuwangi masih sulit



didapatkan, tapi kenyataannya sekarang sudah cukup mudah mendapatkan bahan baku batik karena sudah ada toko bahan baku batik. Pemerintah harus sering-sering mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan terkait dengan adanya bahan baku batik yang ternyata didapatkan dengan mudah.

b) Faktor Penghambat

1) Kurangnya Inovasi dalam Desain Batik

Menurut Machfoedz (2011) sebab kegagalan IKM salah satunya adalah sulit melakukan perubahan. Dalam IKM batik yang dimaksud perubahan adalah inovasi dalam desain batik. Desain dalam suatu karya menjadi daya tarik sendiri untuk para konsumen. Semakin menarik desain sebuah karya maka semakin tertariklah konsumen untuk membeli suatu karya tersebut. Hal ini juga termasuk pada batik, jika desain batik semakin menarik maka banyak pembeli yang akan membeli batik tersebut. Batik Banyuwangi sendiri untuk saat ini masih belum bisa berinovasi dalam batik. Desain batik Banyuwangi masih menggunakan desain batik yang lama dan belum diperbarui. Inovasi dalam desain dibutuhkan untuk memberikan hasil produksi batik yang beragam. Masih banyak IKM yang hanya menggunakan batik hanya sebagai pakaian saja dan belum adanya inovasi dengan produk selain pakaian.

Belum adanya inovasi baru dalam desain batik Banyuwangi mengakibatkan sulitnya berkembangnya IKM batik Banyuwangi. Pemerintah daerah dalam hal ini sudah mengetahui hal tersebut dan akan menyiapkan desain-desain baru untuk batik Banyuwangi. Desain tersebut digunakan untuk memperbarui desain batik Banyuwangi yang sudah lama, namun pelaku IKM batik masih belum terbiasa



dengan desain baru dan masih menggunakan desain yang lama. Penggunaan desain yang lama bagi para pelaku IKM batik menyebabkan terhambatnya pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

2) Tenaga Kerja Produksi

Tenaga kerja dalam sebuah usaha merupakan hal yang terpenting karena tenaga kerja yang menjalankan sebuah produksi sebuah usaha. Kebutuhan akan tenaga kerja dalam suatu usaha tergantung pendapatan usaha tersebut, jika pendapatan di usaha tersebut, jika dalam usaha pendapatnya besar dan permintaannya juga banyak maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak, begitu juga sebaliknya jika pendapatan suatu usaha sedikit dan permintaan akan barang produksi itu sedikit maka tenaga kerja produksi yang dibutuhkan juga kecil. Peneliti mengungkapkan di Banyuwangi permintaan batik semakin meningkat maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin besar mengingat permintaan juga semakin meningkat.

Tenaga kerja dibutuhkan untuk memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi dan menjalankan proses produksi dalam suatu industri. Tenaga kerja jika semakin banyak maka semakin cepat pula untuk menyelesaikan hasil produksi, tetapi itu tidak efisiensi harga karena dengan banyaknya tenaga kerja maka pengeluaran untuk gaji semakin besar dan harus disesuaikan dengan pendapatan agar bisa seimbang dengan pengeluaran. Tenaga kerja jika terlalu sedikit maka akan terlalu memakan waktu lama walaupun mengurangi biaya pengeluaran gaji. Jumlah tenaga kerja haruslah sesuai kebutuhan dan keinginan produsen agar tidak



terjadi pengeluaran gaji yang besar atau waktu yang terlalu lama dalam produksinya.

Meningkatnya permintaan terhadap batik Banyuwangi akan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja produksi, namun tenaga kerja untuk membatik sangat sulit didapatkan di Banyuwangi. Tenaga kerja yang ada bayarnya cukup mahal dan mengakibatkan harga batik Banyuwangi menjadi lebih mahal dari batik dari daerah lain. Selain mengakibatkan daya saing dengan batik daerah lain menjadi lebih rendah juga akan mengakibatkan penurunan permintaan. Penurunan permintaan akan mengakibatkan terhambatnya pemberdayaan IKM batik.

Permintaan yang meningkat sedangkan tenaga kerja yang sedikit akan mengakibatkan lamanya pengerjaan batik. Ketika pengerjaannya jauh lebih lama dengan pengerjaan yang biasanya maka banyak pelaku IKM yang menolak untuk pemesanan selanjutnya dan akan tetap mengerjakan pemesanan batik yang sebelumnya. Akibat dari kurangnya tenaga kerja produksi untuk batik melambat dan pengerjaannya kurang tepat waktu apalagi ketika cuacanya sedang tidak mendukung maka waktu pengerjaan produk jauh lebih lama seperti biasanya.

Kurangnya tenaga kerja produksi yang terampil membuat kesulitan untuk memberdayakan IKM.

3) Daya Saing Rendah

Menurut Tambunan (2001) daya saing suatu keunggulan pembeda dari yang lain terdiri dari *comperative advantage* (faktor keunggulan komparatif) dan *competitive advantage* (faktor keunggulan kompetitif). Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi yang dinamakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang



merupakan tantangan bagi para pelaku IKM. Para pelaku IKM dituntut agar bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi agar tidak kalah dengan produk dari negara-negara ASEAN yang lainnya. Adanya MEA tersebut, menurut peneliti berdampak pada daya saing batik Banyuwangi kepada pasar menjadi rendah. Batik Banyuwangi yang masih tergolong baru di masyarakat luas dibandingkan dengan batik dari batik daerah lain yang sudah maju terlebih dahulu, selain itu harga batik Banyuwangi yang masih tergolong mahal karena biaya gaji untuk karyawan pembatik masih mahal dan masih kurangnya tenaga kerja produksinya. Maka dari itu daya saing batik Banyuwangi masih rendah dan masih belum terkenalnya batik Banyuwangi di masyarakat luas membuat daya saing masih tergolong rendah.

Tantangan yang selain dari MEA dan daya saing dengan produk batik dari daerah lain, menurut peneliti berkembangnya jumlah IKM batik di Kabupaten Banyuwangi yang menyebabkan persaingan di Kabupaten Banyuwangi semakin tinggi. Banyaknya jumlah IKM batik di Banyuwangi menunjukkan pada dasarnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi sudah semakin pesat, tetapi para pelaku IKM batik di Banyuwangi tidak mampu bersaing dengan sesama pelaku IKM batik, sehingga pasti dari salah satu IKM mengalami penurunan produksi dan permintaan batik. Persaingan di daerah sendiri mengakibatkan akan adanya IKM yang menurun perkembangannya. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya suatu keberdayaan para pelaku IKM batik untuk tumbuh berkembang dan mandiri, karena kemampuan mereka bersaing kurang berdaya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan oleh peneliti di bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Kabupaten Banyuwangi

a. Strategi Peningkatan Kemampuan *Financial*

Pemberdayaan IKM batik dilakukan dengan cara melatih para pengrajin

IKM batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi tiap tahunnya. Adanya

musrenbangdes dapat membantu terlaksananya pelatihan untuk IKM

batik karena banyak masyarakat yang meminta adanya pelatihan

membatik. Pelatihan membatik dilaksanakan dengan mendatangkan

para pelatih dari luar daerah. Pemerintah Banyuwangi juga melakukan

pelatihan untuk penggunaan teknologi baru dalam membatik salah satu

contohnya canting elektrik yang dapat memudahkan dan memberikan

efektivitas waktu. Perbaikan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki

kualitas dan ketepatan waktu dalam membatik. Modal yang didapatkan

oleh para pelaku IKM batik di Banyuwangi merupakan modal mandiri

dan tidak dibantu secara langsung oleh pemerintah daerah. Pelaku IKM

batik dalam mendapatkan modal yaitu dengan cara kredit di bank.

Peminjaman yang diperoleh dari IKM batik merupakan usaha mandiri

dari IKM itu sendiri. Pemerintah Banyuwangi membantu untuk



kepengurusan surat untuk kebutuhan kredit yang akan dilakukan oleh IKM, serta memberikan sosialisasi untuk IKM batik tentang kredit di bank. Kemandirian IKM batik dalam permodalan membuktikan bahwa pelaku IKM dalam permodalan tidak bergantung terus dengan bantuan modal pemerintah.

b. Pengembangan Pemasaran

Pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi untuk IKM batik dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan cara diadakan event-event dan pameran untuk batik. Salah satu event yang menjadi ajang promosi batik di Kabupaten Banyuwangi yaitu Batik Banyuwangi Festival (BBF) yang diadakan setiap setahun sekali di Banyuwangi. Adanya BBF dapat menunjang penjualan produk untuk batik Banyuwangi. Pemerintah Banyuwangi selain dengan mengikutsertakan IKM batik ke event local seperti BBF juga mengikutkan IKM batik ke event di luar daerah untuk mempromosikan pada luar daerah mengenai eksistensi batik Banyuwangi. Hal tersebut juga dapat menambah pendapatan IKM batik. Adanya BBF dan event untuk batik merupakan salah satu upaya pemerintah Banyuwangi untuk mempromosikan batik Banyuwangi, selain itu dengan adanya Banyuwangi Mall yang merupakan tempat khusus untuk hasil IKM di Banyuwangi menjadi wadah untuk IKM dalam menjual hasil produksi IKM yang ada di Banyuwangi tak terkecuali IKM batik. Masih adanya beberapa IKM yang belum bisa dimasukkan ke Banyuwangi Mall karena



terkendala dengan perizinan, walaupun begitu pemerintah daerah sudah berusaha dengan membantu dalam mengurus permasalahan perizinan IKM batik yang akan memasarkan ke Banyuwangi Mall. Pemerintah Banyuwangi juga menerapkan kebijakan untuk instansi daerah menggunakan batik Banyuwangi sebagai seragam wajib untuk instansi-instansi dan dinas di hari tertentu. Seragam untuk dinas-dinas di Banyuwangi ini ditentukan di hari tertentu saja tiap bulannya, untuk instansi seperti sekolah batik dikenakan tiap hari rabu dan kamis. Batik Banyuwangi sebagai seragam wajib untuk instansi dan dinas di Banyuwangi merupakan salah satu cara pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi.

2. Pemberdayaan IKM batik oleh pemerintah ada factor pendukung dan penghambat

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik yang dilakukan oleh pemerintah terdapat tiga faktor. Tiga factor tersebut yaitu dukungan dari pemerintah daerah yang membeberikandukungandenganmelakukanpelatihansertapromosi, perkembangan teknologi yang digunakan oleh para pelaku IKM batik, dan bahan baku untuk IKM melimpah yang biasanya harus memesan langsung dari daerah lain untuk sekarang sudah ada toko yang menjual bahan baku untuk membatik.



b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pemerintah daerah dalam pemberdayaan IKM batik di Banyuwangi ada tiga faktor, yaitu tenaga kerja untuk menjadi pengrajin masih kurang, kurangnya inovasi dalam desain batik, dan daya saing untuk batik Banyuwangi masih kurang dengan batik di daerah lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar produksi IKM batik menjadi lebih produktif maka dari itu perlu mempergunakan mobil UMKM sebaik-baiknya dengan menggerakkan mobil UMKM lebih sering lagi untuk mengontrol dan mendata apa saja kebutuhan IKM dengan begitu akan mempermudah pemberdayaan IKM batik serta memenuhi kebutuhan IKM.
2. Kegiatan untuk pemasaran seperti BBF dan festival batik lainnya hendaknya dievaluasi kembali apa yang kurang dan bagaimana agar para pelaku IKM batik dapat mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Anonym. 2014. *Banyuwangi dorong pengembangan ekonomi berbasis pariwisata*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2016 dari Banyuwangikab.go.id/berita-daerah/Banyuwangi-dorong-pengembangan-ekonomi-berbasis-pariwisata.html.

Anonym. 2014. *Mengenal batik khas Banyuwangi*. [Diakses pada tanggal 29 September 2016 dari \[www.banyuwangibagus.com /2014/10/mengenal-batik-khas-banyuwangi.html\]\(http://www.banyuwangibagus.com /2014/10/mengenal-batik-khas-banyuwangi.html\)](http://Diakses pada tanggal 29 September 2016 dari www.banyuwangibagus.com /2014/10/mengenal-batik-khas-banyuwangi.html).

Anonym. 2014. *Banyuwangi genjor promosi produk UMKM unggulan*. Diakses pada tanggal 29 September 2016 dari m.beritasatu.com/industri-perdagangan/177487-banyuwangi-genjot-promosi-produk-umkm-unggulan.html.

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: FE UGM.

Gunawan Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.



Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga.

Machfoed, Mas'ud. 2011. *Kewirausahaan Metode, Manajemen, dan Implementasi*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, Jhonny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book*. Singapore: SAGE Publication. (pdf)

Moleong, Lexy. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Muluk, M.R Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Banyumedia.

_____. 2009. *Peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Surabaya: ITS press.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

_____. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Prawirokusumo, Soeharto. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*.

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Sjaifudin, Hetifah, dkk. 1995. *Strategidan Agenda pengembangan usaha kecil*.

Bandung: AKATIGA.

Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan*

Strateginya). Cetakan kedelapan. Jakarta. Gunung Agung.

Simatupang, Lono Lastoro. 2013. *Kerajinan Batik dan Tenun*. Yogyakarta: Balai

Pelestarian Nilai Budaya.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*

dan R&D. Bandung: Alfabeta.

_____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Suprayanto, W.R. 2012. *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*.

Bandung: Alfabeta.

Suryana. 2013. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: mengubah Ide dan Menciptakan*

peluang. Jakarta: Salemba Empat.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Yogyakarta.

UB Press.

Suseno, T. W, dkk. 2005. *Responsisi usaha mikro, kecil, menengah dalam*

perekonomian nasional. Yogyakarta: universitas sanata Darma.

Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.



Syahroni, 2001. *Pengertian Dasar dan Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jurnal visi perencana Vol. 1 No 1, Oktober 2001
Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran pembangunan tingkat nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.

Tjokroamidjojo, Bintoro.1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta. LP3ES

_____. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Tambunan, tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

_____. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia: Beberapa isu penting*. Jakarta: Salemba empat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ([pdf](#))

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

World Bank. 1997. *The Development Report*. Washington DC: World Bank.



Daftar Pertanyaan

Untuk dinas koperasi dan UMKM

1. Apakah ada program pemberdayaan untuk Industri batik?
2. Jika ada seperti apa saja kegiatannya?
3. Bagaimana keadaan SDM di industri batik?
4. Apa upaya dinas dalam pengembangan usaha industri batik?
5. Teknologi apa saja yang digunakan para pengrajin batik dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi saat ini?
6. Bagaimana peran pemerintah dalam pemasaran?
7. Apakah kegiatan BBF memberikandampak yang baik terhadap perkembangan Industri batik?
8. Apakah sudah ada peraturan mengenai industri batik Banyuwangi?
9. Bagaimana keadaan permodalan di industri batik?
10. Saran dan prasarana apa saja yang diberikan kepada industri batik?
11. Apa faktor pendukung dan penghambat dengan perkembangan industri batik di Banyuwangi?
12. Apa rencana kedepan untuk mengembangkan industri batik?

Untuk disperindagtam

1. Apakah ada program pemberdayaan untuk Industri batik?
2. Jika ada seperti apa saja kegiatannya?



3. Bagaimanakeadaan SDM di industri batik?
4. Apaupayadinasdalam pengembanganusahaindustri batik?
5. Teknologiapasaja yang digunakan para pengrajin batik danbagimanaupayapemerintahdalammeningkatkanpengetahuanmengenai penggunaanteknologisaatini?
6. Bagaimanaperanpemerintahdalam pemasaran?
7. Apakahkegiatan BBF memberikandampak yang baikterhadapperkembanganIndustri batik?
8. Apakahsudahadaperaturanmengenaiindustri batik Banyuwangi?
9. Bagaimanakeadaanpermodalan di industri batik?
10. Saranadanprasaranaapasaja yang diberikankepadaindustri batik?
11. Apafaktorpendukungdanpenghambatdenganperkembanganindustri batik di Banyuwangi?
12. Aparencanakedepanuntukmengembangkanindustri batik?
Untukpelaku UMKM
1. Bagaimana awal mula memulai industri?
2. Darimanakah bahan baku pembuatan batik di dapat?
3. Apakahterdapatpermasalahanketika proses produksi batik mulaidaripermodalan, teknologi, saranaprasarana, pengadaanbahanbakudanpromosi?
4. Apakahkegiatan BBF membantuindustri batik Banyuwangi?
5. Apakahsudahadapelatihandaripemerintah ?



6. Kegiatan apa saja yang sudah ada dalam pelatihan tersebut?
7. Apakah mudah mendapatkan modal dari pemerintah?
8. Bagaimana pemasaran industri batik?
9. Apakah ada kelompok paguyuban yang menaungi industri batik?
10. Jika sudah ada bagaimana perannya dalam membantu mengembangkan industri?